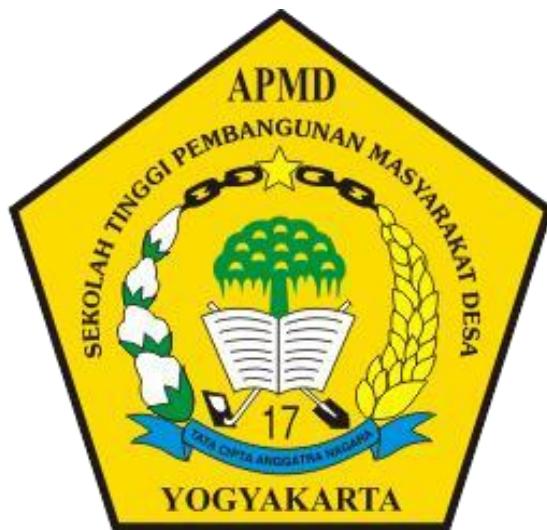


**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN  
UMKM DISABILITAS BERBASIS POTENSI DISABILITAS DI  
KABUPATEN WONOSOBO**

**TESIS**



**disusun oleh:**

**ANGGA PRATAMA**

**23610059**

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH  
TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2025**

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM  
PENGEMBANGAN UMKM DISABILITAS BERBASIS  
POTENSI DISABILITAS DI KABUPATEN WONOSOBO**



ANGGA PRATAMA

23610059

**PROGRAM MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN SEKOLAH  
TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN

### COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM DISABILITAS BERBASIS POTENSI DISABILITAS DI KABUPATEN WONOSOBO

disusun oleh:

**ANGGA PRATAMA**

**23610059**

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Penguji Tesis  
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”  
Pada Tanggal 12 Juni 2025 dan dinyatakan telah memenuhi syarat lulus

**PANITIA PENGUJI TESIS**

Nama

1. Dr. Sugiyanto, M.M.

Ketua/Pembimbing

2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si

Penguji Samping I

3. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP, MPA

Penguji Samping II

Tanda Tangan

Mengetahui,  
Direktur Program Pascasarjana  
Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan



Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP, MPA

NIDN. 0507106801

## HALAMAN PENGESAHAN

### TESIS

*COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM  
DISABILITAS BERBASIS POTENSI DISABILITAS DI KABUPATEN  
WONOSOBO*

Disusun oleh:

ANGGA PRATAMA

23610059

Disahkan oleh Tim Pengaji

Pada Tanggal :

**Susunan Tim Pengaji**

**Nama**

**1. Dr. Sugiyanto, M.M.**

Ketua/Pembimbing

**2. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si**

Pengaji Samping I

**3. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP, MPA**

Pengaji Samping II

**Tanda Tangan**


Mengetahui,

**Direktur Program Pascasarjana**

**Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan**



**Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP, MPA**

**NIDN. 0507106801**

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angga Pratama

NIM : 23610059

Program Studi : Magister Ilmu Pemerintahan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN UMKM DISABILITAS BERBASIS POTENSI DISABILITAS DI KABUPATEN WONOSOBO”** adalah betul-betul karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam tesis tersebut telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Ijazah dan gelar yang saya peroleh dari tesis tersebut.

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



ANGGA PRATAMA

## **HALAMAN MOTTO**

“Allah Akan Meninggikan Orang-Orang Yang Beriman Di  
Antaramu Dan Orang- Orang Yang Diberi Ilmu Pengetahuan”  
(Surat Al-Mujadallah ayat 11)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-nya, maka penulis dapat menyelesaikan tesis ini dalam keadaan sadar, sehat, dan bahagia. Penulis persesembahkan tesis ini kepada orang- orang yang berarti dalam kehidupan penulis:

1. Ibunda tercinta, yang senantiasa mendoakan dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap lagkah.
2. Adinda Razcel Fernandes, yang selalu menjadi semangat dan penghibur di tengah proses yang menantang.
3. Ayahanda Tercinta (Bapak Hendra.,SIP.,MM) yang selalu memberikan support untuk penulis baik suka ataupun duka.
4. Dr. Sugiyanto, M.M yang telah memberikan motivasi dan arahan yang sangat berarti dalam penyusunan tesis ini.
5. Dr. Sutoro Eko Yunanto, selaku Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, yang menginspirasi dalam pemikiran dan dedikasi.
6. Ade Chandra, selaku dosen STPMD “APMD” Yogyakarta, yang menginspirasi dalam pemikiran dan dedikasi.
7. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 32 STPMD “APMD” Yogyakarta, atas kebersamaan, perjuangan, dan solidaritas yang tulus.
8. Seluruh kerabat, saudara, dan kolega, yang telah membantu, mendukung, dan mendoakan hingga tesis ini terselesaikan.

Terima kasih atas segala cinta, semangat, dan kontribusi kalian yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan ini.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan kuasanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul **“COLLABORATIVE GOVERNANCE PENGEMBANGAN UMKM DISABILITAS BERBASIS POTENSI DISABILITAS DI KABUPATEN WONOSOBO”**. Penulisan Teis ini tentu tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sekaligus menjadi dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan guna menyempurnakan tesis ini.
2. Dr. Rumsari Hadi Sumarto, S.IP, MPA selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta sekaligus dosen penguji yang telah memberikan masukan dan arahan guna menyempurnakan tesis ini.
3. Dr. Sugiyanto, M.M selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi dan juga arahan untuk tesis ini.
4. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan berbagi pengalamannya selama penulis mengenyam pendidikan.

5. Seluruh keluarga besar Civitas Akademika STPMD “APMD” Yogyakarta.
6. Seluruh penulis dalam karya ilmiahnya yang dikutip dan menjadi rujukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga skripsi ini dapat menjadi bahan pergulatan pembentukan pengetahuan dan memberikan asas kebermanfaataan bagi warga. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah terlibat membantu.

Yogyakarta, 23 Juli 2025

Penulis

ANGGA PRATAMA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>I</b>
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>II</b>
<b>HALAMAN PELAKSANAAN UJIAN .....</b>	<b>III</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>IV</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>VII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>VIII</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>X</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>XIV</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>XV</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>XVI</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Kajian Literatur. ....	17
C. Fokus Penelitian.....	26
D. Rumusan Masalah.....	26
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	26
1. Tujuan Penelitian.....	26
2. Manfaat Penelitian.....	27
F. Kerangka Konseptual .....	28
1. Dasar Hukum dan Kebijakan Tata Kelola UMKM	
Disabilitas.....	28
2. Pengembangan UMKM Disabilitas .....	34
3. Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas.....	37
4. <i>Collaborative Governance</i> .....	39

G. Kerangka Berpikir .....	42
<b>BAB II METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Subjek Penelitian .....	46
C. Objek Penelitian.....	46
D. Lokasi Penelitian .....	46
E. Teknik Pengumpulan Data.....	47
1. Observasi.....	47
2. Wawancara.....	48
3. Dokumentasi .....	55
F. Teknik Pemilihan Informan .....	60
G. Teknik Analisis Data .....	63
1. Pengumpulan Data .....	63
2. Reduksi Data.....	63
3. Penyajian Data .....	64
4. Penarikan Kesimpulan .....	65
H. Validasi Data .....	65
1. Uji Derajat Kepercayaan .....	65
2. Uji Keteralihan .....	67
3. Uji Kebergantungan .....	68
4. Uji Kepastian.....	69
<b>BAB III KONTEKS SOSIAL DAN PROFIL AKTOR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DISABILITAS DI KABUPATEN WONOSOBO .....</b>	<b>71</b>
A. Karakteristik Wilayah Penelitian: Kabupaten Wonosobo Sebagai Locus Kolaborasi Inkusif.....	72
B. Profil Aktor-Aktor Kunci.....	73

1. Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW).....	73
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo .....	84
3. Sektor Swasta dan Mitra Kolaboratif.....	95
C. Wadah Pemberdayaan: Difabel Mart.....	98
<b>BAB IV ANALISIS <i>COLLABORATIVE GOVERNANCE</i></b>	
<b>DALAM PENGEMBANGAN UMKM DISABILITAS</b>	
<b>BERBASIS POTENSI</b>	
<b>DI KABUPATEN WONOSOBO .....</b>	<b>117</b>
A. Peran Aktor Dalam <i>Collaborative Governance</i>	
Pengembangan UMKM Disabilitas .....	119
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo .....	119
2. Organisasi Penyandang Disabilitas di Kabupaten	
Wonosobo.....	143
3. Sektor Swasta, Media, dan Masyarakat .....	153
B. Pola Interaksi dan Analisis <i>Collaborative Governance</i> Dalam	
Pengembangan UMKM.....	157
1. Pola Interaksi.....	157
2. Analisis <i>Collaborative Governance Regime</i> .....	161
C. Faktor Pendukung dan Penghambat Pengembangan UMKM	
Disabilitas .....	170
1. Faktor Pendukung .....	171
2. Faktor Hambatan.....	180
<b>BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI .....</b>	<b>197</b>
A. Kesimpulan .....	197
B. Rekomendasi.....	199
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>201</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>207</b>

A. Olahan Data Hasil Wawancara Komunitas Disabilitas .....	207
B. Olahan Data Hasil Wawancara Masyarakat .....	238
C. Olahan Data Hasil Wawancara Partner .....	22
D. Olahan Data Hasil Wawancara Pemerintah Kabupaten Wonosobo .....	249
E. Olahan Data Hasil Wawancara UMKM Disabilitas .....	279
F. Olahan Data Sejarah Difabel Mart Perspektif Pelaku Sejarah ..	309

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data UMKM Indonesia.....	3
Tabel 1.2 Data UMKM Provinsi Jawa Tengah.....	8
Tabel 1. 3 Komparasi Aspek UMKM Disabilitas dari UU Disabilitas dan UU Cipta Kerja .....	30
Tabel 2. 1 Waktu dan Pelaksanaan Wawancara.....	50
Tabel 2. 2 Dokumentasi .....	56
Tabel 2. 3 Informan Penelitian.....	61
Tabel 3. 1 Pengurus IDW.....	80
Tabel 3. 2 Daftar Pelaku Usaha Difabel Mart.....	105
Tabel 4. 1 Data UMKM Disabilitas dan Pelatihan Oleh Pemerintah.....	120
Tabel 4. 2 Pameran UMKM Disabilitas.....	138
Tabel 4. 3 Keterdaftaran UMKM di Disdagkop UKM dan Difabel Mart.....	185

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Jumlah UMKM Berdasarkan Kabupaten Kota Jawa Tengah	10
Gambar 2 Model <i>Collaborative Governance Regime</i> (CGR).....	40
Gambar 3 Kerangka Berfikir Penelitian.....	42
Gambar 4 Surat Keterangan Domisili IDW .....	74
Gambar 5 Sekretariat IDW.....	75
Gambar 6 Sekretaris IDW / Ketua HWDI .....	75
Gambar 7 Struktur Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW).....	79
Gambar 8 Jumlah Disabilitas Kabupaten Wonosobo 2023.....	81
Gambar 9 Pelatihan yang dilakukan IDW.....	82
Gambar 10 Struktur Difabel Mart .....	101
Gambar 11 Pelaku USaha Disabilitias .....	104
Gambar 12 Contoh Produk Difabel Mart.....	108
Gambar 13 Jasa Pijat Tuna Netra.....	109
Gambar 14 Dokumentasi Pelatihan Batik di Desa Maroon .....	123
Gambar 15 Sertifikat Pelatihan Pijat.....	125
Gambar 16 Pelatihan Kewirausahaan dari Dinsos .....	127
Gambar 17 Omzet Difabel Mart 2022-2023 .....	132
Gambar 18 Platform Digital UMKM Wonosobo.....	134
Gambar 19 Promosai Produk UMKM Disabilitas pada Platform Online.....	135
Gambar 20 Dukungan Kebijakan Disabilitas.....	139
Gambar 21 Penerimaan CsR Bank Wonosobo .....	154

## ABSTRAK

Studi ini berangkat dari pentingnya penguatan kapasitas ekonomi penyandang disabilitas melalui pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Wonosobo. Meski terdapat berbagai kebijakan pemberdayaan, pengelolaan UMKM disabilitas masih menghadapi kendala, seperti terbatasnya akses pasar, rendahnya literasi digital, dan lemahnya koordinasi multipihak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola interaksi, dinamika kolaborasi, dan peran aktor dalam pengembangan UMKM disabilitas dengan menggunakan perspektif *Collaborative Governance Regime* sebagai kerangka analisis.

Studi ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Informan terdiri atas penyandang disabilitas pelaku UMKM, pengurus organisasi disabilitas, pejabat pemerintah daerah, sektor swasta, serta masyarakat konsumen. Analisis data dilakukan melalui reduksi, interpretasi mendalam, dan dilakukan uji data untuk mengidentifikasi elemen *Collaborative Governance Regime*, yaitu *principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action* sebagai dasar pemahaman dinamika kolaborasi pengembangan UMKM disabilitas.

Hasil studi menunjukkan *Collaborative Governance* di Kabupaten Wonosobo berjalan melalui peran aktif pemerintah, Ikatan Disabilitas Wonosobo, dan sektor swasta. Kolaborasi ini mendorong akses pasar, peningkatan pendapatan, dan penguatan kelembagaan UMKM disabilitas. Masih terdapat tantangan dalam pengembangannya berupa keterbatasan infrastruktur, kesenjangan data, dan koordinasi masih menghambat keberlanjutan. Penelitian merekomendasikan penguatan sinergi multipihak, kebijakan inklusif, dan peningkatan kapasitas digital agar tata kelola lebih optimal.

**Kata Kunci:** *Collaborative Governance*, UMKM Disabilitas dan Pemberdayaan Sosial-Ekonomi

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Studi ini hendak mengulas tentang aspek *governance* dari pemerintah daerah terkait dengan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini berangkat dari esensi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Undang-Undang Disabilitas bertujuan untuk mengakui, menghargai, dan melindungi keberadaan penyandang disabilitas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat serta memiliki potensi dan hak yang sama.

Pertama, sebuah konsep pemberdayaan dihadirkan dalam rangka menjamin hak dan kesetaraan yang sama dalam semua aspek kehidupan, yakni pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, sosial, dan ekonomi. Konsep pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas yang mengandung pemberdayaan sosial dilembagakan dalam bentuk kewajiban pemerintah daerah untuk peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan usaha.

Kedua, dalam melaksanakan hal esensi dari undang-undang tersebut wajib dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta. Dalam hal ini pemerintah bukan hanya pemerintah pusat

melainkan juga pemerintah daerah. Hal ini wajib dilakukan dalam rangka pelaksanaan dan pemenuhan hak serta melindungi penyandang disabilitas dari eksplorasi, dan segala tindak diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Kehadiran negara atau daerah menjadi penting untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terlindungi dan dipenuhi.

Melihat pentingnya peranan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, dalam dunia pemerintahan dikenal sebuah konsep yang dikenal *Governance*. Konsep *Governance* sering diasosiasikan dengan tata kelola pemerintahan yang saat ini mencakup pengelolaan dalam sektor publik dan swasta (Putri *et al.*, 2024). Seiring dengan berkembangnya praktik pemerintahan, konsep ini ikut berkembang dari masa ke masa dan memperluas cakupannya dari berbagai aktor dan institusi di luar pemerintah. Cakupan studi *governance* berkembang, lalu menghasilkan konsep *networking governance* dan *collaborative governance* (Putri *et al.*, 2024).

Studi *governance* penting dalam penelitian ini karena dalam melakukan pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas ditingkat pemerintah daerah diperlukan sebuah kerangka kebijakan publik yang kuat, partisipasi dan inklusifitas yang bersifat *bottom up*, koordinasi antar institusi yang efektif, serta evaluasi yang berkelanjutan. Oleh karena ‘*government without governance*’ atau pemerintah tanpa interaksi dengan pihak luar akan menjadi menjadi otokratik- birokratik seperti dunia perkantoran, sedangkan ‘*governance without government*’, interaksi pihak luar tanpa pemerintah akan membuat pemerintah seperti dunia pasar (Yunanto, 2021).

Studi *governance* dalam penelitian ini diletakan dalam kerangka konsep *collaboritve governance* atau kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pengembangan UMKM berbasis potensi disabilitas. *Collaborative governance* atau kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pemberdayaan UMKM menjadi salah satu cara terbaru yang digunakan (Rahmadevi and Hertati, 2024). Tata kelola kolaboratif dibentuk oleh pertemuan antar pemangku kepentingan dalam rangka menjalin komunikasi yang intensif untuk dapat mencapai tujuan bersama. Para pemangku kepentingan ini mencakup individu, kelompok, dan lembaga (Hertati and Arif, 2022).

Studi ini melihat *collaboritve governance* di tingkat pemerintah daerah dalam rangka pengembangan UMKM berbasis potensi disabilitas. Sebagaimana pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan penggalian potensi dan sumber daya, pemberian akses, dan bahkan memberikan bantuan usaha. *Collaboritve governance* dilakukan untuk dapat menciptakan produk kebijakan publik yang kuat, menumbuhkan partisipasi dan inklusifitas yang *bottom up*, melakukan koordinasi antar institusi dan evaluasi berkelanjutan, demi tercapainya pemberdayaan sosial penyandang disabilitas.

Tabel 1. 1 Data UMKM Indonesia

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia	68 Juta Pelaku UMKM	Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sektor UMKM 2023 <a href="Https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5318/Dorong-">Https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5318/Dorong-</a>
---	---------------------	--

		<u>Umkm-Naik-Kelas-Dan-Go-Export-Pemerintah-Siapkan-Ekosistem-Pembiasaan-Yang-Terintegrasif</u>
Kontribusi UMKM bagi Produk Domestik Bruto (PDB)	61% atau Rp 9.580 T	Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sektor UMKM 2023 <a href="Https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5318/Dorong-Umkm-Naik-Kelas-Dan-Go-Export-Pemerintah-Siapkan-Ekosistem-Pembiasaan-Yang-Terintegrasif">Https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5318/Dorong-Umkm-Naik-Kelas-Dan-Go-Export-Pemerintah-Siapkan-Ekosistem-Pembiasaan-Yang-Terintegrasif</a>
Jumlah UMKM Disabilitas di Indonesia	22,82 juta pelaku UMKM	Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sektor UMKM dan Sakernas 2023 <a href="https://www.rri.co.id/umkm/521930/kemenkopukm-ajak-penyandang-disabilitas-optimalkan-teknologi-digital">https://www.rri.co.id/umkm/521930/kemenkopukm-ajak-penyandang-disabilitas-optimalkan-teknologi-digital</a>
Kontribusi UMKM Disabilitas bagi Produk Domestik Bruto (PDB)	Rp. 3.216 T	Data olahan berdasarkan angka-angka sebelumnya.

Sumber : Data sekunder diolah, 2024

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas UMKM sendiri menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Data terbaru dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia sektor UMKM memberikan kontribusi produk domestik bruto (PDB) sebesar 61% atau senilai dengan Rp 9.580 Triliun.

Adapun jumlah UMKM di Indonesia per tahun 2023 berjumlah 68 juta. Berdasarkan data tersebut artinya sektor UMKM yang berjumlah 68 juta tersebut telah menjadi salah satu pendorong utama perekonomian nasional UMKM menjadi sektor yang paling penting untuk menggerakan perekonomian Indonesia.

Berbasis pada data dalam tabel 1.1 bahwasannya UMKM disabilitas di Indonesia dari 68 juta ternyata berjumlah 22,82 juta. Artinya ada sekitar 33,56% dari total jumlah UMKM di Indonesia adalah UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. Selain itu, bila dari 68 juta UMKM memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp 9.580 Triliun, maka dari nilai tersebut UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas menyumbang sebesar Rp. 3.216 Triliun. Nilai ini menunjukkan kontribusi UMKM disabilitas sangat penting dalam konteks ekonomi nasional dan menjadi bagian yang integral dari ekonomi lokal maupun nasional.

Pada kacamata yang berbeda, UMKM disabilitas memiliki tantangan dalam pengembangan bisnis yang dijalankan. Seperti halnya terkait strategi pemasaran yang belum optimal sehingga belum mencapai pangsa pasar yang luas (Atika, 2024). UMKM disabilitas dinilai sulit berkembang dan bersaing karena kurangnya akses dukungan sumber daya, jaringan yang memadai, serta infrastruktur pengembangan yang cukup (Ilham *et al.*, 2024). Para penyandang disabilitas dipandang tidak banyak memiliki kesempatan produktif untuk mengembangkan produk dan tidak dapat mandiri secara finansial sehingga memiliki akses kurang (Pratiwi and Rahmi, *et al.*, 2024).

Peluang wirausaha yang dijalankan oleh para penyandang disabilitas di Indonesia sangat dipengaruhi oleh pendidikan, akses terhadap teknologi termasuk pemahaman internet, pelatihan kerja, lokasi tinggal, dan jenis disabilitas (Rahimi, Tan and Bachtiar, 2023). Hal ini dibuktikan oleh salah seorang penyandang disabilitas yang belum menuai keberuntungan ketika menjadi *reseller online* karena belum paham teknologi (Biorxiv n2, 2024). Padahal keberadaan ekonomi digital memberikan pengaruh besar dalam meningkatkan kesejahteraan (Nopiah and Islami, 2022).

Keberhasilan memanfaatkan ekonomi digital ditujukan oleh ‘Difa City Tour atau Ojek Difa’ di Yogyakarta (Nopiah and Islami, 2022). Ojek Difa ini merupakan akses layanan publik yang dilakukan oleh para penyandang disabilitas di Yogyakarta. Ada lima layanan yang diberikan, yakni transportasi, keliling kota Yogyakarta, pijat, kargo, dan jasa angkut. Hadirnya ‘Ojek Difa’ dibuktikan memberikan dampak positif secara sosial dan ekonomi para penyandang disabilitas.

Keberhasilan lanjutan selain dari memanfaatkan teknologi seperti *platform online* adalah pelatihan-pelatihan untuk pengembangan inovasi penyandang disabilitas. Penciptaan produk keset yang biasa menjadi keset kartun oleh para disabilitas tuna netra dapat memperluas pangsa pasar yang dipasarkan melalui media online (Atika, 2024). Melihat pada hal tersebut, maka dapat diartikan memberikan akses kemudahan dalam bentuk pelatihan kerja, akses internet, dan dukungan bagi para penyandang disabilitas maka akan membuat peluang usaha menjadi sukses.

Berkaca dari beberapa data-data dan studi terdahulu terkait dengan UMKM yang dijalankan penyandang disabilitas, maka dapat dikatakan untuk dapat terus mendorong pemberdayaan UMKM disabilitas supaya dapat berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian lokal maupun nasional, maka harus ada gotong royong antar kelembagaan (misalnya; pemerintah, swasta, dan penyandang disabilitas/ masyarakat). Gotong royong itu untuk mengatasi tantangan pengembangan bisnis seperti strategi pemasaran yang belum optimal, akses terhadap sumber daya dan infrastruktur, dan kurangnya kesempatan produktif.

Penguatan kapasitas ekonomi penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari agenda pembangunan inklusif dalam berbagai regulasi nasional maupun internasional. Dalam konteks Indonesia, penyandang disabilitas masih menghadapi hambatan struktural dalam mengakses kesempatan ekonomi yang setara, meskipun telah terdapat Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Dsaibilitas.

Salah satu pendekatan strategis untuk meningkatkan kemandirian ekonomi kelompok ini adalah melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal. UMKM, tidak hanya berperan sebagai penopang ekonomi keluarga, tetapi juga sebagai ruang partisipasi sosial yang mendukung integrasi penyandang disabilitas dalam masyarakat.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana dalam penjelasan data yang telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan bahwa UMKM telah menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia. Tentunya hal ini ditopang dari beberapa UMKM di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1. 2 Data Jumlah UMKM di Provinsi Jawa Tengah

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Sumber</b>
2018	143.738	<a href="https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/umkm">https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/umkm</a>
2019	161.458	
2020	167.391	
2021	173.431	
2022	180.579	
2023	187.746	
2024	191.689	
<b>Jumlah</b>	<b>1.206.032</b>	

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas menunjukkan jumlah UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2018 hingga tahun 2024. Data yang diambil dari satu data Provinsi Jawa Tengah terkait dengan jumlah UMKM ini menunjukkan adanya trend peningkatan jumlah UMKM yang terdaftar atau di bina oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah selama periode tersebut. Peningkatan ini mencerminkan usaha yang berkelanjutan dari Pemda Jateng dalam mendukung dan membina UMKM, yang juga merupakan pilar penting penggerak roda perekonomian lokal.

Berdasarkan jumlah UMKM yang disajikan pada tabel 1.2, dapat kita narasikan dan hitung persentase pertumbuhan dari tahun ke tahun menggunakan cara, jumlah UMKM tahun ini dikurangi

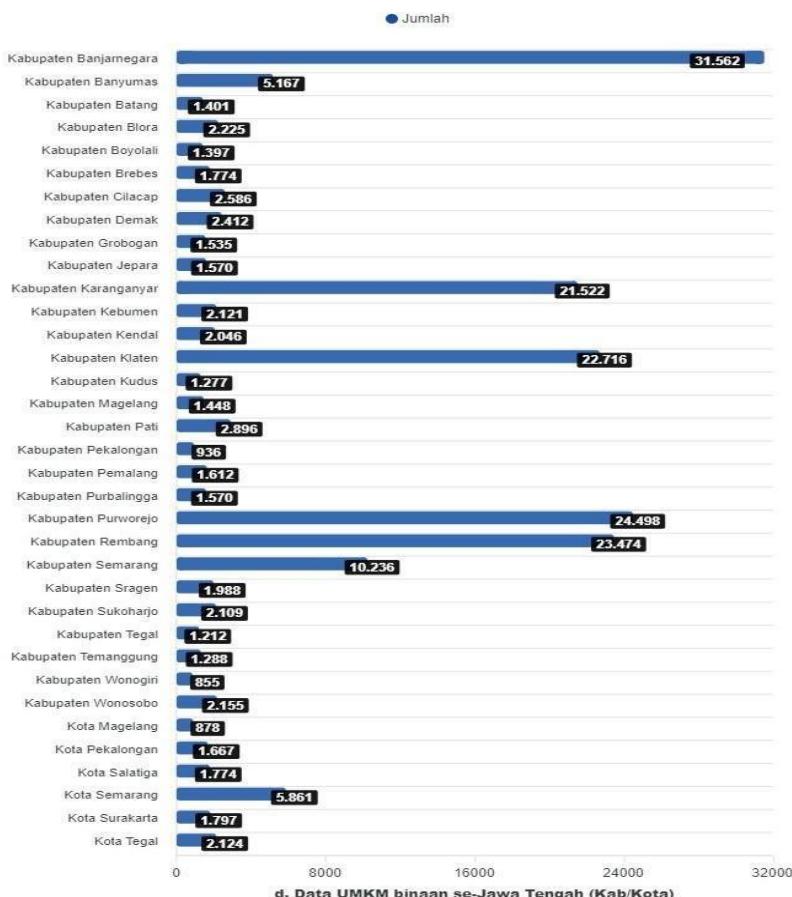
jumlah tahun sebelumnya dibagi dengan jumlah tahun sebelumnya dan dikalikan 100%, maka dapat dikatakan pada tahun 2018 jumlah UMKM tercatat sebanyak 143.378 unit. Pada tahun 2019 jumlah UMKM mengalami peningkatan menjadi 161.458 unit, menunjukkan pertumbuhan sebesar 12.33% dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020 tren peningkatan berlanjut dengan jumlah UMKM mencapai 167.391 unit. Pertumbuhan ini lebih moderat, yaitu sebesar 3.68% dari tahun 2019. Pada tahun 2021 terdapat peningkatan yang cukup signifikan dengan jumlah UMKM mencapai 173.431 unit, pertumbuhan sebesar 3.61% dibandingkan tahun 2020. Pertumbuhan terus berlanjut pada tahun 2021 dengan jumlah UMKM mencapai 180.579 unit, yang berarti peningkatan sebesar 4.11% dari tahun sebelumnya.

Pada tahun 2023 jumlah UMKM mencapai 187.746 unit, menunjukkan pertumbuhan sebesar 3.98% dari tahun 2022. Proyeksi atau data ter-kini pada tahun 2024 menunjukkan jumlah UMKM mencapai 191.689 unit, dan pertumbuhan meningkat 2.10% dibandingkan tahun 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan efektivitas program pembinaan dan dukungan yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga terkait. Meskipun ada fluktuasi dalam persentase pertumbuhan tahunan, arah umumnya tetap menunjukkan peningkatan jumlah UMKM yang dibina setiap tahun.

Pada akhirnya jumlah UMKM yang ada di Provinsi Jawa Tengah sekarang ini sejumlah **1.206.032** unit. Peningkatan jumlah UMKM binaan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya perkembangan positif dalam ekosistem UMKM di Jawa Tengah. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian lokal

melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Dukungan terus-menerus dari pemerintah dan lembaga terkait sangat penting untuk mempertahankan dan meningkatkan tren positif ini di masa mendatang.



Gambar 1 Jumlah UMKM berdasarkan Kabupaten Kota  
di Provinsi Jawa Tengah

Sumber: <https://satudata.dinkop-umkm.jatengprov.go.id/umkm>

Berdasarkan data pada gambar 1 di atas disajikan jumlah UMKM berbasis kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. Dapat diketahui, kabupaten/ kota dengan jumlah UMKM terbanyak berada di 5 (lima) kabupaten. Diantaranya adalah Kabupaten Banjarnegara sejumlah 31.562 unit, disusul oleh Kabupaten Purworejo sejumlah 24.498 unit, Kabupaten Rembang sejumlah 23.474 unit, Kabupaten Klaten 22.716 unit, dan Kabupaten Karanganyar sejumlah 21.522 unit.

Terdapat 10 (sepuluh) kabupaten dengan jumlah UMKM tingkat sedang di Provinsi Jawa Tengah. Diantaranya adalah Kabupaten Semarang sejumlah 10.236 unit, Kabupaten Banyumas sejumlah 5.167 unit, Kabupaten Pati sejumlah 2.896 unit, Kabupaten Cilacap sejumlah 2.586 unit, Kabupaten Demak sejumlah 2.412 unit, Kabupaten Blora sejumlah 2.225 unit, **Kabupaten Wonosobo sejumlah 2.155 unit**, Kabupaten Kebumen sejumlah 2.121 unit, Kabupaten Sukoharjo sejumlah 2.109 unit, dan Kabupaten Kendal sejumlah 2.046 unit.

Terdapat 14 (Empat Belas) kabupaten dengan jumlah UMKM rendah di Provinsi Jawa Tengah. Diantaranya adalah Kabupaten Sragen sejumlah 1.988 unit, Kabupaten Brebes sejumlah 1.774 unit, Kabupaten Pemalang sejumlah 1.612 unit, Kabupaten Jepara sejumlah 1.570 unit, Kabupaten Purbalingga sejumlah 1.570 unit, Kabupaten Grobogan sejumlah 1.535 unit, Kabupaten Magelang sejumlah 1.448 unit, Kabupaten Batang sejumlah 1.401 unit, Kabupaten Boyolali sejumlah 1.397 unit, Kabupaten Temanggung sejumlah 1.288 unit, Kabupaten Kudus sejumlah 1.227, Kabupaten Tegal sejumlah 1.212 unit, Kabupaten Pekalongan sejumlah 936 unit,

Kabupaten Wonogiri sejumlah 855 unit.

Terdapat 2 (dua) kota dengan jumlah UMKM tingkat sedang di Provinsi Jawa Tengah. Yaitu, Kota Semarang sejumlah 5.861 unit dan Kota Tegal sejumlah 2.124 unit. Terdapat 4 (empat) kota dengan jumlah UMKM tingkat rendah di Provinsi Jawa Tengah. Yaitu, Kota Surakarta sejumlah 1.797 unit, Kota Salatiga sejumlah 1.774 unit, Kota Pekalongan sejumlah 1.667 unit, dan Kota Magelang 878 unit.

Data sebagaimana pada gambar 1 sangat penting untuk memahami distribusi UMKM di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten dan kota dengan jumlah UMKM yang tinggi menunjukkan keberhasilan dalam mendukung dan mengembangkan sektor UMKM, sedangkan daerah dengan jumlah UMKM yang lebih rendah membutuhkan perhatian dan dukungan lebih lanjut untuk meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Pemerintah daerah dan pihak terkait perlu terus mengembangkan strategi yang efektif untuk mendukung pertumbuhan UMKM di seluruh provinsi.

Dari data-data tersebut, sejatinya penelitian ini mengarah pada UMKM Disabilitas. Namun, hingga saat ini belum ada data kongkrit terkait UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas, baik di tingkat provinsi maupun yang sudah dijabarkan per kabupaten atau kota. Meskipun data umum mengenai jumlah UMKM di berbagai wilayah di Provinsi Jawa Tengah sudah tersedia, informasi spesifik mengenai keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor UMKM masih sangat terbatas.

Ketiadaan data ini mengindikasikan adanya kebutuhan mendesak untuk pengumpulan dan pengelolaan data yang lebih rinci dan spesifik terkait UMKM Disabilitas. Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, upaya untuk memahami tantangan, peluang, serta kebutuhan khusus dari UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas dapat dilakukan dengan lebih efektif. Hal ini juga akan membantu dalam merumuskan kebijakan dan program yang lebih tepat sasaran untuk mendukung pengembangan UMKM Disabilitas di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Studi ini memilih lokasi di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Pemilihan lokasi ini menarik karena berdasarkan kondisi eksisting yang digeneralisir melalui observasi awal didapatkan sebuah keinginan dari para penyandang disabilitas terutama yang bergabung dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kabupaten Wobosobo (HWDI) menginginkan penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo memiliki daya tarik atau memiliki value yang lain seperti daerah lain, namun menurut penilaian masyarakat Wonosobo masih biasa saja dan cenderung masih memiliki stigma buruk terhadap penyandang disabilitas.

Stigma-stigma buruk yang banyak dialami oleh penyandang disabilitas terutama yang bergerak di bidang UMKM di Kabupaten Wonosobo seperti dipandang tidak bisa mengembangkan produktifitas, karena keterbatasan fisik (seperti: menggunakan kursi roda) ketika menggunakan jasa transportasi ojek mobil mengalami rasisme. Tidak hanya itu namun menurut keterangan dari HWDI, para penyandang disabilitas terutama yang bergerak dalam bidang UMKM masih memiliki kekurangan seperti kemampuan digital marketing,

akses jaringan, dan akses terhadap permodalan.

Para penyandang disabilitas yang bergerak dalam bidang UMKM di Kabupaten Wonosobo sebenarnya memiliki keinginan dan kemauan untuk berkembang dan mandiri dengan usaha bisnisnya. Oleh karena itu, para UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo memiliki harapan adanya perhatian dan bantuan untuk bagaimana mereka ini dapat memperoleh akses pengembangan kapasitas diri, akses jaringan, infrastruktur, dan akses permodalan untuk pengembangan bisnis-nya. Bisnis UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo banyak bergerak di bidang kuliner dan jasa (jahit dan pijat).

Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu daerah yang telah menunjukkan inisiatif untuk memberdayakan penyandang disabilitas melalui pengembangan UMKM. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh komunitas disabilitas seperti Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) yang memfasilitasi pelatihan keterampilan dan membentuk unit usaha bersama, seperti *Difabel Mart*.

Pemerintah daerah juga turut mendukung melalui dinas-dinas terkait, serta kemitraan dengan sektor swasta yang menjalankan program *corporate sosial responsibility* (CSR). Namun, keberhasilan inisiatif ini masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dalam satu sistem tata kelola yang sinergis dan bekelanjutan.

Kondisi eksisting sebagaimana dinarasikan di atas dapat dilihat bahwasanya ada dua hambatan bagi UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosono, yakni stigma sosial dan keterbatasan pengembangan UKMM. Stigma sosial yang masih memandang penyandang disabilitas ini sebagai beban bukan melihat potensi dan kemampuan

para penyandang disabilitas dalam berwirausaha. Keterbatasan pengembangan UMKM disabilitas berkaitan dengan kemampuan digital marketing untuk memperluas pasar dan akses jaringan permodalan untuk pengembangan usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

Penyandang disabilitas yang bergerak di bidang UMKM memiliki keinginan kuat untuk berkembang dan mandiri melalui usaha mereka dengan perhatian dan bantuan untuk pengembangan potensi diri, akses jaringan, dan akses terhadap permodalan. Potensi UMKM disabilitas Kabupaten Wonosobo banyak bergerak di bidang kuliner dan jasa akan memiliki potensi besar jika didukung oleh akses yang memadai seperti pelatihan, jaringan, dan modal. Perhatian dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sangat diperlukan untuk mengatasi stigma dan mendukung pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

Keterbatasan akses pasar, rendahnya literasi digital pelaku UMKM disabilitas, serta lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan menyebabkan tumpang tindih peran kelembagaan. Ketidakterpaduan program lintas sektor juga mengakibatkan kesenjangan antara perencanaan dan implementasi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan tata kelola kolaboratif yang memungkinkan berbagai aktor dapat bekerja secara sinergis dan saling melengkapi dalam pengambilan keputusan, pelaksanaan, program, dan evaluasi hasil.

Studi ini menggunakan perspektif 5G Mazhab Timoho (Eko, 2021) yakni, *government (G1)*, *governing (G2)*, *governability (G3)*; *governance (G4)*, dan *governmentality (G5)*. *Goverment* adalah otoritas

tertinggi dalam arena pemerintahan seperti negara. *Governing* adalah perbuatan yang dilakukan oleh pemerintah. *Governability* berkaitan dengan otoritas dan kapasitas pemerintah dalam memerintah. *Governance* adalah interaksi yang dilakukan oleh pemerintah antar pemerintah maupun dengan negara dan masyarakat. *Govermentality* adalah seni dari praktik pemerintahan.

Studi ini memilih menggunakan *governance* untuk menjawab kompleksitas tersebut. Salah satu turunan dalam governance sebagaimana telah dijelaskan sejak awal adalah *colaborative governance*. Pendekatan *Collaborative Governance Regime (CGR)* menjadi kerangka konseptual yang tepat dalam menganalisis pola interaksi, dinamika kolaborasi, serta peran multipihak dalam pengembangan UMKM disabilitas.

Model CGR menekankan pada pentingnya keterlibatan aktor negara, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam satu arena kolaboratif yang didasari oleh motivasi bersama (*shared motivation*), keterlibatan yang berprinsip (*principled engagement*), dan kapasitas untuk bertindak bersama (*capacity for joint action*).

Dengan pendekatan ini, studi diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana kolaborasi lintas sektor dijalankan serta tantangan dan peluang yang menyertainya, khususnya dalam konteks pemberdayaan penyandang disabilitas di tingkat lokal.

## B. Kajian Literatur

Studi yang berkaitan dengan pengembangan UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas telah banyak dilakukan oleh beberapa orang. Studi dengan sudut pandang, desain studi, metode, konteks dan lingkungan, dan analisis yang berbeda-beda menghasilkan penafsiran hasil studi yang berbeda-beda pula. Hasil akhirnya menghasilkan rekomendasi yang berbeda- beda dari setiap studi, maka dari itu studi ini akan berusaha melakukan tinjauan literatur yang dapat membantu membangun pemahaman mendalam dan mendapatkan jalan baru pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

Penelitian yang dilakukan Pratiwi and Rahmi (2024) dengan judul ‘Peran *Corporate Social Responsibility* dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas’. Objek penelitian ini adalah CsR yang dilakukan oleh PT Bio Farma untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas. Peneliti melakukan observasi, wawancara mendalam, dan pengumpulan dokumen untuk mendapatkan data. Hasil penelitian ini menunjukkan CsR memiliki peranan penting untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Terdapat dua kelompok penyandang disabilitas yang dibantu oleh CsR PT BioFarma. Pertama adalah kelompok Creative D’Pro yang berfokus pada keterampilan atau usaha menjahit. Kedua adalah kelompok Cemara Paper yang fokusnya pada daur ulang kertas. Yang dilakukan oleh CsR PT BioFarma adalah dalam bentuk memberikan pelatihan, fasilitas produksi kedua kelompok, dukungan kegiatan dalam produksi maupun pameran. Tidak ada periodesasi yang jelas dalam CsR ini, namun hanya sebagai sebuah bentuk keberlanjutan saja.

Berbagai kendala yang ditemui dalam jalannya program CsR, ada kendala dari internal disabilitas maupun eksternal disabilitas. Dari internal adalah penyandang disabilitas masih belum dapat melepaskan diri dari permasalahan sosial seperti diskriminasi dan anggapan negatif dari masyarakat. Hal ini menjadikan para penyandang disabilitas rentan dan terhambat proses pencapaian atau keberlanjutan dari CsR yang akan diberikan lagi. Dari eksternal adalah belum banyak temuan penelitian serupa sehingga belum adanya perubahan program untuk pemberdayaan disabilitas melalui CsR.

Penelitian lain yang dilakukan Ilham et al (2024) berjudul ‘Pemetaan Jaringan Pendukung Transformasi Bisnis Digital pada UMKM Disabilitas Indonesia: Analisis Stakeholder Komprehensif’ mengidentifikasi dan memahami peran dan interaksi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendukung UMKM. Fokus studi ini pada video YouTube sebagai sumber data memberikan perspektif unik mengenai kehadiran online dan kebutuhan dukungan bagi UMKM penyandang disabilitas.

Identifikasi peran pemangku kepentingan yang beragam dan kontribusinya menyoroti pentingnya kolaborasi multi pihak dalam mendukung kelompok UMKM disabilitas. Pemangku kepentingan dalam studi ini ditunjukkan secara umum seperti pemerintah, lembaga keuangan, organisasi non-profit, akademisi, asosiasi usaha, dan masyarakat. Masing- masing memiliki peranan dan kontribusi dalam mendukung UMKM berbasis disabilitas.

Pemerintah berperan membuat regulasi yang mendukung UMKM Disabilitas dan menyediakan penyediaan pelatihan sekaligus dukungan finansial. Kendala yang dihadapi adalah rumitnya birokrasi

dan koordinasi antar lembaga. Sementara peranan dari organisasi non-profit memberikan dukungan dan advokasi dalam bentuk pelatihan kewirausahaan maupun dukungan mental. Kendalanya adalah pada dana yang sangat minim. Lembaga keuangan memiliki peran dalam penyediaan modal namun terkendala pemahaman UMKM Disabilitas. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam dukungan membeli produk UMKM disabilitas.

Penelitian yang dilakukan Zachari et al (2024) berjudul ‘Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Industri Batik Toeli Laweyan di Surakarta’ memberikan sudut pandang baru yang berfokus pada cikal bakal peranan masyarakat yang dilembagakan menjadi industri batik. Temuan dalam penelitian ini adalah Batik Toeli Laweyan memberikan pelatihan dan pendampingan langsung untuk memberdayakan penyandang disabilitas dalam proses membatik. Industri ini mempunyai strategi untuk mendukung pengembangan keterampilan penyandang disabilitas.

Penelitian ini juga membenarkan tantangan yang dihadapi dalam proses pemberdayaan, seperti hambatan komunikasi dan terbatasnya akses terhadap sumber daya. Keterbatasan penelitian yang hanya berfokus pada satu kelembagaan, maka penelitian ini dilihat memberikan perspektif unik mengenai pemberdayaan penyandang disabilitas di industri. Contohnya seperti dalam penelitian ini adalah industri batik. Implikasi yang dapat digunakan dari hasil temuan adalah untuk menginformasikan kebijakan dan program yang bertujuan mendukung penyandang disabilitas di tempat kerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Atika (2024) berjudul ‘Pengembangan Bisnis UMKM Santri Disabilitas Tuna Netra pada Bidang Inovasi dan Pemasaran di Cianjur Jawa Barat’ memberikan gambaran keberhasilan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi para santri tuna netra melalui inovasi produk dan pemasaran online. Penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan yang ditemukan dilapangan berupa kekurangan inovasi produk dan strategi pemasaran yang kurang optimal. Ada 17 Santri tuna netra dan 3 orang ahli, 7 orang dari pesantren.

Melalui penelitian tersebut ditunjukkan bahwa dengan pelatihan dan pendampingan yang tepat, santri tuna netra dapat mengembangkan kemampuan inovasi dan pemasaran yang signifikan, meningkatkan daya saing produk, dan mencapai keberhasilan dalam usaha mereka. Inisiatif ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi tetapi juga memberikan kontribusi positif dalam memperluas kesempatan ekonomi bagi individu dengan disabilitas visual di Cianjur, Jawa Barat. Penelitian ini menitikberatkan pada kebutuhan disabilitas tuna netra yang dilengkapi atau dibantu oleh pihak lain, dari pesantren dan elemen praktisi (ahli).

Penelitian Nopiah dan Islami (2022) yang berjudul ‘Peran Pemberdayaan Ekonomi Digital Difa *City Tour* (Ojek Difa) Terhadap Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Yogyakarta’ mengkaji dampak keberadaan layanan transportasi online Ojek Difa terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas di Yogyakarta. Ojek Difa dalam penelitian ini merupakan sebuah platform digital atau sebuah inovasi berbasis teknologi yang dikerjakan oleh penyandang disabilitas. Peneliti menggunakan metode

penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap 22 disabilitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan dengan adanya inovasi teknologi platform digital ‘Ojek Difa’ memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas yang tergabung di dalamnya. Secara sosial meningkatkan kepercayaan diri dan secara ekonomi menghasilkan pendapatan yang lebih. Buktiya terjadi peningkatan presentase pendapatan 1 Juta rupiah sebesar 27,3% dan kisaran 500 ribu - 1 juta sebesar 45,5% setelah adanya ‘Ojek Difa’.

Seluruh responden yang berjumlah 22 orang tersebut menyatakan ‘Ojek Difa’ memberikan pengaruh positif bagi peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas. Melalui penelitian ini ternyata keberadaan ekonomi digital melalui inovasi seperti ‘Ojek Difa’ terbukti mampu meningkatkan kualitas dan kesejahteraan UMKM yang dijalankan penyandang disabilitas. Penelitian ini memberikan gambaran positif keberhasilan penyandang disabilitas dalam bisnis dan memuat kunci-nya pada kreatifitas dan inovasi dalam akses teknologi adalah strategi pengembangan UMKM disabilitas.

Penelitian lain dilakukan oleh Rahimi, Tan dan Bachtiar (2023) yang berjudul ‘Determinan Wirausaha Penyandang Disabilitas di Indonesia: Analisis Kelompok Sektor Primer, Sekunder, dan Tersier’. Penelitian ini berangkat dari data survei angkatan kerja nasional (Sakernas) pada agustus 2020. Mengambil data Sakernas karena landasan masalahnya adalah tantangan yang dihadapi para penyandang disabilitas adalah akses pekerjaan dan stigma sosial yang buruk. Penelitian dilakukan secara deskriptif kuantitatif.

Ada 34.546 responden disabilitas yang terbagi dalam tiga sektor. Sektor primer sejumlah 19.253 responden, sekunder sejumlah 11.213 responden, dan tersier 4.080 responden. Analisisnya menggunakan analisis *logistik binner* untuk menganalisis determinan yang mempengaruhi peluang wirausaha yang dijalankan oleh para penyandang disabilitas dalam ketiga sektor tersebut. Adapun sektor primer adalah kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sektor sekunder berkaitan dengan industri manufaktrur olahan bahan mentah menjadi barang jadi. Sedangkan tersier adalah industri perdagangan jasa.

Temuan dari penelitian adalah peluang wirausaha bagi penyandang disabilitas sangat dipengaruhi oleh pendidikan, pelatihan kerja, dan akses terhadap teknologi informasi dalam berbagai sektor. Intervensi terhadap pendidikan, pelatihan kerja, peningkatan akses terhadap internet (teknologi informasi), dan peran serta pemerintah melalui kebijakan sangat penting untuk meningkatkan peluang wirausaha bagi penyandang disabilitas. Penelitian ini memberikan gambaran untuk membuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan inklusif yang mendorong wirausaha disabilitas.

Penelitian Ie dan Maupa (2024) yang berjudul ‘Peran Efikasi Diri dan Kepribadian Terhadap Komitmen Afektif Pemilik Usaha Mikro’ menganalisis pengaruh efikasi diri dan kepribadian terhadap komitmen afektif pemilik usaha mikro penyandang disabilitas, serta peran dukungan pemerintah sebagai moderator dalam hubungan tersebut. Komitmen afektif adalah bentuk dari dukungan pemerintah untuk keberlanjutan usaha yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif

yang sampel penelitiannya diambil penyandang disabilitas pada tiga kota di Provinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepribadian memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen afektif pemilik usaha mikro penyandang disabilitas, sementara efikasi diri dan dukungan pemerintah tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Dukungan pemerintah juga tidak modernisasi hubungan antara efikasi diri dan kepribadian dengan komitmen afektif. Penelitian ini tidak menunjukkan bentuk dukungan pemerintah yang secara signifikan dan belum mempertimbangkan kondisi lingkungan sosial dan ekonomi. Tidak ada hal apa yang dilakukan atau rekomendasi apa yang harus dilakukan pemerintah untuk melakukan pemberdayaan terhadap UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas.

Penelitian yang dilakukan oleh Rianda Dirkareshza, Meurina Desthabu, Aura Dwi Karunia (2024) berjudul ‘Pendayagunaan Pemahaman Hak Cipta Atas Karya Lokal Penyandang Disabilitas Dalam Peningkatan Ekonomi Kreatif’ memberikan gambaran kontribusi penting dalam membantu penyandang disabilitas memperoleh kepastian hukum atas karya mereka dan berkontribusi pada ekonomi kreatif melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh Yayasan Wisma Cheshire.

Kegiatan dalam penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah *Participatory Action Research (PAR)*, yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini hanya menunjukkan keberhasilan pemangku kepentingan yang dalam hal ini adalah Yayasan untuk dapat berkontribusi membantu UMKM yang dijalankan penyandang disabilitas dari sisi perijinan. Kunci

penting dari penelitian adalah sebuah pemberdayaan sosial UMKM disabilitas dilakukan oleh sebuah Yayasan (Swasta).

Penelitian oleh Sariani et al (2024) yang berjudul ‘UMKM Go-International: Pembuatan Video Profil Bilingual Sebagai *Branded-Content* Silvia Piobang *Handycraft*’ melihat perkembangan sebuah UMKM Binaan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm) Kota Padang dengan nama Silvia Piobang *Handycraft* yang telah banyak menciptakan lapangan pekerjaan dan pemberdayaan komunitas difabel namun masih mengandalkan media konvensional dalam hal pemasaran.

Tujuan penelitian ini untuk meningkatkan pemasaran produk UMKM Silvia Piobang *Handycraft* melalui strategi pemasaran konten dan kesadaran merek dengan pembuatan video profil bilingual. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif dengan pengumpulan data melalui pengamatan, wawancara, dokumen, dan angke. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemasaran dengan menggunakan video profil bilingual dapat secara signifikan meningkatkan kesadaran merek dan penjualan produk UMKM Silvia Piobang *Handycraft*.

Penelitian ini tidak hanya fokus pada peningkatan pemasaran tetapi juga pada pemberdayaan komunitas disabilitas, yang merupakan nilai tambah signifikan, yang itu dilakukan oleh pemerintah. Namun penelitian tersebut hanya terbatas pada salah satu UMKM saja, terkait hasil keseluruhan belum dapat diketahui bagaimana hasil dari upaya yang dilakukan pemerintah

setempat untuk pengembangan UMKM. Hanya yang menjadi nilai tambah adalah UMKM ini berbasis disabilitas, banyak karyawan disabilitas yang merasakan dampak positifnya sebagai karyawan dari Silvia Piobag Handycraft.

Berdasarkan beberapa studi terdahulu yang sedikit banyak telah memberikan gambaran pengembangan UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas, belum banyak yang mengambil posisi penelitian dengan melibatkan hubungan pemerintah dengan kelompok disabilitas. Melainkan cara dari pemerintah tersendiri maupun dari swasta tersendiri atau kelompok masyarakat tersendiri untuk pengembangan UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. Adapun yang telah melihat peranan pemerintah, swasta, dan masyarakat namun hasil dari studinya memberikan gambaran umum yang belum diulas secara spesifik.

Posisi penelitian ini hendak mendalami dan memodelkan dari sudut pandang ilmu pemerintahan, di mana melihat dari sisi pemerintah dan melihat dari disisi penyandang disabilitas yang bergerak dalam bidang UMKM, khususnya berada di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Interaksi antara pemerintah dengan penyandang disabilitas maupun nantinya melibatkan kelompok kepentingan (kelembagaan, swasta, kelompok masyarakat) akan menjadi titik fokus studi yang pada akhirnya bertujuan untuk menggambarkan pengembangan UMKM berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

## **C. Fokus Penelitian**

Studi ini berfokus pada pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian difokuskan pada interaksi dan relasi yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok UMKM disabilitas, maupun interaksi dan relasi antara pemerintah dengan institusi lain dalam pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

## **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diawal, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: ‘Bagaimana *Collaborative Governance* pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah?’

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Studi ini bertujuan untuk:

- a. Menganalisis peran Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan *collaborative governance* pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas.
- b. Mendeskripsikan bentuk interaksi, pola kerja sama, dan relasi kolaborasi antara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, dan pihak terkait lainnya dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

- c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Akademis

Studi ini diharapkan dapat memperkaya diskursus Ilmu Pemerintahan dalam perspektif *Governance* Mahzab Timoho (5G) yang dikembangkan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa ‘APMD’ Yogyakarta.

### b. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo, antara lain:

#### 1) Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo

Penelitian ini dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program pengembangan UMKM disabilitas yang lebih inklusif, adaptif, dan berbasis potensi lokal penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan untuk memperkuat koordinasi antar instansi serta memastikan keberlanjutan program pemberdayaan ekonomi kelompok disabilitas.

#### 2) Sektor Swasta dan Mitra Usaha

Temuan penelitian ini membuka peluang bagi pihak swasta untuk berkolaborasi melalui kemitraan usaha, pendampingan teknis, fasilitasi pemasaran, serta

penyediaan akses pembiayaan yang berpihak pada penyandang disabilitas sebagai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.

### 3) Organisasi Masyarakat Sipil

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merancang kegiatan pemberdayaan yang lebih tepat sasaran, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan nyata penyandang disabilitas dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi.

### 4) UMKM Disabilitas

Bagi pelaku UMKM disabilitas, penelitian ini memberikan gambaran mengenai kondisi, tantangan, dan peluang pengembangan usaha yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat kapasitas individu maupun kelompok, serta memperluas jejaring kerja sama dengan berbagai pihak.

## **F. Kerangka Konsep**

### **1. Dasar Hukum dan Kebijakan Tata Kelola UMKM**

#### **Disabilitas**

Berbicara Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia saat ini tidak bisa terlepas dari yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan sebuah inisiasi regulasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk meningkatkan iklim investasi dan proses izin berusaha. Berkaitan dengan UMKM dalam UU ini mengatur 5 (lima) hal seperti, kemudahan izin usaha, akses pembiayaan, ketenagakerjaan, kemitraan dan pengembangan UMKM, dan infrastruktur logistik.

Menghadirkan kerangka konseptual UMKM berbasis disabilitas tentunya kita dapat menggunakan dua dasar kuat yakni UU Disabilitas dan UU Ciptakerja. UU Disabilitas yang akan berbicara secara personal penyandang disabilitas terkait dengan hak-hak nya, sedangkan UU Cipta Kerja berbicara dalam perspektif UMKM yang mau tidak mau pelaku UMKM disabilitas juga wajib patuh terhadap ketentuan yang ada dalam UU Cipta kerja.

Dalam UU Disabilitas dan UU Cipta Kerja, terdapat beberapa aspek penting yang mendukung potensi UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. UU Disabilitas mengatur hak-hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses yang setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. Setidaknya ada beberapa aspek yang dapat dijelaskan dalam UU Disabilitas maupun UU Cipta Kerja berkaitan dengan potensi UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 1. 3 Komparasi Aspek UMKM Disabilitas dari UU Disabilitas dan UU Cipta Kerja**

Aspek	UU Disabilitas	UU Cipta Kerja
Kemudahan Perizinan/ Kerja	Pasal 53: Pemerintah maupun perusahaan swasta wajib memperkerjakan penyandang disabilitas	Pasal 87: Pasal 12 menyederhanakan tata cara dan jenis Perizinan Berusaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu; dan membebaskan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya Perizinan Berusaha bagi Usaha Kecil.  Pasal 87: Pasal 91 Dalam rangka kemudahan Perizinan Berusaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pembinaan . dan pendaftaran bagi Usaha Mikro dan Kecil berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat
Akses pembiayaan	Pasal 57: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha, dan/atau	Pasal 77: Penanaman Modal pasal 13 Pelindungan dan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah melalui akses

	<p>koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas</p>	<p>pembiayaan</p> <p>Pasal 87: Pasal 21 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyediakan pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Kecil</p>
Kemitraan dan Pengembangan	<p>Pasal 5 : Penyandang Disabilitas memiliki hak:pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi.</p> <p>Pasal 11: Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang Disabilitas; memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri</p>	<p>Pasal 87: Pasal 90 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memfasilitasi, mendukung, dan menstimulasi kegiatan kemitraan Usaha Menengah dan Usaha Besar dengan Koperasi, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan level usaha. Kemitraan sebagaimana dimaksud mencakup proses alih keterampilan di bidang produksi dan pengolahan, pemasaran, permodalan, sumber daya manusia, dan teknologi.</p>

Pelatihan dan Pendidikan	Pasal 45: Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan	Pasal 98 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memberikan pelatihan dan pendampingan
--------------------------	---	---

	kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.	pemanfaataan sistem/aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan yang memberi kemudahan bagi Usaha Mikro dan Kecil.
Perlindungan dan Non diskriminasi	Pasal 91 : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial	Pasal 96 Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum bagi Usaha Mikro dan Kecil.

Tabel 1.3 memberikan gambaran sederhana yang dilakukan dalam rangka melakukan pembedahan sekilas terkait UMKM Disabilitas berbasis UU Cipta Kerja dan UU Disabilitas. UU Cipta Kerja, dengan fokus pada penyederhanaan perizinan, akses pembiayaan, dan pengembangan kapasitas, memberikan kemudahan yang signifikan bagi semua UMKM, termasuk yang dijalankan oleh penyandang disabilitas. Kemudahan perizinan berbasis risiko merupakan langkah konkret yang mempermudah penyandang disabilitas dalam memulai dan mengembangkan usaha mereka.

UU Disabilitas secara spesifik memberikan perlindungan dan hak-hak khusus bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang ekonomi dan usaha. Dengan memastikan akses ke permodalan, pelatihan, dan pendidikan. UU Disabilitas menjamin bahwa

penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, jaminan non-diskriminasi dalam kesempatan kerja dan usaha memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi penyandang disabilitas terhadap perlakuan tidak adil.

Secara keseluruhan, sinergi antara kedua undang-undang ini diharapkan mampu menciptakan lingkungan usaha yang lebih inklusif dan suportif bagi UMKM disabilitas. Pemerintah diharapkan terus mendukung implementasi kebijakan ini melalui program dan inisiatif yang konkret, sehingga penyandang disabilitas dapat berkontribusi secara signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan adanya dukungan yang komprehensif, UMKM disabilitas dapat tumbuh dan berkembang, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat serta memperkuat ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

## **2. Pengembangan UMKM Disabilitas**

Pengembangan UMKM disabilitas merupakan sebuah proses strategis yang mencakup upaya pendidikan, pelatihan, pendampingan, dan penciptaan ekosistem usaha yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Pengembangan dimaknai sebagai proses, cara, atau perbuatan untuk menjadikan sesuatu menjadi lebih sempurna atau lebih produktif (Wahyuningsih et al., 2023).

Dalam konteks ini, pengembangan diarahkan untuk meningkatkan kemampuan, kapasitas, dan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas melalui kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sukmana, Akhmad Nulhaqim, dan Cipta Apsari (2023) menyatakan bahwa pengembangan sumber daya manusia memiliki peran penting dalam mendukung produktivitas kerja dan pencapaian tujuan organisasi.

Salah satu langkah penting dalam pengembangan tersebut adalah pendidikan dan pelatihan yang diberikan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan disabilitas dapat dipahami sebagai proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, serta akses terhadap berbagai sumber daya yang dibutuhkan penyandang disabilitas untuk dapat mandiri dan produktif secara ekonomi.

Teori *trait and factor* (Suryati dan Utami Fitri, 2023) menjelaskan bahwa individu menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan tentang kecakapan yang dimiliki sebagai dasar pengembangan potensi. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengembangan UMKM disabilitas sebaiknya tidak hanya bersifat general, tetapi juga memperhatikan karakteristik personal, bakat, keterampilan, dan preferensi masing-masing penyandang disabilitas.

Berbagai studi menunjukkan bahwa model pengembangan usaha disabilitas umumnya terbagi dalam dua kategori utama. Pertama, pengembangan internal yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu melalui pelatihan keterampilan kreatif, manajemen bisnis, literasi digital, dan inovasi produk.

Studi Rinaldi (2023) menegaskan pentingnya pengembangan kompetensi agar UMKM disabilitas mampu bersaing di pasar. Wahyuningsih et al. (2023) menunjukan bahwa pelatihan menjahit bagi penyandang disabilitas mampu menghasilkan produk yang berkualitas sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi. Demikian pula Atika (2024) menggambarkan bahwa pelatihan dan pendampingan yang bertahap dapat mendukung munculnya inovasi dalam usaha disabilitas.

Kedua, pengembangan eksternal yang melibatkan dukungan dari pihak lain seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Bentuk pengembangan ini mencakup pendampingan usaha, fasilitasi legalitas, penyediaan modal usaha, penguatan jaringan pemasaran, dan penyeediaan infrastruktur penunjang. Studi Sawitri et al. (2021) memperlihatkan pendampingan oleh kelompok masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang bergerak di bidang percetakan, meskipun masih menghadapi tantangan akses permodalan.

Sholikhan, Fajrie, dan Purbasari (2023) menekankan pengembangan website ramah disabilitas yang memungkinkan akses pelayanan sosial dan pilihan pengembangan diri secara digital. Dalam konteks yang lebih luas, literatur mengenai wirausaha penyandang disabilitas masih relatif terbatas (Bhogal-Nair et al., 2024).

Penelitian Bahry et al. (2023) menegaskan bahwa penyandang bahwa penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan diskriminasi, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya peluang akses pelatihan maupun pasar. Karena itu, kewirausahaan

disabilitas kerap dianggap sebagai jalan alternatif memperoleh penghasilan ketika akses kerja formal tertutup (Norstedt & Germundsson, 2023).

Pendekatan kapabilitas yang diangkat oleh Bhogal-Nair et al. (2024) menunjukkan bahwa pengembangan kapabilitas individu disabilitas dapat dicapai melalui kebijakan publik yang adil dan pendidikan yang memberdayakan. Dalam praktiknya, pengembangan ini menekankan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil untuk memastikan penyandang disabilitas tidak hanya menjadi penerima manfaat pasif, tetapi juga aktif yang memiliki kapasitas menentukan arah usahanya.

Selaras dengan itu, pendekatan disabilitas sebagai aset (Mauksch & Dey, 2024) menjadi perspektif baru yang melihat keterbatasan bukan hanya sebagai hambatan, melainkan potensi dan peluang pengembangan usaha. Pendekatan ini mencakup lima faktor utama: Kreativitas unik penyandang disabilitas, ketahanan personal, penciptaan pasar khusus yang lebih inklusif, dukungan modal dan jaringan usaha, serta kebijakan pemerintah yang mendukung.

### **3. Pemberdayaan Sosial Penyandang Disabilitas**

Pemberdayaan dalam kerangka penyandang disabilitas sejatinya sudah memiliki landasan yuridis dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Konsepsi pemberdayaan dalam undang-undang ini bukan hanya dimaknai sebagai penguatan kapasitas ekonomi, tetapi lebih luas, yakni upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas melalui penumbuhan iklim sosial, penghormatan hak, dan pengembangan potensi diri sehingga mampu tumbuh dan

berkembang menjadi individu atau kelompok yang tangguh, mandiri, serta memiliki posisi setara dalam masyarakat.

Pemberdayaan sosial merupakan hak kesejahteraan sosial yang dimiliki dan melekat pada diri penyandang disabilitas di Indonesia. Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang tidak hanya berbentuk bantuan ekonomi, tetapi juga mencakup penguatan motivasi, akses layanan sosial, pemenuhan hak, dan pemberian perlindungan dari diskriminasi.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan hak kesejahteraan sosial yang dibingkai dalam pemberdayaan sosial, antara lain: a) peningkatan kemauan dan kemampuan; b) penggalian potensi dan sumber daya; c) penggalian nilai dasar; d) pemberian akses; dan e) pemberian bantuan usaha. Adapun pemberdayaan sosial tersebut dapat diberikan dalam bentuk: a) diagnosis dan pemberian motivasi; b) pelatihan dan pendampingan; c) pemberian stimulan; d) peningkatan akses pemasaran hasil usaha; e) penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan f) bimbingan lanjut.

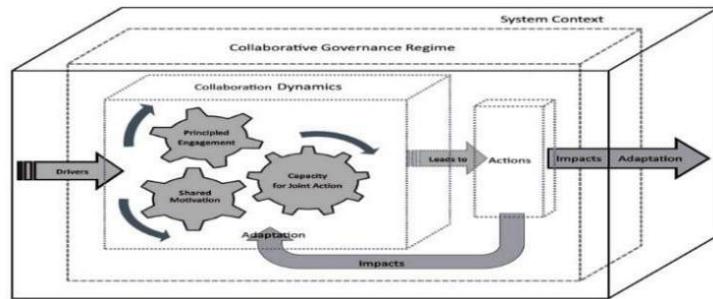
Dengan demikian, konsep pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dalam penelitian ini lebih menekankan pada penguatan peran sosial, pemenuhan hak, dan terciptanya kemandirian sebagai warga negara yang memiliki kesetaraan, sementara pengembangan UMKM disabilitas lebih berfokus pada peningkatan kapasitas usaha dan daya saing ekonomi. Konsep pemberdayaan sosial ini menjadi dasar penting bagi perilaku pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam mendukung kemandirian

penyandang disabilitas melalui berbagai kebijakan dan program.

#### **4. *Collaborative Governance***

*Collaborative Governance* banyak diartikan sebagai keterlibatan pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang berkepentingan dari lembaga pemerintah maupun di luar pemerintah dalam hal kebijakan, program, atau operasional dari kegiatan dikarenakan ada saling ketergantungan dari sumber daya yang digunakan (Dwi Phitaloka and Sri Wibawani, 2023). Konsep *Collaborative Governance* merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang sulit diselesaikan karena permasalahan yang terjadi dalam *Collaborative Governance* akan menjadi permasalahan bersama (Rahmadevi and Hertati, 2024).

Kolaborasi yang terbentuk diantara para pemangku kepentingan memungkinkan terjadinya pola komunikasi yang intensif dan diskusi yang produktif guna mencapai keuntungan bersama. Para pemangku kepentingan ini meliputi individu, kelompok, maupun kelembagaan yang saling berpengaruh terhadap kepentingan yang sama (Hertati and Arif, 2022). *Collaborative governance* telah terbukti sebagai pendekatan yang efektif dalam menangani masalah-masalah kompleks yang melebihi kemampuan dari kapasitas satu organisasi sebagai sektor Tunggal (Tommy, 2023).



Gambar 2. Model Collaborative Governance Regime (CGR)  
 (Sumber: Emerson dan Nabatchi dikutip (Rahmadevi and Hertati, 2024))

Model *Collaborative Governance Regime* (CGR) menurut Emerson dan Nabatchi dikutip dari (Rahmadevi and Hertati, 2024) memiliki 3 variabel, yaitu:

a) Dinamika Kolaborasi

Faktor yang mempengaruhi dinamika kolaborasi ini yakni penggerakan motivasi bersama (*shared motivation*), prinsip bersama (*principled engagement*), dan kapasitas untuk bekerja sama (*capacity for joint action*).

b) Tindakan Dalam Kolaborasi

Variabel ini menentukan keberhasilan karena merupakan tahapan utama dalam kolaborasi yang menggabungkan beberapa sektor untuk bekerja sama mencapai tujuan

c) Dampak dan Adaptasi Hasil Tindakan Dinamika Kolaborasi Berdasarkan kedua variabel di atas maka kolaborasi

mendapatkan hasil yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif dalam keberlangsungan kolaborasi ini. Sehingga para stakeholder yang terlibat harus dapat beradaptasi menyesuaikan dampak yang terjadi.

Konseptualiasi *Collaborative Governance* dalam studi ini menggunakan model *Collaborative Governance Regime* (CGR) sebagaimana tiga variabel yang dijabarkan di atas. Konsep ini digunakan dalam melihat interaksi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan kelompok UMKM Penyandang Disabilitas maupun dengan kelompok-kelompok kepentingan yang lain sesuai dengan konteks di lapangan.

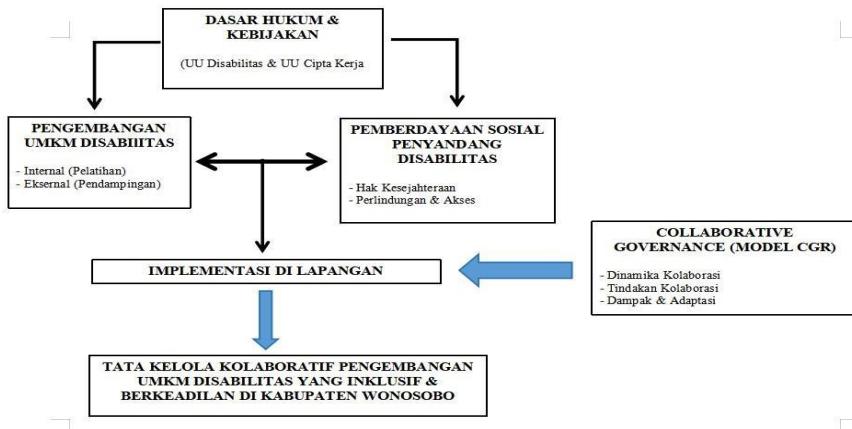
Konsep ini digunakan mengingat pula ‘*government without governance*’ atau pemerintah tanpa interaksi dengan pihak luar akan menjadi otokratik-birokratik seperti dunia perkantoran, sedangkan ‘*governance without government*’, interaksi pihak luar tanpa pemerintah akan membuat pemerintah seperti dunia pasar (Yunanto, 2021).

Studi ini berfokus pada pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Penelitian difokuskan pada interaksi dan relasi yang terjadi antara pemerintah dengan kelompok UMKM disabilitas, maupun interaksi dan relasi antara pemerintah dengan institusi lain dalam pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

## G. Kerangka Berpikir

Kerangka konseptual dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah dan batasan berpikir secara sistematis mengenai fokus kajian yang dilakukan. Kerangka ini menjelaskan bagaimana kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar dalam merumuskan upaya pengembangan dan pemberdayaan disabilitas, khususnya di bidang UMKM. Selain itu, kerangka ini juga menunjukkan bagaimana interaksi antar aktor dan dinamika pelaksanaan kebijakan dapat dipahami melalui perspektif *Collaborative Governance Regime*.

Untuk memudahkan dalam melihat kerangka konseptual penelitian ini secara menyeluruh, berikut ditampilkan bagan yang menggambarkan hubungan antara dasar hukum, konsepsi pengembangan dan pemberdayaan, instrumen analisis *Collaborative Governance Regime* (CGR), serta hasil akhir berupa tata kelola kolaboratif pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo.



Gambar 3 Kerangka Berpikir Penelitian

Bagan di atas secara garis besar menunjukkan alur konseptual penelitian yang dimulai dari dasar hukum dan kebijakan, yaitu Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Kedua regulasi ini menjadi landasan normatif yang memberikan kerangka hak, kewajiban, dan arah kebijakan dalam upaya pemberdayaan ekonomi dan sosial penyandang disabilitas.

Dari dasar hukum tersebut, kemudian lahir dua konsepsi utama yang menjadi fokus kajian, yaitu pengembangan UMKM disabilitas dan pemberdayaan sosial penyandang disabilitas. Konsepsi pengembangan UMKM disabilitas mencakup upaya penguatan kapasitas secara internal melalui pelatihan keterampilan dan peningkatan kompetensi usaha, serta upaya eksternal melalui pendampingan, fasilitasi akses pembiayaan, dan penguatan jejaring pemasaran.

Sementara itu, konsepsi pemberdayaan sosial lebih menekankan pemenuhan hak kesejahteraan, perlindungan, akses peluang ekonomi, dan penguatan kemandirian individu maupun kelompok disabilitas. Kedua konsepsi tersebut di implementasikan dalam berbagai kebijakan dan program yang dilaksanakan di lapangan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan berbagai pihak terkait.

Implementasi inilah yang menjadi objek pengamatan dalam penelitian ini. Untuk memahami bagaimana proses pelaksanaan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan tersebut berjalan secara kolaboratif, penelitian menggunakan *Collaborative Governance Regime* (CGR) sebagai perspektif analisis. Model CGR

dipakai untuk melihat dinamika kerja sama antar aktor, tindakan kolaborasi yang terbentuk, serta dampak dan adaptasi yang terjadi selama proses implementasi berlangsung.

Hasil akhir dari alur kerangka ini adalah tercipta tata kelola kolaboratif pengembangan UMKM disabilitas yang inklusif dan berkeadilan di Kabupaten Wonosobo. Tata kelola kolaboratif dimaknai sebagai bentuk sinergi nyata antar pihak yang terlibat dalam upaya pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, sehingga dapat mendukung tercapainya kemandirian, kesejahteraan, dan pengurangan kesenjangan sosial secara lebih berkelanjutan.

## **BAB II**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Studi ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran tentang pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Metode penelitian kualitatif dipilih karena metode penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan makna dari suatu fenomena dalam konteks alamiah-nya (Niam et al., 2024).

Peneliti dengan metode deskriptif kualitatif berusaha memperoleh gambaran utuh terkait situasi dan kondisi untuk mendapatkan data secara faktual yang berkaitan dengan pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali informasi mendalam mengenai tantangan yang dihadapi oleh pelaku UMKM disabilitas serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha mereka.

Data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan wawasan mengenai peran pemerintah, organisasi, dan pihak lain dalam mendukung pengembangan UMKM disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga berupaya memberikan pemahaman terkait strategi-strategi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan keberdayaan ekonomi dan sosial pelaku UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

## **B. Subjek Penelitian**

Subjek dalam penelitian ini adalah informan atau partisipan. Subjek penelitian disebut partisipan, karena mereka benar-benar aktif memberikan informasi kepada peneliti (Fiantika *et al.*, 2022). Subjek dalam penelitian ini adalah para informan yang nantinya ditentukan untuk bisa memenuhi jawaban terkait dengan pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

## **C. Objek Penelitian**

Objek dalam penelitian ini adalah *Collaborative Governance* dalam pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Objek ini dipilih karena menggambarkan proses interaksi kolaboratif yang melibatkan berbagai aktor, seperti Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, serta komunitas masyarakat dalam mengembangkan UMKM penyandang disabilitas berdasarkan potensi lokal yang dimiliki.

Menjadikan fenomena tata kelola kolaboratif sebagai objek penelitian, maka peneliti dapat mengidentifikasi dinamika kolaborasi, interaksi antaraktor, serta faktor pendorong maupun penghambat dalam praktik *Collaborative Governance* di Kabupaten Wonosobo

## **D. Lokasi Penelitian**

Studi ini memilih lokasi penelitian di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Adapun pemilihan lokasi ini didasarkan pada kondisi eksisting yang telah dilakukan observasi sebelumnya oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Pemilihan pada lokasi ini juga telah dipertimbangkan secara matang oleh peneliti sebelum melakukan penelitian. Peneliti telah

mengetahui gambaran awal untuk diselidiki lebih dalam mengenai pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Lokasi penelitian ini berada di Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo, Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disdagkopukm) Kabupaten Wonosobo, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Wonosobo, Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW), Perhimpunan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Wonosobo, Pendopo Pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait dengan CSR Bank Wonosobo, Redaksi Wonosobo Satu Menit, dan Difabel Mart.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan sangat penting dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang benar akan menghasilkan data yang memiliki kredibilitas tinggi, dan sebaliknya. Oleh karena itu, tahap ini tidak boleh salah dan harus dilakukan dengan cermat sesuai prosedur dan ciri-ciri penelitian kualitatif (Rokhamah et al., 2024).

Studi ini memilih menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, maka data-data yang dibutuhkan berkaitan dengan pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo yang dikumpulkan memberikan ciri dan karakter terkait dengan topik penelitian tersebut. Data kualitatif dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi (Niam et al., 2024).

### **1. Observasi**

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan yang dilakukan secara langsung di lapangan (Pratiwi et al., 2024). Observasi yang dilakukan dalam

studi ini adalah melakukan pengamatan secara langsung yang terjadi di lapangan berkaitan dengan pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Dalam penelitian ini, observasi dilakukan secara mendalam untuk melihat secara langsung bagaimana praktik kolaborasi antaraktor dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo terjadi. Observasi secara khusus diarahkan pada aspek interaksi antaraktor, bentuk-bentuk koordinasi dan kerja sama yang terjadi antara Pemerintah Daerah, organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, serta komunitas masyarakat dalam menjalankan program-program pengembangan UMKM berbasis potensi disabilitas. Observasi tidak hanya berhenti pada identifikasi kondisi eksisting UMKM atau program pemerintah semata, tetapi secara eksplisit berfokus pada bagaimana proses kolaborasi berlangsung, bagaimana komunikasi antar pihak terbangun, serta bagaimana aktor- aktor tersebut bersama-sama mengatasi hambatan yang dihadapi dalam praktik kolaborasi di lapangan.

## **2. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada informan terkait topik penelitian secara langsung. Dengan kemajuan teknologi, kini wawancara dapat dilakukan lewat telepon maupun *video call*. Wawancara berguna ketika peneliti ingin mengetahui pengalaman atau pendapat informan mengenai sesuatu secara mendalam. Wawancara juga dapat dipakai untuk membuktikan informasi atau keterangan yang telah

diperoleh sebelumnya (Fiantika et al., 2022).

Studi ini memilih wawancara tatap muka secara langsung dengan narasumber atau informan penelitian. Peneliti melakukan tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, dengan fokus utama menggali secara mendalam bagaimana proses *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara secara eksplisit diarahkan pada aspek interaksi dan koordinasi antaraktor, pola komunikasi dan kerja sama antara Pemerintah Daerah, sektor swasta, organisasi penyandang disabilitas, serta komunitas masyarakat dalam mengembangkan UMKM disabilitas berbasis potensi lokal yang ada.

Peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Dinas dan Kepala Bidang Sosial dari Dinas Sosial Pembangunan Masyarakat Desa, Kepala Bidang Koperasi dan UKM serta Pendamping UMKM dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo, Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Perhimpunan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), dan Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW), Pimpinan Redaksi Wonosobo Satu Menit, Penanggung Jawab CSR Bank Wonosobo, Pelaku UMKM disabilitas, dan Masyarakat pengunjung pembeli di Difabel Mart. Secara mendalam dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 1 Waktu dan Pelaksanaan Wawancara

No	Informan	Waktu & Tempat	Tema
1	Ketua Ikatan Disabilitas (IDW)	Selasa, 17 September 2024 - Kantin Kantor Dikpora Kabupaten Wonosobo	Peran IDW dalam pengembangan UMKM disabilitas
2	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Wonosobo	Rabu, 18 September 2024 - Sekretariat IDW atau Kediaman Ketua HWDI	Pemberdayaan ekonomi perempuan disabilitas
3	Ketua Perhimpunan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Wonosobo	Kamis, 19 September 2024 - Kediaman Ketua PERTUNI	Tantangan UMKM bagi penyandang disabilitas netra
4	Masyarakat dan Pelaku UMKM disabilitas	Minggu, 22 September 2024 - Difabel Mart, Taman Rekreasi Kali Anget	Persepsi Masyarakat terhadap produk disabilitas dan kendala pemasaran

5	Kepala Bidang Sosial dari Dinas Sosial dan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD)	Senin, 23 September 2024 - Area Pendopo Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Kebijakan sosial bagi pelaku UMKM disabilitas
6	Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian, Perdaganganan, dan UKM	Senin, 23 September 2024 - Ruang Kabid Disdagkop UKM Kabupaten Wonosobo	Program pengembangan UMKM disabilitas oleh Disdagkop UKM
7	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo	Rabu, 25 September 2024 - Pendopo Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Dukungan Dinas Sosial terhadap UMKM disabilitas
8	Pendamping UMKM	Kamis, 26 September 2024 - Kantor Disdagkop UKM Kabupaten	Pendampingan bagi pelaku UMKM disabilitas
9	Bank Wonosobo	Kamis, 26 September - Pendopo Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Peran CSR dalam pengembangan UMKM disabilitas

10	Pimpinan Redaksi Wonosobo Satu Menit	Minggu, 29 September 2024 - Kedai Pinggir Kali	Peran media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap UMKM disabilitas
----	--------------------------------------	--	---

Sumber : Data Primer di olah 2024

Wawancara diawali dengan pertemuan bersama Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) pada Selasa, 17 September 2024, di Kantin Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Wonosobo. Pertemuan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran awal mengenai kondisi UMKM disabilitas serta peran IDW dalam mendukung pelaku usaha disabilitas.

Rabu, 18 September 2024, peneliti bertemu dengan Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Wonosobo di Sekretariat IDW atau di kediaman ketua HWDI. Dalam kesempatan ini, peneliti menggali informasi terkait peran HWDI dalam pemberdayaan perempuan disabilitas, khususnya dalam bidang ekonomi. Kemudian, pada Kamis, 19 September 2024, peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Perhimpunan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI), yang juga merupakan pengurus IDW, di rumahnya. Wawancara ini berfokus pada tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dari kalangan penyandang disabilitas netra serta dukungan yang mereka butuhkan.

Minggu, 22 September 2024, peneliti berkesempatan mengunjungi Difabel Mart di Taman Rekreasi Kali Anget. Selain membeli produk UMKM disabilitas, peneliti juga melakukan interaksi dengan pengunjung dan melakukan tanya jawab mengenai kesan mereka terhadap produk disabilitas serta keberadaan Difabel Mart. Di lokasi yang sama, peneliti juga mewawancara penjaga Difabel Mart, yang sekaligus merupakan pelaku UMKM, untuk mendapatkan wawasan lebih dalam mengenai tantangan dan peluang pemasaran produk disabilitas.

Peneliti kemudian melanjutkan pertemuan dengan berbagai instansi pemerintah. Pada Senin, 23 September 2024, peneliti bertemu dengan Kepala Bidang Sosial dari Dinas Sosial dan Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) beserta staffnya di taman samping Pendopo Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Pada hari yang sama, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop UKM) Kabupaten Wonosobo di ruang kerjanya. Pembahasan dalam pertemuan ini berfokus pada kebijakan serta program pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan UMKM disabilitas.

Rabu, 25 September 2024, peneliti bertemu dengan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo di Pendopo Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mendiskusikan peran Dinas Sosial dalam pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Sementara itu, pada Kamis, 26 September 2024, peneliti bertemu dengan Pendamping UMKM di Kantor Disdagkop UKM Kabupaten Wonosobo guna membahas strategi pendampingan yang telah

dilakukan serta tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan UMKM disabilitas.

Kamis, 26 September 2024, peneliti turut menghadiri acara penerimaan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR) dari Bank Wonosobo bagi penyandang disabilitas dan anak yatim. Acara ini diselenggarakan di Pendopo Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo. Dalam kesempatan ini, peneliti juga bertemu dengan Pimpinan Redaksi Wonosobo Satu Menit, sebuah media yang sering meliput isu disabilitas. Setelah acara selesai, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa peserta penyandang disabilitas yang mayoritas pelaku UMKM, serta dengan Penanggung Jawab CSR dari Bank Wonosobo untuk memahami sejauh mana peran CSR dalam mendukung UMKM disabilitas.

Minggu, 29 September 2024, peneliti kembali bertemu dengan tim Wonosobo Satu Menit untuk mendiskusikan peran media dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai produk-produk UMKM disabilitas serta mendorong kebijakan yang lebih inklusif bagi pelaku usaha disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

Serangkaian pertemuan ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo, peran berbagai pihak dalam mendukung perkembangannya, serta tantangan yang mudah dihadapi oleh para pelaku usaha disabilitas dalam mengembangkan usaha yang mereka geluti.

### **3. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis seperti arsip, termasuk juga buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Jadi dokumen dapat dijadikan sebagai sebuah catatan aktivitas, kegiatan maupun peristiwa yang telah berlalu yang di catatkan, dikumpulkan menjadi sebuah arsip. Dokumen yang dimaksud dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Fiantika et al., 2022).

Pengambilan data melalui dokumentasi dalam studi ini, peneliti akan mencatat, merekam baik berbentuk audio, foto, maupun video menggunakan alat perekam terkait dengan kondisi nyata dari topik penelitian, yakni pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

Peneliti menganggali data dengan mencari berbagai berita berita di media lokal maupun nasional terkait dengan UMKM Disabilitas Kabupaten Wonosobo. Peneliti juga menggali data melalui web Pemerintah Kabupaten Wonosobo untuk mencari RPJMD dan lain sebagainya, Peneliti juga ada rekaman wawancara dengan informan, dan memfoto dan video saat melakukan observasi.

Tabel 2. 2 Dokumentasi

No	Keterangan	Sumber
1	Surat Keterangan Domisili Ikatan Disabilitas Wonosobo	Temuan Lapangan berbentuk File PDF tentang Profil Ikatan Disabilitas Wonosobo
2	Sekretariat IDW dan HWDI	Temuan Lapangan
3	Struktur Organisasi Ikatan Disabilitas Wonosobo	Temuan Lapangan berbentuk File PDF tentang Profil Ikatan Disabilitas Wonosobo
4	Daftar Nama Pengurus IDW	Temuan Lapangan berbentuk File PDF tentang Profil Ikatan Disabilitas Wonosobo
5	Jumlah Disabilitas di Kabupaten Wonosobo	Temuan Lapangan berbentuk File PDF tentang Paparan Pemenuhan Hak Disabilitas berjudul “Arah Kebijakan Pemkab Wonosobo Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo
6	Jumlah Disabilitas di Kabupaten Wonosobo	Temuan Lapangan File Microsoft Excel dari “Data PMKS Kabupaten Wonosobo

		2018” dari Pimpinan Redaksi Wonosobo Satu Menit
7	Data UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo	Temuan Lapangan berbentuk file Microsoft Excel dari Pendamping UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UKM Kabupaten Wonosobo
8	Laporan Keuangan Difabel Mart	Temuan Lapangan dari Ikatan Disabilitas Wonosobo berbentuk Microsoft Excel tentang Profil Difabel Mart
9	Pamflet Pembinaan Disabilitas di Kabupaten Wonosobo	Temuan Lapangan dari Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo
10	Dokumentasi Pelatihan yang dilakukan oleh Ikatan Disabilitas Wonosobo	Akun media sosial Instagram resmi dari Ikatan Disabilitas Wonosobo @wonosoboidw
11	Struktur Difabel Mart	Temuan Lapangan dari Ikatan Disabilitas Wonosobo berbentuk PDF tentang Profil Difabel Mart
12	Jumlah UMKM Disabilitas di Difabel Mart	Temuan Lapangan dari Ikatan Disabilitas Wonosobo berbentuk PDF tentang Profil Difabel Mart
13	Foto Produk Difabel Mart	Temuan Lapangan Foto Ponsel Peneliti
14	Dokumentasi Pelatihan Membatik untuk Disabilitas	<a href="https://www.masterplandesa.com/desa-wisata/merajut-kemandirian-penyandang-disabilitas-melalui-batik-ciprat-di-desa-wisata-maron/">https://www.masterplandesa.com/desa-wisata/merajut-kemandirian-penyandang-disabilitas-melalui-batik-ciprat-di-desa-wisata-maron/</a>
15	Dokumentasi Pelatihan / Sertifikat Memijat Tuna Netra oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo	Temuan Lapangan Foto Ponsel Peneliti
16	Pelatihan Kewirausahaan dari Kemensos melalui Dinas Sosial Kabupaten Wonosobo	<a href="https://mediacenter.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/5356">https://mediacenter.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/5356</a>

17	Platform Digital UMKM Wonosobo	<a href="https://www.wonosobozone.com/berita/46710552905/bantu-promosikan-produk-umkm-wonosobo-pemkab-luncurkan-platform-ayo-promo#google_vignette"><u>https://www.wonosobozone.com/berita/46710552905/bantu-promosikan-produk-umkm-wonosobo-pemkab-luncurkan-platform-ayo-promo#google_vignette</u></a>
18	Promosi Produk UMKM	Akun media sosial Instagram

	Disabilitas di Platform	resmi dari Pemkab Wonosobo @wonosobohebat
19	UMKM Disabilitas dalam Pameran Nasional dokumentasi ketika ada kunjungan dari Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ke Stand Difabel Mart di Wonosobo Festival UKM Expo 2024.	Akun media sosial Instagram resmi dari Ikatan Disabilitas Wonosobo @wonosoboidw
20	Dukungan Kebijakan Disabilitas di Kabupaten Wonosobo	Temuan Lapangan berbentuk File PDF tentang Paparan Pemenuhan Hak Disabilitas berjudul “Arah Kebijakan Pemkab Wonosobo Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas” oleh Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo
21	Penerimaan CsR Bank Wonosobo	Temuan Lapangan Foto Ponsel Peneliti
22	Transkip Wawancara Informan	Rekaman Wawancara dari Ponsel Peneliti

Peneliti menganggap sumber-sumber data di atas memberikan informasi yang relevan mengenai kondisi kebijakan, serta perkembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Data dari temuan lapangan, situs *web*, media sosial, maupun paparan digunakan untuk memahami regulasi dan dukungan pemerintah daerah terhadap pelaku usaha disabilitas, maupun gambaran mengenai dinamika di lapangan.

Dengan kombinasi data primer dari wawancara dan observasi serta data sekunder dari berbagai sumber, penelitian ini memberikan analisis yang komprehensif mengenai pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

## **F. Teknik Pemilihan Informan**

Pemilihan sampel yang tepat pada penelitian kualitatif memiliki peran yang sangat penting dalam proses penelitian. Pada penelitian kualitatif, Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *non-random sampling*, yaitu teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling* sebagai teknik utama dalam penentuan subjek penelitian (Rokhamah et al., 2024).

Teknik pemilihan informan dalam studi ini peneliti memilih menggunakan *purposive sampling*. Namun, tidak memungkiri terkait dengan kondisi yang terjadi di lapangan informan dapat tambah sesuai kebutuhan data penelitian. Informan dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh (*redundancy*). Peneliti merupakan *key instrument* dalam mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif (Rokhamah et al., 2024).

Pemilihan sampel bertujuan atau *purposeful sampling* merupakan suatu metode pemilihan sampel yang umum digunakan dalam penelitian kualitatif. Pemilihan ini didasarkan pada tujuan tertentu atau karakteristik tertentu yang di inginkan oleh peneliti untuk memahami lebih dalam fenomena yang diteliti. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti memiliki kontrol lebih besar

terhadap proses pemilihan sampel untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian (Niam et al., 2024).

Informan dalam metode kualitatif berkembang terus (*snowball*) secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan atau jenuh (*redundancy*). Peneliti merupakan *key instrument* dalam mengumpulkan data, peneliti harus terjun sendiri kelapangan secara aktif (Rokhamah et al., 2024). Adapun setelah melakukan terjun lapangan, informan penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 3 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Pelaku UMKM Disabilitas	5 Orang
2	Ketua Himpunan Wanita Disabilitas (HWDI) Kabupaten Wonosobo	1 Orang
3	Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW)	1 Orang
4	Ketua Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Wonosobo	1 Orang
5	Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo <ul style="list-style-type: none"> <li>Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo</li> <li>Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) Kabupaten Wonosobo</li> <li>Kepala Bidang Koperasi dan UMKM Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo</li> <li>Pendamping UMKM dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Wonosobo</li> </ul>	4 Orang

6	Partner/ Mitra <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penanggung Jawab CsR Bank Wonosobo</li> <li>• Pimpinan Redaksi Wonosobo Satu Menit</li> </ul>	2 Orang
7	Masyarakat (Pembeli/ Pelanggan dari UMKM disabilitas pada saat di Difabel Mart)	4 Orang

Sumber : Data Primer di Olah 2024

Berdasarkan tabel di atas pelaku UMKM Disabilitas berjumlah 5 orang pelaku UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo yang bersedia berbagi cerita terkait dengan usaha yang dimiliki kepada peneliti. Mereka ini terdaftar dalam data kelompok disabilitas. Keterkaitan dengan kelompok disabilitas ditentukan per kelompok 1 orang dipilih karena dianggap memiliki wawasan yang sangat berharga untuk kelompok UMKM disabilitas. Karena menjadi salah satu pelopornya dalam kelompok tersebut.

Informan dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dipilih Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) beserta Kepala Bidang Sosial untuk mengetahui akses pemenuhan hak ekonomi penyandang disabilitas, serta Kepala Bidang Koperasi dan UMKM dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disdagkopukm), untuk menggali kebijakan pengembangan UMKM disabilitas.

Informan dari sektor swasta dipilih dari CSR Bank Wonosobo karena keterlibatannya dalam pendampingan dan pemberian modal usaha. Sedangkan dari unsur masyarakat, dipilih informan media lokal yang sering meliput isu disabilitas serta perwakilan masyarakat yang menjadi konsumen atau pembeli produk UMKM disabilitas. Hal ini dilakukan untuk menggambarkan secara

komprehensif proses *collaborative governance* antar aktor dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

## **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasi data yang bersifat deskriptif. Analisis data kualitatif memiliki beberapa karakteristik yang meliputi: (1) deksriptif dan kontekstual, (2) subjektif dan interpretatif, (3) dan fleksibel (Niam et al., 2024). Analisis data dalam studi ini menggunakan analisis Milles dan Huberman yang dikutip oleh (Siti Syamsiah Renny Tounbama et al., 2021).

### **1. Pengumpulan Data**

Data penelitian kualitatif dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi atau bisa juga gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data dilakukan dalam jangka waktu beberapa hari hingga bulan, sehingga data yang diperoleh sangat banyak dan bervariasi. Dalam penelitian ini data dikumpulkan selama empat bulan jadwal penelitian. Data-data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah.

### **2. Reduksi Data**

.Dalam proses pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan, semakin lama dilakukan semakin banyak data yang akan didapatkan, serta bersifat lebih kompleks dan rumit. Oleh karena itu, segera diperlukan analisis data

melalui reduksi data. Reduksi data berarti merangkum, memilih dan memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan pola-nya. Dalam hal ini data-data yang berkaitan pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah dirangkum dan di pilah, serta membuang data yang tidak perlu.

Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Oleh karena itu, reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi.

### **3. Penyajian Data**

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penyajian data kualitatif, data diuraikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Data dalam penelitian ini nantinya akan berbentuk naratif dan ditambahkan tabel maupun gambar yang menunjukkan data dan temuan penelitian terkait dengan pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

#### **4. Penarikan Kesimpulan**

Langkah keempat dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa rumusan masalah dalam penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

### **H. Validasi Data**

Validasi data adalah proses penting dalam penelitian, hal ini digunakan supaya data dalam penelitian ini akurat dan dapat dipercaya. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam melakukan validasi data (Megheirkouni, and Moir, 2023).

#### **1. Uji Derajat Kepercayaan (*Credibility*)**

Tujuan dari uji kepercayaan adalah untuk memastikan hasil penelitian dapat dipercaya dan sesuai

realitas yang ada di lapangan atau mencerminkan realitas yang sebenarnya, salah satu cara untuk menguji dengan triangulasi data. Peneliti menggunakan teknik triangulasi data untuk memastikan bahwa informasi yang diperoleh benar-benar mencerminkan realitas di lapangan. Proses triangulasi data dilakukan dengan:

a) Triangulasi Data

Dilakukan dengan membandingkan informasi hasil wawancara antar berbagai informan yang memiliki latar belakang dan perspektif berbeda, seperti pelaku UMKM disabilitas, organisasi disabilitas (IDW dan HWDI), pejabat pemerintah dari Dinas Sosial PMD dan Disdagkop UKM Kabupaten Wonosobo, sektor swasta (mitra usaha), serta perwakilan masyarakat dan media lokal.

b) Triangulasi Sumber

Dilakukan dengan menggunakan beragam sumber informasi yang tidak hanya terbatas pada wawancara, tetapi juga melibatkan data sekunder seperti dokumentasi program, berita media lokal, laporan kegiatan, serta berbagai dokumen kebijakan yang relevan, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel dokumentasi.

c) Triangulasi Metode

Dilakukan dengan mengkombinasikan beberapa metode sekaligus dalam pengumpulan data, seperti wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi

langsung di lapangan (Difabel Mart atau tempat kegiatan UMKM disabilitas), serta studi dokumentasi. Penggunaan beberapa metode ini untuk memastikan bahwa hasil penelitian tidak bersandar pada satu metode saja.

d) Konfirmasi Ulang kepada Informan

Dilakukan dengan mengkonfirmasi hasil temuan penelitian kembali kepada informan penelitian agar temuan yang diperoleh benar-benar mencerminkan pengalaman nyata para informan. Proses ini bertujuan memvalidasi data yang diperoleh serta meminimalisir kesalahan interpretasi oleh peneliti.

Dengan menggabungkan berbagai bentuk triangulasi ini, peneliti memastikan bahwa temuan penelitian bersifat komprehensif, akurat, dan mampu menggambarkan realitas secara utuh sesuai dengan perspektif dari berbagai aktor yang terlibat dalam proses collaborative governance pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

## **2. Uji Keteralihan (*Transferability*)**

Uji keteralihan ini adalah hasil penelitian harus menyertakan deskripsi yang rinci tentang konteks penelitian. Salah satu cara untuk meningkatkan uji keteralihan ini dengan memberikan deskripsi mendalam terkait dengan konteks penelitian, informan penelitian, interaksi dalam penelitian. Agar hasil penelitian dapat diterapkan atau dipahami dalam konteks lain, peneliti memberikan deskripsi

mendalam tentang:

- a. Konteks penelitian, termasuk situasi ekonomi dan sosial pelaku UMKM disabilitas di Wonosobo.
- b. Karakteristik informan, seperti latar belakang usaha, tantangan yang dihadapi, serta dukungan yang diperoleh dari pemerintah maupun organisasi.
- c. Interaksi yang terjadi dalam penelitian, baik antara peneliti dan informan maupun antara informan dengan lingkungan (kondisi lapangan).

Dengan memberikan deskripsi yang rinci, penelitian ini memungkinkan pembaca atau peneliti lain memahami kondisi yang diteliti secara lebih jelas, sehingga mereka dapat mempertimbangkan relevansi temuan dalam konteks lain.

### **3. Uji Kebergantungan (*Dependability*)**

Uji kebergantungan menunjukkan pada kefokusan dan konsistensi terhadap hasil atau temuan penelitian. Cara yang dapat dilakukan dengan mencatat semua data penelitian untuk memungkinkan peneliti yang melakukan penelitian dalam konteks yang sama dapat melakukan peninjauan. Kemudian, temuan penelitian wajib dilakukan pengkritisan. Untuk memastikan bahwa penelitian ini konsisten dan dapat di replikasi dalam konteks yang sama, uji kebergantungan ini dilakukan melalui dokumentasi dan peninjauan ulang. Adapun peneliti melakukan langkah-langkah berikut:

- a. Mencatat seluruh data penelitian, baik dalam bentuk transkip wawancara, catatan observasi, serta dokumentasi foto dan video.
- b. Menyimpan rekaman wawancara dan dokumen lainnya sebagai bukti autentik dari informasi yang diperoleh.
- c. Melakukan pencatatan secara sistematis terhadap semua tahapan penelitian, mulai dari pengumpulan data, analisis, hingga penyusunan laporan.
- d. Memeriksa kembali hasil temuan, membandingkannya dengan hasil penelitian dalam *literature review*, diskusi dengan dosen pembimbing untuk mengurangi risiko bias interpretasi.

Langkah ini memastikan bahwa penelitian dapat diuji ulang oleh peneliti lain yang ingin melakukan studi dalam konteks serupa.

#### **4. Uji Kepastian (*Confirmability*)**

Uji kepastian dilakukan supaya hasil penelitian benar-benar merupakan hasil atau temuan penelitian yang bersumber dari data penelitian maupun informan penelitian dan bukan merupakan bias dari peneliti tersendiri. Salah satu cara untuk melakukan uji ini adalah dengan melibatkan peneliti independen untuk meninjau data dan melakukan interpretasi data.

Untuk memastikan bahwa hasil penelitian benar-benar berasal dari data yang dikumpulkan dan bukan bias subjektif dari peneliti, dilakukan langkah-langkah

berikut:

- a. Melibatkan peneliti independen untuk meninjau data dan hasil analisis guna memastikan objektivitas penelitian. Yang dimaksud peneliti independen dalam penelitian ini adalah dosen pembimbing selaku pembimbing atau akademisi yang ahli dalam bidang pemerintahan, kebijakan sosial, UMKM, dan pemerhati disabilitas yang dapat memberikan masukan terkait validitas data dan metodologi penelitian.
- b. Menyediakan akses ke rekaman wawancara, transkip, dan catatan penelitian bagi pihak yang ingin mengonfirmasi hasil penelitian.
- c. Menggunakan pendekatan reflektif, di mana peneliti secara kritis mengevaluasi kemungkinan adanya bias dalam interpretasi data. Melalui pendekatan ini, penelitian memastikan bahwa setiap temuan bersumber langsung dari data yang diperoleh dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

## BAB III

### KONTEKS SOSIAL DAN PROFIL AKTOR DALAM PENGEMBANGAN UMKM DISABILITAS DI KABUPATEN WONOSOBO

Bab ini menyajikan konteks empirik yang menjadi pijakan utama dalam memahami dinamika kolaborasi multipihak dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Dalam kerangka *Collaborative Governance*, konteks sosial dan keberadaan aktor-aktor yang terlibat menjadi unsur fundamental untuk membaca bagaimana interaksi, pola kerja sama, serta kolaborasi berlangsung dilapangan

Penjabaran pada bab ini mencakup lokasi dan karakteristik wilayah penelitian, identifikasi aktor kunci yang terlibat dalam kolaborasi, serta uraian atas bentuk-bentuk intervensi nyata seperti pendirian Difabel Mart. Bab ini tidak menyajikan data wawancara dalam bentuk kutipan literal, namun mengelaborasi hasil temuan lapangan secara naratif dan interpretatif. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran menyeluruh sebelum memasuki analisis mendalam dalam bab IV, yang menitikberatkan pada dimensi-dimensi *Collaborative Governance Regime*.

Dengan demikian, bab ini berfungsi sebagai jembatan antara rumusan teoritik dan kenyataan lapangan, yang akan memperkuat relevansi analisis teoritis dengan realitas sosial pengembangan UMKM disabilitas secara kolaboratif. Konteks-konteks ini menjadi penting sebagai dasar pijakan untuk memahami dinamika *principled*

*engagement, shared motivation, dan capacity for joint action* yang akan dibahas secara lebih mendalam dalam bab selanjutnya.

#### **A. Karakteristik Wilayah Penelitian: Kabupaten Wonosobo Sebagai Lokus Kolaborasi Inklusif**

Kabupaten Wonosobo terletak di wilayah dataran tinggi Jawa Tengah dengan karakteristik geografis dan sosial yang unik. Sebagai daerah yang dikelilingi oleh pengunungan dan hamparan lahan pertanian, Wonosobo dikenal dengan potensi sumber daya alamnya sekaligus dinamika sosial masyarakat yang majemuk. Dalam konteks pembangunan daerah, Wonosobo termasuk dalam kategori kabupaten yang aktif mendorong kebijakan inklusi sosial, terutama dalam sektor pemberdayaan ekonomi bagi kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas.

Secara administratif, Kabupaten Wonosobo terdiri dari 15 kecamatan dan 265 desa/ kelurahan dengan struktur pemerintahan daerah yang cukup responsif terhadap isu-isu keadilan sosial. Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan inklusivitas tercermin dalam keberadaan berbagai peraturan daerah yang mendukung perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Peraturan ini menjadi landasan penting dalam mendorong pendekatan kolaboratif lintas aktor dalam pembangunan, termasuk dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis disabilitas.

Kondisi sosial masyarakat Wonosobo juga turut menunjang terbentuknya ruang partisipatif dalam berbagai program pemberdayaan. Masyarakat secara umum menunjukkan solidaritas

yang tinggi terhadap kelompok difabel, yang dalam beberapa kasus didorong oleh nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal. Di sisi lain, tumbuhnya komunitas-komunitas penyandang disabilitas yang terorganisir secara baik, seperti Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW), menjadi salah satu indikator bahwa Wonosobo memiliki modal sosial yang kuat untuk membangun tata kelola kolaboratif yang inklusif.

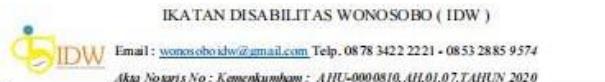
Sebagai lokus penelitian, Wonosobo menawarkan konfigurasi yang khas bagi kajian *Collaborative Governance*, karena selain memiliki kerangka regulasi yang relatif lengkap, daerah ini juga telah menjalankan sejumlah inisiatif konkret seperti pendirian Difabel Mart, pelibatan penyandang disabilitas dalam pelatihan kewirausahaan, serta kerja sama dengan sektor swasta dalam program CSR. Oleh karena itu, analisis kolaborasi dalam konteks pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo tidak hanya berbasis pada narasi normatif, tetapi juga dapat diamati melalui praktik-praktif nyata yang terjadi di lapangan.

## **B. Profil Aktor-Aktor Kunci**

### **1. Ikatan Disabilitas Wonosobo**

Ikatan Disabilitas Wonosobo disingkat IDW adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk mewadahi dan memperjuangkan hak-hak serta kepentingan masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Organisasi ini berdiri dengan tujuan utama untuk memberikan dukungan, advokasi, serta pemberdayaan kepada

individu-individu yang memiliki beragam jenis dan tingkat disabilitas yang ada di Kabupaten Wonosobo.



**SURAT KETERANGAN DOMISILI**

Nomor: 0103/ORG/IDW/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Organisasi : Ikatan Disabilitas Wonosobo  
Alamat : Perum. Agropeni Indah Blok C No.4, Kelurahan Kali Anget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah 56319  
Nomor Telepon : 0878 3422 2221 - 0853 2885 9574  
Email : [onusoboidw@gmail.com](mailto:wonusoboidw@gmail.com)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Organisasi kami, Mitra Disabilitas Wonosobo, merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang advokasi, pendidikan, dan kesejahteraan untuk kaum disabilitas di Wilayah Wonosobo.
2. Alamat kami, sebagaimana tercantum di atas, merupakan alamat resmi dan kantor operasional organisasi.
3. Kami telah beroperasi di alamat tersebut sejak tanggal [tanggal berdirinya organisasi] dan kami memiliki aktivitas yang terus-menerus di tempat tersebut.

Demikianlah surat keterangan domisili ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wonosobo, 18 Maret 2024

Ketua IDW  
  
Syaiful Rohman

Gambar 4 Surat Keterangan Domisili IDW

Surat Keterangan Domisili bernomor : 0103/ORG/IDW/2024 yang dibuat oleh Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) sebagaimana gambar di atas menerangkan bahwa IDW beralamat di Perum Agropeni Indah Blok C No. 4, Kelurahan Kali Anget, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten

Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, kode pos: 56319. Penulis juga telah berkunjung di lokasi tersebut dan sempat wawancara dengan sekretaris IDW yang juga merupakan ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Wonosobo, yang mana beliau tinggal di kantor itu.



Gambar 5 Sekretariat IDW



Gambar 6 Sekretaris IDW / Ketua HWDI

Visi dari IDW adalah menjadi pelopor dalam memperjuangkan kesetaraan dan kesejahteraan bagi masyarakat penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo, menuju sebuah masyarakat inklusif yang memuliakan hak asasi manusia. Visi IDW menyoroti komitmen penting untuk mempromosikan perubahan sosial yang berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo, di mana komunitas penyandang disabilitas tidak hanya diterima tetapi juga ditantang dan didukung.

Misi dari Ikatan Disabilitas Wonosobo ada 5 (lima) langkah untuk mewujudkan visi IDW. Melalui lima langkah atau misi ini, IDW dapat berupaya mendukung apa yang diharapkan dan diinginkan oleh para penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Tujuan utamanya supaya dapat mandiri secara mandiri yang akan berdampak pada kehidupan sosial para anggota. Adapun kelima misi tersebut dijabarkan sebagaimana berikut ini.

Pertama, Advokasi Hak-hak Disabilitas: Menjadi suara yang mengadvokasi kepentingan dan hak-hak masyarakat penyandang disabilitas di tingkat lokal dan nasional, memperjuangkan akses yang sama terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta layanan publik lainnya. Secara sederhana, IDW berperan aktif sebagai juru bicara, pembela, dan pionir perjuangan penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo supaya mendapatkan hak-hak yang sama dan tidak mengalami diskriminasi.

Kedua, Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas: Memberikan pembekalan, pelatihan, dan dukungan kepada individu-individu penyandang disabilitas untuk meningkatkan kemandirian, keterampilan, dan kepercayaan diri mereka sehingga dapat lebih mandiri dalam menjalani kehidupan sehari- hari. Melalui langkah ini, IDW menjadi fasilitator untuk para penyandang disabilitas untuk dapat mandiri, percaya dengan apa yang dimiliki, dan tidak bergantung kepada orang lain.

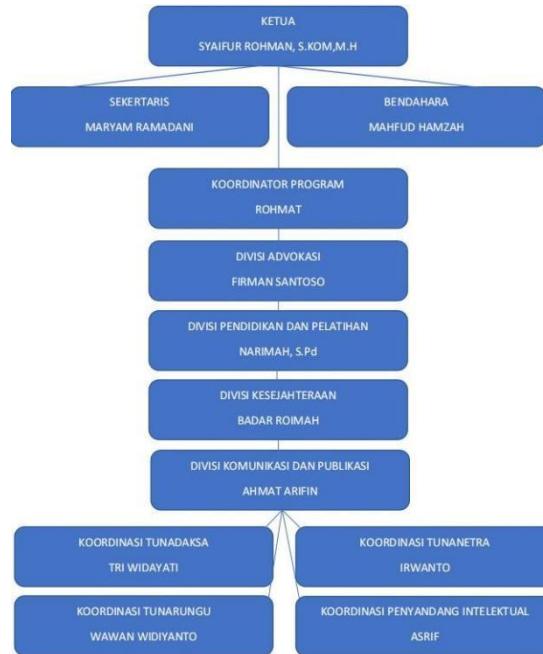
Ketiga, Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat: Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya inklusi dan mengurangi stigma terhadap penyandang disabilitas melalui kampanye, seminar, dan kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Hadirnya IDW minimal turut menyadarkan masyarakat untuk lebih terbuka, peka, dan menghargai hak-hak disabilitas di mata masyarakat. Melalui langkah ini, para penyandang disabilitas juga menjadi lebih percaya diri dan mampu membuktikan karya yang dimiliki terhadap publik. Khususnya di Kabupaten Wonosobo.

Keempat, Kolaborasi dan Jaringan: Membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan sektor swasta untuk meningkatkan aksesibilitas dan peluang bagi masyarakat disabilitas. Melalui kolaborasi ini, IDW dapat menciptakan beberapa peluang bagi para penyandang disabilitas untuk menghadapi tantangan yang seringkali dialami. Baik dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan ekonomi, maupun lingkungan kerjanya.

Kelima, Pengembangan Program dan Layanan: Merancang dan mengimplementasikan program-program yang berfokus pada kebutuhan nyata masyarakat disabilitas, seperti aksesibilitas fisik, kesehatan mental, rehabilitasi, dan layanan sosial lainnya. Nilai penting dari misi ini adalah IDW dapat membuat program yang dibutuhkan secara nyata dari para anggota atau penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Dampak dari apa yang dilakukan juga langsung dapat dirasakan oleh para anggota supaya mendapatkan kehidupan yang layak.

Melalui visi dan misi di atas, maka dapat dikatakan Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) dapat bertindak sebagai fasilitator bagi para penyandang disabilitas untuk terus dapat mengembangkan karya yang dimiliki ditengah keterbatasan yang ada. Selain itu, IDW juga bertindak sebagai advokat atau juru bicara para penyandang disabilitas terkait dengan hak-hak mereka yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. IDW juga bertindak sebagai induk untuk melindungi dan menciptakan lingkungan positif bagi disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan akta notaris *AHU-0000810.AH.01.07.TAHUN 2020* Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) merupakan organisasi resmi dan diakui keberadaannya di Indonesia. Khusunya di Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Adapun struktur organisasinya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 7 Struktur Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW)

Sumber : Profil Ikatan Disabilitas Wonosobo

Berdasarkan pada gambar di atas, dapat diketahui bahwasanya IDW Kabupaten Wonosobo memiliki hierarki struktur organisasi dan tentu memiliki pembagian tugas yang jelas. Berkaca dari berbagai bidang yang terpampang pada bagan organisasi IDW, dapat dikatakan organisasi ini mencerminkan dan komitmen untuk memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Adapun lebih jelas lagi dapat ditulis seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3. 1 Pengurus IDW

Ketua	:	Syaifur Rohman, S.Kom,M.H
Sekretaris	:	Maryam Ramadani
Bendahara	:	Mahfud Hamzah
Koordinator Program	:	Rohmat
Divisi Advokasi	:	Firman Santoso
Divisi Pendidikan dan Pelatihan	:	Narimah,S.Pd
Divisi Kesejahteraan	:	Badar Roimah
Divisi Komunikasi dan Publikasi	:	Ahmat Arifin
Koordinasi Tunadaksa	:	Tri Widayati
Koordinasi Tunanetra	:	Irwanto
Koordinasi Tunarungu	:	Wawan Widiyanto
Koordinasi Mental dan Intelektual	:	Asrif

Sumber: Profil Ikatan Disabilitas Wonosobo 2024

Pandangan penulis terhadap apa yang telah diceritakan banyak orang yang dijumpai terkait dengan IDW dan melihat kepengurusan IDW, dari segi organisasi dapat dilihat bahwasanya IDW memiliki kepemimpinan yang terstruktur dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan spesifik. Terdapat peran strategis dan kefokusan pada berbagai tipe disabilitas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Hal itu dapat dilihat terdapat pada divisi dan koordinasi (Tuna Netra, Rungu, dan Mental Intelektual) yang tecantum.

Adapun ada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Wonosobo menaungi khusus perempuan dan anak disabilitas di Kabupaten Wonosobo anggotanya ada di dalam IDW juga. Oleh karena Ketua HWDI merupakan Sekretaris IDW. Adapun disabilitas fisik di dalam IDW diwakili oleh Ketua dan Sekretaris yang mengalami disabilitas secara fisik. Selain itu, dengan adanya divisi komunikasi dan koordinasi menjadikan informasi penting dapat sampai kepada anggota maupun masyarakat luas di Kabupaten Wonosobo.

Salah satu kelemahan dari Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) maupun Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah belum memperbarui data disabilitas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Sejauh ini, bila ditanyakan selalu dijawab ‘sekitar 4000-an’. Setelah terjun lapangan, penulis mendapatkan data mentah tahun 2017-2018 dan masih campur aduk keterangan disabilitas apa yang dialami.



Gambar 8 Jumlah Disabilitas Kabupaten Wonosobo 2023

Berdasarkan pada gambar di atas, disajikan data jumlah disabilitas yang ada di Kabupaten Wonosobo. Berdasarkan data jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo pada gambar, diketahui disabilitas fisik memiliki jumlah tertinggi, mencapai 1832 orang. Pada posisi kedua disabilitas intelektual dengan 698 orang. Disabilitas mental tercatat 764 orang, dan disabilitas sensosik (tuna netra, tuna rungu) mencapai 438 orang. Adapun total keseluruhan penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo mencapai 4164 orang.

Ada beberapa program yang telah dilakukan oleh Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW). Misalnya adalah dengan mengelar berbagai kerjasama dengan berbagai pihak, mengadakan pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri para anggotanya.



Gambar 9 Pelatihan yang dilakukan IDW

Setelah penulis cek *Instagram* yang dimiliki oleh IDW, ternyata memang betul sering dilakukan pertemuan dan berbagai kegiatan semacam pelatihan dan kerja sama untuk pengembangan diri penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Salah satu contohnya adalah yang disampaikan oleh Ketua IDW, yakni ‘Pelatihan Pemasaran dan Public Speaking di Era Digital’ yang berlangsung pada 27-28 Juli 2024. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di atas. Program tersebut adalah kerjasama dengan RTI *International Community Partnership Program* (CPP).

Berbagai program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh IDW, terdapat ada 3 (dua) hal menarik yang muncul setelah adanya IDW. Pertama adalah ‘Difabel Mart’, Kedua adalah Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Inklusi Infrastruktur Bangunan Gedung Pada Layanan Publik, Ketiga adalah muncul program dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo terkait dengan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di bidang pendidikan dan olahraga.

Salah satu inisiatif penting IDW adalah pengelolaan Difabel Mart, sebuah unit usaha koletif yang berfungsi sebagai ruang promosi dan pemasaran produk-produk UMKM penyandang disabilitas. Melalui manajemen yang transparan dan akuntabel, IDW memastikan bahwa ‘Difabel Mart’ tidak hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai etalasi inklusi dan simbol kemandirian komunitas difabel.

IDW berperan penting dalam mempertemukan kebutuhan komunitas disabilitas dengan kebijakan pemerintah daerah. Melalui pendekatan dialogis dan partisipatif, IDW mampu menyampaikan aspirasi komunitas secara sistematis kepada pihak-pihak pengambil kebijakan. Dengan kata lain, IDW berfungsi sebagai jembatan sosial dan politik yang menghubungkan dunia disabilitas dengan ruang-ruang pengambilan keputusan di tingkat lokal.

Peran aktif IDW dalam arena collaborative governance menjadi bukti bahwa kelompok masyarakat sipil, terutama yang berasal dari komunitas rentan, dapat memainkan fungsi strategis dalam tata kelola pembangunan inklusif. Dengan pendekatan yang berbasis kebutuhan komunitas dan jejaring kerja sama yang luas, IDW menjadi salah satu aktor kunci dalam transformasi kebijakan pemberdayaan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

## **2. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo**

Pemerintah Kabupaten Wonosobo memiliki peranan yang penting dalam pengembangan para penyandang disabilitas di wilayahnya. Terutama yang bergerak dalam bidang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam konteks ini, Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa (DinsosPMD) serta Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Wonosobo memainkan peran krusial untuk dapat menciptakan ekosistem yang mendukung kewirausahaan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

Melalui wawancara dengan kedua instansi tersebut, diperoleh beberapa temuan yang menggambarkan kondisi UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo dari sudut pandang pemerintah, serta langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk mendukung pengembangan para pelaku UMKM disabilitas. Upaya ini bertujuan agar penyandang disabilitas tidak hanya memperoleh akses sosial, tetapi juga memiliki peluang untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Disabilitas.

Pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas merupakan salah satu fokus Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam rangka meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat. UMKM berbasis potensi disabilitas di daerah ini menjadi bagian dari strategi tersebut, dengan memberikan peluang bagi penyandang disabilitas untuk berkontribusi dalam sektor ekonomi sekaligus mengembangkan kemampuan mereka.

Definisi UMKM berbasis potensi disabilitas oleh Dinas Soisal Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Wonosobo memberikan penekanan pada pengelolaan usaha yang berbasis kemampuan individu. Pendekatan ini menekankan pada penciptaan peluang usaha yang sesuai dengan kapasitas dan potensi penyandang disabilitas, bukan semata-mata menjalankan usaha yang bersifat umum.

Dengan demikian, UMKM berbasis potensi disabilitas bukan hanya soal bisnis, tetapi lebih kepada mengembangkan usaha yang dapat memberdayakan mereka sesuai dengan keahlian atau bakat yang dimiliki, menciptakan inklusi sosial dan

ekonomi bagi komunitas disabilitas. Dengan total kurang lebih 4.000 penyandang disabilitas yang tersebar di Kabupaten Wonosobo, pemerintah menyadari pentingnya memetakan potensi mereka secara tepat.

Pemerintah ingin memastikan siapa yang dapat diarahkan menuju wirausaha dan siapa yang lebih membutuhkan dukungan lain. Meski demikian, data mengenai jumlah pasti pelaku UMKM dari kalangan disabilitas saat ini belum terperinci. Proses identifikasi dan pendataan disabilitas dilakukan dengan pendekatan berbasis *asesmen*, yang mencakup pemetaan potensi, kebutuhan alat bantu, serta kemungkinan intervensi lainnya.

Pendekatan ini tidak hanya dilakukan melalui pengumpulan data statistik, tetapi juga melalui interaksi langsung dengan individu atau kelompok. Langkah pertama yang dilakukan dalam upaya pemberdayaan disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Dimulai dengan memetakan potensi masing-masing individu, untuk mengetahui apakah mereka dapat didorong untuk memulai usaha atau jika mereka lebih membutuhkan bantuan rehabilitas sosial atau alat bantu. Proses ini dilakukan melalui kunjungan lapangan, di mana tim mendalami kondisi langsung dengan berinteraksi dan berbicara dengan individu disabilitas atau kelompok disabilitas.

Dengan pendekatan yang lebih personal dan berbasis pada kebutuhan serta kondisi nyata, proses *asesmen* ini bertujuan untuk mengetahui siapa yang siap untuk berwirausaha dan siapa yang membutuhkan dukungan lain, sehingga pendampingan yang diberikan dapat lebih tepat sasaran dan efektif. Langkah ini

menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam mengembangkan UMKM berbasis potensi disabilitas tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mencakup pendekatan yang humanis.

Bidang Koperasi dan UMKM di Disdagkopukm Kabupaten Wonosobo memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis potensi disabilitas. Sebagai fasilitator dan pendukung utama, mereka berkontribusi dalam menyediakan pelatihan, memfasilitasi akses permodalan, hingga membantu promosi melalui kegiatan seperti pameran atau bazar. Disdagkopukm tidak hanya memberikan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan para pelaku UMKM disabilitas, tetapi juga memfasilitasi akses permodalan untuk membantu mereka memulai atau mengembangkan usaha supaya dapat berkembang dan memiliki daya saing dengan UMKM lainnya.

Upaya promosi melalui kegiatan seperti pameran atau bazar juga dilakukan untuk memperkenalkan produk UMKM disabilitas ke pasar yang lebih luas. Disdagkopukm juga berperan aktif dalam menjalin kolaborasi dengan dinas lain atau pihak swasta guna menciptakan peluang baru dan memberikan akses yang lebih luas bagi UMKM disabilitas. Tidak hanya berhenti pada pelatihan, Disdagkopukm juga menyediakan pendampingan setalah pelatihan.

Pendampingan yang dilakukan bertujuan untuk membantu mereka mengatasi tantangan yang muncul di lapangan, memberikan bimbingan teknis sesuai kebutuhan, serta memastikan hasil pelatihan benar-benar diterapkan dalam

kegiatan usaha mereka. Dari sisi Bidang Sosial, langkah konkret yang telah dilakukan dalam mendukung UMKM disabilitas mencakup pemberian alat bantu usaha, pelatihan keterampilan, hingga fasilitasi pemasaran.

Dukungan tersebut diwujudkan melalui berbagai program, seperti pemberian alat bantu usaha yang disesuaikan dengan bidang keterampilan, misalnya alat servis elektronik, alat membatik, dan alat untuk usaha kuliner. Selain itu, pelatihan juga disediakan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Sosial (Kemensos).

Contoh pelatihan yang pernah dilakukan adalah pelatihan memijat untuk penyandang tunanetra. Selain itu, tidak hanya fokus pada peningkatan keterampilan, Bidang Sosial juga membantu memfasilitasi pemasaran produk UMKM disabilitas melalui berbagai kegiatan dinas dan kolaborasi dengan Difabel Mart. Pendekatan yang dilakukan oleh Bidang Sosial Dinas Sosial mencerminkan komitmen mereka untuk memberikan dukungan nyata, beragam, dan tepat sasaran, baik kepada individu maupun kelompok penyandang disabilitas.

Selain itu, pelatihan yang disediakan oleh Bidang Koperasi dan UMKM bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis maupun kapasitas manajerial para pelaku UMKM disabilitas. Pelatihan kewirausahaan menjadi salah satu program unggulan, dimana peserta belajar dasar-dasar manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran produk, hingga cara mengembangkan produk agar lebih kompetitif.

Upaya yang dilakukan oleh Bidang Koperasi dan UMKM Disdagkopukm Kabupaten Wonosobo dalam mendukung pengembangan UMKM berbasis disabilitas melalui program pelatihan dan bimbingan. Fokus utama dari program ini adalah meningkatkan keterampilan dan kapasitas manajerial pelaku UMKM disabilitas agar mampu mengelola usaha mereka dengan lebih baik. Pendekatan ini bertujuan supaya UMKM disabilitas dapat berkembang secara mandiri dan kompeten.

Peran dari Bidang Koperasi dan UMKM Disdagkopukm dalam memfasilitas UMKM disabilitas selalu disambut baik oleh penyandang disabilitas. Dari berbagai langkah dan program yang diungkapkan melalui wawancara, terlihat bahwa dukungan terhadap UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo tidak hanya fokus pada pemberian bantuan fisik, tetapi juga mencakup aspek pemberdayaan yang berkelanjutan. Program seperti pelatihan keterampilan, fasilitasi pemasaran melalui Difabel Mart, menunjukkan adanya komitmen untuk menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan mandiri bagi penyandang disabilitas.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya pendataan terperinci terkait produk unggulan dari UMKM disabilitas. Bidang Koperasi dan UMKM menyadari pentingnya sistem pendataan khusus untuk memetakan potensi produk secara lebih akurat. Meskipun data produk unggulan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo belum ter dokumentasi secara rinci, Bidang Koperasi dan UMKM sudah mengidentifikasi beberapa produk potensial dari hasil pembinaan

dan pelatihan yang telah dilakukan.

Produk unggulan tersebut mencakup kerajinan tangan, seperti batik, hingga makanan ringan khas daerah, seperti keripik atau jajanan tradisional wonosobo. Produk-produk ini sering difasilitasi dalam kegiatan pameran atau bazar untuk memperluas jangkauan pasar. Untuk ke depannya guna pengelolaan dan pengembangan yang lebih baik, Bidang Koperasi dan UMKM berencana membuat sistem pendataan khusus. Sistem ini diharapkan dapat membantu mendokumentasikan informasi detail tentang produk- produk unggulan, sehingga memudahkan promosi dan pengembangan produk.

Langkah ini merupakan langkah positif dalam mendukung keberlanjutan UMKM disabilitas melalui pengelolaan data yang lebih ter struktur dan strategis. Disdagkopukm Kabupaten Wonosobo menempatkan pendamping UMKM sebagai garda terdepan dalam memahami dan mendukung kondisi riil UMKM disabilitas di lapangan. Pendamping ini memiliki peran strategis untuk berinteraksi langsung dengan pelaku usaha disabilitas, menggali informasi mendalam mengenai tantangan, kebutuhan, serta potensi yang mereka miliki.

Melalui kunjungan rutin dan dialog personal, pendamping mampu memberikan gambaran nyata tentang situasi yang dihadapi, baik dari sisi produksi, pemasaran, hingga pengelolaan usaha. Kehadiran pendamping tidak hanya membantu dalam mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terdeteksi dari laporan formal, tetapi juga memastikan bahwa bantuan dan program yang diberikan benar-benar sesuai dengan kebutuhan di

lapangan.

Pendamping dapat mencatat kesulitan akses UMKM dalam bahan baku, keterbatasan alat produksi, atau kendala pemasaran yang dihadapi oleh pelaku usaha, khususnya disabilitas. Informasi ini kemudian menjadi dasar bagi Disdagkopukm untuk merancang intervensi yang lebih tepat sasaran. Pendamping UMKM juga menjadi jembatan komunikasi antara pelaku usaha dan pemerintah daerah, memastikan bahwa suara dan aspirasi penyandang disabilitas tersampaikan dengan baik.

Dengan pendekatan ini, Disdagkopukm dapat merancang kebijakan yang lebih responsif dan efektif dalam mendukung pengembangan UMKM disabilitas, sehingga mereka tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang secara berkelanjutan. Pendamping UMKM memainkan peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaku UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Sebagai jembatan antara pemerintah dan pelaku UMKM, mereka bertanggung jawab memastikan bahwa kebijakan dan bantuan yang dirancang oleh pemerintah benar-benar terlaksana di tingkat akar rumput.

Pendamping UMKM menjelaskan bahwa produk yang memiliki kualitas tinggi tetapi tidak diminati pasar karena kemasan nya tidak menarik atau tidak mencerminkan nilai produk. Pendamping UMKM juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi pelaku UMKM disabilitas. Pendamping secara rutin mengunjungi pelaku UMKM untuk memberikan pelatihan, bimbingan teknis, dan memfasilitasi pemasaran produk mereka. Kegiatan ini bertujuan untuk

memastikan bahwa pelaku usaha disabilitas mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya.

Keterbatasan ini dapat menjadi kendala bagi pelaku UMKM disabilitas dalam meningkatkan kapasitas produksi mereka atau membuat proses produksi lebih efisien. Dengan kata lain, meskipun pendampingan sudah berjalan dengan baik, masih ada kebutuhan mendesak untuk memberikan dukungan tambahan, seperti peralatan agar usaha disabilitas dapat berkembang optimal. Hal ini menunjukkan pentingnya evaluasi dan peningkatan program pendampingan agar lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Pendampingan ini dilakukan tidak hanya untuk memperkuat kemampuan teknis seperti produksi atau pemasaran, tetapi juga membangun rasa percaya diri para pelaku UMKM disabilitas. Pendamping sering kali berperan sebagai mentor dan motivator, memastikan bahwa pelaku UMKM tetap semangat dalam menghadapi berbagai tantangan.

Masalah pendanaan juga menjadi kendala besar bagi UMKM disabilitas untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas melalui pameran dan bazaar. Pendamping UMKM mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia sering kali tidak cukup untuk menanggung biaya transportasi dan akomodasi para pelaku UMKM yang ingin berpartisipasi dalam *event* tersebut.

Keterbatasan anggaran ini membatasi partisipasi UMKM disabilitas dalam *event-event* besar yang sebenarnya memiliki potensi untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Terkait dengan hal ini, bila kita analisis lebih dalam menunjukkan bahwa tantangan ini tidak hanya soal pendanaan tetapi juga akses terhadap informasi mengenai sebuah *event* tersebut. Banyak pelaku UMKM disabilitas yang tidak mendapatkan informasi tepat waktu sehingga mereka tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan dan dengan berbagai program atau kegiatan yang telah dilakukan, melalui kolaborasi yang erat antara Bidang Sosial dan Bidang Koperasi dan UMKM, Pemerintah Kabupaten Wonosobo terus berkomitmen untuk menciptakan ekosistem yang mendukung keberlanjutan UMKM berbasis potensi disabilitas. Oleh karena, UMKM disabilitas menurut pandangan Pemerintah Kabupaten Wonosobo adalah UMKM yang dijalankan oleh penyandang disabilitas dengan memanfaatkan potensi dan keterampilan yang mereka miliki.

Pemerintah menekankan bahwa UMKM disabilitas tidak hanya soal bisnis, tetapi juga upaya pemberdayaan yang berbasis kemampuan individu, dengan tujuan menciptakan inklusi sosial dan ekonomi bagi penyandang disabilitas. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah mencerminkan UMKM yang berbasis potensi individu, pemberdayaan berkelanjutan, inklusi sosial dan ekonomi, peningkatan kemandirian, pendekatan humanis dan tepat sasaran.

UMKM disabilitas difokuskan pada pemanfaatan kemampuan unik atau spesifik penyandang disabilitas, seperti keterampilan membatik, memijat, atau membuat makanan khas. Hal ini menciptakan peluang usaha yang sesuai dengan kapasitas mereka penyandang disabilitas. Pemerintah menyediakan dukungan dalam bentuk pelatihan, bantuan alat produksi, fasilitasi pemasaran, hingga pendampingan berkelanjutan untuk meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial pelaku UMKM disabilitas.

UMKM disabilitas diarahkan untuk menciptakan kesetaraan peluang dan akses, sehingga penyandang disabilitas dapat aktif berkontribusi dalam kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Upaya pemerintah bertujuan untuk membantu pelaku UMKM disabilitas untuk menjadi lebih mandiri, baik dalam aspek produksi, pemasaran, maupun pengelolaan keuangan, sehingga mereka tidak terlalu bergantung pada bantuan eksternal.

Proses pendataan dan *asesmen* dilakukan secara langsung dengan penyandang disabilitas untuk memahami kebutuhan dan potensi masing- masing individu, sehingga intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran. Dengan pandangan ini, Pemerintah Kabupaten Wonosobo berkomitmen menciptakan ekosistem usaha yang inklusif, memberdayakan, dan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas, sembari mempromosikan produk mereka melalui program seperti Difabel Mart dan kegiatan pameran.

Pada dasarnya, pemerintah memainkan peran sebagai fasilitator dan katalisator. Peran fasilitator terlihat dari kemampuannya membuka ruang dialog dan koordinasi lintas sektor. Sementara peran katalisator tampak melalui pemberian stimulus awal, baik dalam bentuk modal usaha, dukungan teknis, maupun bantuan legalitas usaha bagi pelaku UMKM disabilitas. Namun demikian, terdapat pula tantangan yang harus diakui, seperti belum optimalnya integrasi data penyandang disabilitas dalam sistem perencanaan daerah serta perlunya koordinasi antarorganisasi perangkat daerah agar tidak terjadi tumpang tindih program.

Keterlibatan pemerintah daerah dalam skema *collaborative governance* menjadi penanda penting pergeseran pendekatan top-down menjadi lebih partisipatif dan horizontal. Dengan membuka ruang dialog dan mengakui kapasitas aktor non-negara seperti IDW dan sektor swasta, Pemerintah Kabupaten Wonosobo menunjukkan bahwa tata kelola pembangunan ekonomi inklusif dapat diwujudkan secara sinergis dan berkelanjutan.

### **3. Sektor Swasta dan Mitra Kolaboratif**

Dalam praktik *collaborative governance*, sektor swasta memegang peran penting sebagai mitra strategis yang mendukung pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Partisipasi sektor ini umumnya hadir melalui mekanisme *Corporate Social Responsibility* (CSR), baik dalam

bentuk program pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, fasilitasi promosi dan distribusi produk, maupun dukungan terhadap keberlanjutan wadah pemasaran seperti Difabel Mart. CSR di Wonosobo tidak hanya bersifat simbolik, tetapi mulai menunjukkan kecenderungan membangun relasi jangka panjang berbasis pemberdayaan.

Beberapa perusahaan nasional dan lokal, termasuk lembaga keuangan dan toko modern di daerah Wonosobo, terlibat dalam bentuk kerja sama pemasaran produk disabilitas, seperti program titip jual, pemberian rak display di outlet, serta pelibatan UMKM disabilitas dalam event promosi. Selain itu, sektor ini turut mendukung pelatihan tematik, seperti pelatihan branding, digital marketing, serta pelatihan packaging yang lebih kompetitif dan sesuai dengan standar pasar.

Pelibatan ini tidak hanya menunjukkan bentuk keterbukaan, tetapi juga menjadi refleksi bahwa sektor privat melihat penyandang disabilitas sebagai pelaku usaha yang layak diperkuat dalam ekosistem ekonomi lokal. Tidak hanya terbatas pada korporasi, sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di wilayah Wonosobo juga membangun kerja sama horizontal dengan pelaku UMKM disabilitas. Bentuknya beragam, seperti kolaborasi produksi, berbagi pasar, hingga dukungan logistik.

Relasi ini menunjukkan bahwa solidaritas ekonomi dapat tumbuh secara organik dari jejaring komunitas dan praktik bisnis

yang saling mendukung. Kolaborasi ini menjadi penting karena memperlihatkan bahwa pemberdayaan disabilitas bukan sekadar program berbasis bantuan, tetapi juga bagian dari dinamika ekonomi yang lebih besar. Selain sektor privat, mitra kolaboratif lainnya yang berperan adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM), perguruan tinggi, komunitas lokal, dan media.

Media lokal dan komunitas digital turut memainkan fungsi strategis dalam membangun citra positif UMKM disabilitas. Narasi tentang keberhasilan, perjuangan, dan potensi pelaku usaha disabilitas banyak dimuat dalam berita, dokumenter, hingga konten kreatif media sosial. Hal ini tidak hanya berfungsi sebagai promosi, tetapi juga sebagai upaya mengubah stigma sosial tentang disabilitas dari objek bantuan menjadi subjek pembangunan.

Keterlibatan sektor swasta dan mitra kolaboratif lain ini, meski belum sepenuhnya terstruktur dalam suatu forum formal kolaboratif, sudah menunjukkan arah perkembangan positif. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam aspek konsistensi, koordinasi program, serta kesinambungan dukungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan dan integrasi multipihak dalam sebuah platform kolaboratif yang lebih sistematis dan berkelanjutan, agar seluruh potensi yang ada mampu bersinergi untuk mendukung kemandirian ekonomi penyandang disabilitas secara inklusif dan berkeadilan

### **C. Wadah Pemberdayaan: Difabel Mart**

Difabel Mart adalah bukti kolaborasi yang kokoh antara organisasi penyandang disabilitas, komunitas lokal, pemerintah, dan sektor swasta di Kabupaten Wonosobo. Tempat ini menjadi representasi nyata dari Perjuangan Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi anggotanya dan mempromosikan kemandirian para penyandang disabilitas. Berdirinya Difabel Mart tidak hanya sekadar gagasan pemberdayaan ekonomi, tetapi juga bagian dari komitmen Wonosobo sebagai “Kabupaten Ramah HAM”.

Predikat ini mendorong IDW untuk memperjuangkan hak-hak difabel, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Perjalanan panjang menuju berdirinya Difabel Mart dimulai pada tahun 2018. IDW, yang telah lama aktif dalam advokasi hak-hak penyandang disabilitas, merancang ide untuk membangun pusat oleh-oleh khusus produk UMKM difabel.

Gagasan ini didasari oleh fakta bahwa banyak anggota IDW memiliki keterampilan dalam menghasilkan produk berkualitas, tetapi minim akses di pasar. Difabel Mart diharapkan menjadi simbol kemandirian, di mana produk karya penyandang disabilitas dapat dihargai atas kualitasnya, bukan semata-mata karena belas kasihan.

Sebagai bagian dari Kabupaten Ramah HAM, IDW memanfaatkan momentum ini untuk mendesak pemerintah agar lebih serius mendukung pemberdayaan ekonomi difabel. Mereka mendekati berbagai instansi pemerintah, termasuk Bupati hingga Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mencari lokasi strategis

untuk Difabel Mart. Namun, perjalanan tidaklah mudah. Selama bertahun-tahun, usulan IDW kerap menemui hambatan birokrasi, dan *respons* pemerintah terbilang lambat. Meski demikian, semangat IDW tidak surut.

Mereka terus membangun jejaring dengan komunitas lokal dan menggalang dukungan dari berbagai pihak. Pada tahun 2022, setelah proses lobi yang panjang, Dinas Pariwisata memberiikan izin pengunaan lahan di Taman Rekreasi Kalianget. Lokasi ini dianggap strategis karena berada di kawasan wisata, tetapi kondisinya jauh dari layak. Tanah dan bangunan yang diberikan tidak memiliki fasilitas apa pun dan memerlukan pembangunan dari nol.

Bagi IDW, meskipun penuh keterbatasan, ini adalah awal dari langkah besar mereka menuju pemberdayaan ekonomi yang lebih luas. Ada banyak hal yang dilakukan oleh IDW untuk mengembangkan sentra UMKM yang disebut Difabel Mart ini. IDW tidak hanya mengandalkan pemerintah. Mereka menggalang dana secara mandiri dengan mengandeng komunitas lokal, seperti Komunitas Balon Wonosobo, untuk mengajukan proposal pendanaan melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Salah satu hasil nyata dari usaha ini adalah bantuan dana sebesar 100 juta rupiah dari AirNaV, sebuah BUMN penerbangan. Dana ini kemudian dibagi dua, dengan 50 juta rupiah digunakan IDW untuk pembangunan awal Difabel Mart. Proses pembangunan dilakukan secara bertahap, dengan mengandalkan kerja sama anggota IDW dan dukungan

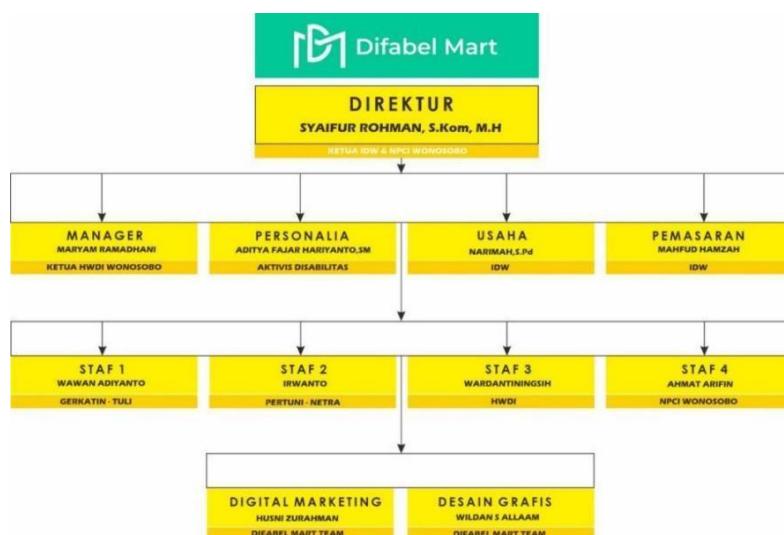
komunitas di Kabupaten Wonosobo. Bangunan sederhana yang dihasilkan akhirnya dapat digunakan sebagai pusat oleh-oleh pada November 2022.

Difabel Mart menjadi tempat yang penuh makna bagi penyandang disabilitas di Wonosobo. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai toko, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan di mana anggota IDW dapat memasarkan produk mereka, seperti kerajinan tangan, makanan olahan, hingga batik khas Wonosobo.

Perjalanan tidak berhenti disini, Difabel Mart mengalami tantangan besar, terutama dalam menarik pengunjung. Wisatawan cenderung mengunjungi pusat oleh-oleh besar yang telah bekerjasama dengan agen perjalanan. Difabel Mart lebih sering dikunjungi oleh pembeli individu yang mengetahui tempat ini melalui media sosial atau memiliki kepedulian terhadap isu disabilitas. IDW terus berupaya meningkatkan promosi, tetapi keterbatasan modal membuat mereka harus mengandalkan inisiatif pribadi para anggota.

Difabel Mart mendapatkan dukungan dari berbagai pihak untuk mendukung operasional-nya. Salah satu bantuan berasal dari BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) yang memberikan pembiayaan untuk kebutuhan operasional seperti membayar tagihan listrik. Bantuan ini meringankan beban pengeluaran Difabel Mart, sehingga operasional nya dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, Difabel Mart juga menerima fasilitas dari Balai Kartini Provinsi berupa *Freezer*.

Bantuan ini merupakan bagian dari program pemerintah daerah melalui dinas terkait untuk menyediakan sarana yang mendukung kegiatan usaha bagi komunitas disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Kolaborasi ini menunjukkan komitmen berbagai pihak dalam meningkatkan kesejahteraan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo melalui penyediaan fasilitas dan pembiayaan yang dibutuhkan. Bantuan tersebut tidak hanya berperan dalam memengaruhi kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan pentingnya pemberdayaan disabilitas.



Gambar 10 Struktur Difabel Mart Sumber: Profil Difabel Mart

Seperti harapan IDW bahwa Difabel Mart ini hadir supaya menjadi tempat disabilitas di Kabupaten Wonosobo memiliki rumah bersama. Difabel Mart tidak hanya fokus pada

perdagangan, tetapi juga pada pembentukan struktur organisasi yang inklusif. Setiap individu dalam organisasi ini memiliki peran yang penting, sesuai dengan kompetensi dan kapasitas masing-masing. Struktur yang ter-organisir ini tidak hanya memastikan kelancaran operasional, tetapi juga memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk berpartisipasi aktif dalam pengelolaan usaha.

Kolaborasi ini menunjukkan bahwa Difabel Mart tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga pada penguatan kapasitas sumber daya manusia disabilitas. Struktur organisasi Difabel Mart mencerminkan pembagian peran yang terencana dengan baik, mulai dari pimpinan tertinggi, yaitu Syaifur Rohman, S.Kom., M.H., yang menjabat sebagai Direktur. Sebagai Ketua IDW dan NPCI Kabupaten Wonosobo, beliau bertanggung jawab penuh dalam mengarahkan visi dan misi Difabel Mart.

Dengan latar belakang tersebut, beliau membawa pengalaman dan jejaring yang luas untuk mendukung keberlanjutan usaha sekaligus memperjuangkan hak-hak komunitas disabilitas. Di bawah direktur, organisasi ini terbagi menjadi empat divisi utama: Manajemen, Personalia, Usaha, dan Pemasaran. Divisi Manajemen dipimpin oleh Maryam Ramadhani, Ketua HWDI Wonosobo, yang memiliki tugas utama memastikan kelancaran operasional.

Divisi Personalia dikelola oleh Aditya Fajar Hariyanto, S.M., yang merupakan aktivis disabilitas dengan fokus pada pengelolaan sumber daya manusia. Sementara itu, Narimah,

S.Pd., dan Mahduf Hamzah masing- masing memimpin Divisi Usaha dan Divisi Pemasaran, dengan tanggung jawab utama mengembangkan strategi usaha dan memperluas jaringan pemasaran. Masing-Masing divisi memiliki tim pendukung yang terdiri dari indivisu dengan latar belakang dan kemampuan yang beragam.

Contohnya, Divisi Manajemen didukung oleh Wawan Adiyanto dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Kabupaten Wonosobo, yang mewakili komunitas tuli, dan Wardantiningsih dari Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Kabupaten Wonosobo. Di Divisi Personalia, Irwanto, perwakilan Pesatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Wonosobo, membantu dalam pengelolaan tenaga kerja. Divisi Pemasaran diperkuat oleh Ahmad Arifin dari NPCI Kabupaten Wonosobo.

Setiap individu memainkan peran strategis untuk mendukung keberlanjutan Difabel Mart. Selain struktur utama, Difabel Mart juga memiliki tim khusus untuk pemasaran digital dan desain grafis. Husni Zurahman bertugas mengelola pemasaran digital, memastikan produk dari UMKM Disabilitas dapat menjangkau konsumen yang lebih luas. Wildan S.Allam, disisi lain, menangani desain grafis untuk mempromosikan produk secara visual, sehingga dapat menarik minat pembeli. Tim ini bekerja secara sinergis dengan divisi lain untuk memperkuat eksistensi Difabel Mart di pasar.

Dengan struktur organisasi yang terencana dan melibatkan berbagai pihak, Difabel Mart menunjukkan bagaimana inklusivitas dapat diterapkan dalam dunia usaha. Kolaborasi antar individu dengan berbagai kemampuan dan komunitas ini menjadi contoh nyata dari pemberdayaan yang berbasis pada kerja sama dan saling menghormati. Difabel Mart tidak hanya menjadi tempat usaha, tetapi juga wadah bagi penyandang disabilitas untuk berkembang, baik secara ekonomi maupun sosial.

Melalui kepemimpinan yang visioner dan struktur organisasi yang solid, Difabel Mart terus menunjukkan eksistensinya sebagai pelopor pemberdayaan ekonomi disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Inisiatif ini bukan hanya memberikan dampak ekonomi, tetapi juga inspirasi bahwa disabilitas bukanlah penghalang untuk mencapai kemandirian. Hal ini sejalan dengan misi Difabel Mart untuk terus menjadi jembatan bagi kesejahteraan komunitas disabilitas melalui usaha yang berkelanjutan. Bahkan, hadirnya Difabel Mart juga memberikan peluang bisnis bagi UMKM lainnya.



Gambar 11 Pelaku USaha Disabilitias Sumber: Profil Difabel Mart

Tabel 3. 2 Daftar Pelaku Usaha Difabel Mart

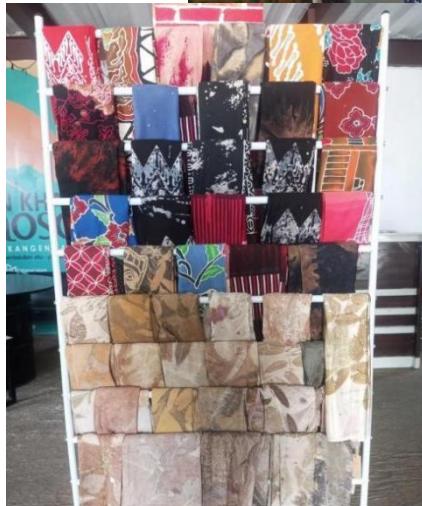
No	Nama	Alamat	Jenis Usaha
1	Syaifur Rohman	Kaliwiro	Basreng Fa 888 ( Cemilan)
2	Wardantiningsing	Jambusari - Kertek	Cumi Abon Ds,Bagelan (Kue Kering)
3	Mashuri	Kalidadap -Wadaslintang	Batik Luk Ulo
4	Jembar	Ndero - Mojotengah	Keripik Carica,Onde-onde
5	Sunariyah	Kalibeber – Mojotengah	Sale Pisng

6	Badar rokhimah	Mlipak – Wonosobo	Dawet Ayu, Keripik Tahu
7	Saminem	Kertek	Keripik Kelapa, Peyek
8	Umi Farkhah	Mojotengah	Keripik Talas
9	Irwanto	Tumenggungan – Wonosobo	Jasa Pijat
10	Bintoro	Kalibeber – Mojotengah	Jasa Pijat
11	Lastiyah	Kalibeber – Mojotengah	Jasa Pijat
12	Narimah	Kemiriombo – Wonosobo	Pakaian Anak
13	Maryam Ramadani	Jlegong – Wonosobo	Aksesoris
14	Ahmat Arifin	Kuripan – Garung	Kopi Arabica
15	Teguh	Maron – Garung	Keripik Teri
16	Yuni Haryanto	Wonosobo	Aneka Jamu Traditional
17	Mahfud Hamzah	Kedewan – Kertek	Kopi Robusta
18	Fuad	Kalikajar	Rengginang
19	Tri Widayati	Sapuram	Keripik Pisang,Singkong
20	Wawanwidiyanto	Wonosobo	Mie Ayam

Sumber: Profil Difabel Mart

Difabel Mart hadir sebagai pusat yang memperkenalkan berbagai produk dari para penyandang disabilitas, yang tidak hanya berfokus pada produk makanan, tetapi juga produk lainnya seperti pakaian anak, aksesoris, dan bahkan jasa pijat. Tabel yang disajikan di atas menunjukkan berbagai usaha yang dijalankan oleh 20 pelaku usaha disabilitas yang terdaftar dan terlibat di Difabel Mart. Mereka menciptakan berbagai jenis produk seperti cemilan keripik, minuman tradisional, dan lain sebagainya.

Setiap produk ini merupakan buah dari kreativitas dan kemampuan mereka yang menunjukkan bahwa disabilitas bukanlah hambatan untuk berwirausaha. Selain produk makanan dan minuman, Difabel Mart juga menjual berbagai produk lain yang semakin memperkaya pilihan konsumen, seperti pakaian anak dan aksesoris. Beberapa produk unggulan lainnya termasuk Rengginang, Keripik pisang-singkong, Dawet Ayu, dan Keripik Talas. Hal ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini





Gambar 12 Contoh Produk Difabel Mart Sumber:  
Olahan Data Penelitian

Difabel Mart juga menawarkan jasa pijat yang dijalankan oleh penyandang disabilitas netra, memberikan nilai tambah bagi para pengunjung yang datang. Hal ini menjadi keunikan tersendiri karena lokasi Difabel Mart yang berada di Taman Rekreasi Kalianget, Kabupaten Wonosobo, menjadi tempat transit bagi para wisatawan yang menggunakan bus besar dari luar kota sebelum melanjutkan perjalanan ke kawasan wisata Dieng. Seperti halnya yang dilakukan oleh penulis dalam melakukan pengambilan data ini yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 13 Jasa Pijat Tuna Netra Sumber:  
Data Olahan Penelitian

Posisi strategis ini menjadikan Difabel Mart sebagai titik perhentian yang ideal bagi para pelancong untuk beristirahat sejenak sambil menikmati layanan yang ditawarkan, termasuk jasa pijat relaksasi. Taman rekreasi Kalianget sendiri merupakan destinasi yang sering menjadi pemberhentian utama bagi wisatawan. Karena sebuah keharusan dan juga karena lokasinya yang nyaman dan memiliki fasilitas yang cukup memadai. Setiap harinya, bus wisata dari berbagai daerah berhenti di lokasi ini, membawa wisatawan yang ingin menikmati suasana Dieng.

Keberadaan Difabel Mart di lokasi strategis seperti Taman Rekreasi Kalianget tidak hanya memberikan dampak positif bagi penyandang disabilitas, tetapi juga memperkaya pengalaman wisata di Wonosobo. Wisatawan dapat menikmati

beragam produk lokal sambil mendukung pemberdayaan komunitas disabilitas. Hal ini menjadikan Difabel Mart sebagai model bisnis inklusif yang tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga membangun kesadaran sosial di kalangan masyarakat dan wisatawan.

Difabel Mart tidak hanya menjadi tempat bagi penyandang disabilitas untuk memasarkan produk mereka, tetapi juga menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berdaya saing. Dalam upayanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, Difabel Mart mengusung prinsip kolaborasi dengan melibatkan UMKM non-difabel. Hal ini dilakukan untuk memperluas pilihan produk yang tersedia, meningkatkan daya tarik konsumen, dan memperkuat jaringan pasar.

Prinsip utama yang dijaga adalah keunikan dan keberagaman produk, agar tidak ada persaingan langsung yang merugikan pelaku usaha disabilitas. Kolaborasi dengan UMKM non-difabel juga semakin memperkaya ragam produk yang tersedia. Prinsip ini memastikan produk yang dijual tetap unik dan tidak saling bersaing di antara komunitas difabel dan non-difabel. Dengan demikian, Difabel Mart dapat menjaga harmoni antara dua komunitas sekaligus memberikan pengalaman belanja yang beragam bagi konsumen.

Melalui kolaborasi ini, Difabel Mart tidak hanya berfungsi sebagai ruang usaha, tetapi juga menjadi model pemberdayaan ekonomi yang inklusif. Prinsip ke hati-hatian dalam memilih produk yang tidak saling tumpang tindih menunjukkan komitmen Difabel Mart dalam menjaga

keberlanjutan usaha penyandang disabilitas tanpa mengesampingkan potensi UMKM non-difabel. Dengan pendekatan yang strategis ini, Difabel Mart tidak hanya berhasil meningkatkan pendapatan bagi para pelaku usaha, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai pusat ekonomi inklusif di Kabupaten Wonosobo.

Difabel Mart di Kabupaten Wonosobo telah menjadi pusat pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas, sekaligus tempat yang memperkenalkan potensi mereka kepada masyarakat luas. Tanggapan masyarakat terhadap keberadaan Difabel Mart menunjukkan kombinasi antara empati, apresiasi, dan masukan kritis terhadap produk yang dihasilkan. Kesadaran akan pentingnya mendukung komunitas difabel telah mendorong berbagai respons positif, meski pun masih ada ruang untuk perbaikan dalam aspek tertentu.

Sebagian besar masyarakat yang berbelanja di Difabel Mart mengungkapkan pengalaman unik mereka saat berinteraksi langsung dengan pelaku usaha disabilitas. Pengalaman menunjukkan bahwa banyak pembeli awalnya didorong oleh simpati. Namun, ini sekaligus menjadi pintu masuk bagi masyarakat untuk mengenal dan mendukung produk dari penyandang disabilitas. Kualitas produk menjadi salah satu aspek yang paling sering mendapat perhatian dari konsumen.

Apresiasi atas usaha keras komunitas difabel, meski konsumen berharap ada peningkatan dari segi kualitas produk. Bagi sebagian besar masyarakat, produk yang dihasilkan oleh penyandang disabilitas memiliki potensi besar untuk berkembang

lebih jauh. Masukan seperti ini penting untuk dijadikan bahan evaluasi agar produk-produk difabel semakin kompetitif di pasar. Kesadaran masyarakat terhadap asal-usul produk juga memengaruhi pengalaman berbelanja mereka.

Kejelasan informasi membantu menciptakan koneksi emosional antara pembeli dan penjual, sehingga konsumen lebih ter motivasi untuk mendukung. Tanggapan masyarakat juga mencerminkan harapan besar terhadap pengembangan usaha difabel. Pandangan ini menunjukkan bahwa masyarakat melihat potensi Difabel Mart sebagai potensi ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga ada pemberdayaan terhadap komunitas disabilitas.

Meskipun tanggapan positif mendominasi, ada sejumlah kritik konstruktif yang dapat menjadi bahan refleksi bagi Difabel Mart. Beberapa pembeli menyoroti aspek kemasan produk yang masih sederhana dan belum cukup menarik perhatian. Selain itu, sebagian masyarakat juga berharap adanya diversifikasi produk untuk memperluas pilihan bagi konsumen.

Selain kualitas, layanan di Difabel Mart juga mendapatkan perhatian. Masyarakat umumnya memberikan apresiasi terhadap keramahan dan semangat penyandang disabilitas dalam melayani konsumen. Hal ini mencerminkan bahwa meskipun mereka memiliki keterbatasan, semangat untuk memberikan pengalaman terbaik bagi pembeli tetap menjadi prioritas. Lokasi Difabel Mart di Taman Rekreasi Kalianget memberikan akses strategis kepada masyarakat dan wisatawan.

Pengunjung yang transit sering kali memanfaatkan waktu mereka untuk berbelanja atau sekadar melihat-lihat produk yang ditawarkan. Tanggapan positif dari wisatawan yang berbelanja membuktikan bahwa Difabel Mart memiliki daya tarik tersendiri yang dapat terus ditingkatkan. Harapan masyarakat terhadap Difabel Mart tidak hanya terbatas produk yang lebih berkualitas, tetapi juga pada keberlanjutan usaha ini. Difabel Mart dilihat sebagai sesuatu yang dilihat baru dan menjadi daya tarik tersendiri di Kabupaten Wonosobo.

Mereka berharap bahwa Difabel Mart dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga komunitas disabilitas di Kabupaten Wonosobo dapat terus berkembang. Ke depan, masyarakat juga menginginkan adanya cerita dibalik setiap produk yang dijual. Dengan memberikan narasi tentang proses pembuatan produk atau kisah pelaku usaha disabilitas, konsumen dapat merasa lebih terhubung dengan produk yang mereka beli.

Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan nilai produk, tetapi juga memperkuat rasa empat dan dukungan dari masyarakat. Selain itu, pendidikan konsumen tentang pentingnya mendukung UMKM disabilitas perlu terus digalakkan. Kampanye melalui media sosial, papan informasi, atau brosur di Difabel Mart dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kontribusi mereka terhadap pemberdayaan komunitas difabel melalui pembelian produk.

Tanggapan masyarakat sejauh ini menunjukkan bahwa Difabel Mart telah berhasil menarik perhatian dan mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Namun, untuk mempertahankan dan meningkatkan dukungan ini, Difabel Mart perlu terus berinovasi dan memperbaiki kualitas layanan serta produk yang ditawarkan. Pada akhirnya, keberadaan Difabel Mart bukan hanya soal menjual produk, tetapi juga tentang menciptakan ruang inklusif di mana penyandang disabilitas dapat menunjukkan potensi mereka.

Dengan dukungan yang konsisten dari masyarakat dan upaya peningkatan dari pihak Difabel Mart, maupun Pemerintah Kabupaten Wonosobo, tempat ini memiliki peluang besar untuk menjadi simbol keberhasilan pemberdayaan ekonomi di Kabupaten Wonosobo. Melalui sinergi ini, produk-produk difabel tidak hanya akan dikenal di tingkat lokal tetapi juga dapat menembus pasar yang lebih luas. Keberhasilan ini diharapkan mampu menginspirasi daerah lain untuk mengembangkan program serupa.

Sebagai jembatan antara komunitas difabel dan masyarakat umum, Difabel Mart memiliki peran penting dalam menghapus stigma negatif terhadap disabilitas dan menunjukkan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang untuk berkarya dan berkontribusi bagi masyarakat. Keberadaan Difabel Mart juga menjadi bukti bahwa inklusivitas dapat menciptakan peluang ekonomi yang saling menguntungkan. Dengan terus mendorong kesadaran publik, inisiatif seperti ini dapat mempercepat tercipta nya masyarakat yang lebih adil dan setara.

Difabel Mart menjadi salah satu bentuk praktik nyata dari *collaborative governance* di tingkat lokal. Ia lahir dari ruang dialog, didukung oleh semangat partisipatif, dan dijalankan melalui kerja sama yang setara antaraktor. Dalam konteks ini, Difabel Mart bukan sekadar toko, melainkan simbol dari transformasi peran penyandang disabilitas dari objek penerima program menjadi subjek pelaku pembangunan ekonomi yang setara dan bermartabat.

Dengan demikian, pemaparan dalam bab ini menggambarkan konteks faktual di lapangan yang menjadi fondasi penting dalam memahami implementasi tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Tiga aktor utama yang teridentifikasi—yakni Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW), Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo, dan unit usaha Difabel Mart—memiliki peran dan kontribusi berbeda namun saling terkait dalam mendorong pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. IDW bertindak sebagai penggerak komunitas dan motor pengorganisasian internal, Pemerintah Daerah sebagai fasilitator kebijakan dan penyedia ruang kolaborasi lintas sektor, sementara Difabel Mart menjadi representasi konkret dari upaya ekonomi inklusif yang sedang dibangun.

Ketiganya tidak hanya menjalankan fungsi masing-masing secara sektoral, tetapi juga membentuk simpul-simpul kerja sama yang memperlihatkan proses interaksi, pertukaran sumber daya, serta pembentukan kepercayaan dan komitmen dalam kerangka kolaboratif. Narasi dalam bab ini menempatkan para aktor dalam posisi strategis

yang memungkinkan untuk dilakukan pembacaan lebih lanjut mengenai bagaimana mereka berinteraksi, bernegosiasi, serta merespons tantangan dan peluang di tengah keterbatasan kapasitas dan infrastruktur.

## BAB IV

### ANALISIS *COLLABORATIVE GOVERNANCE* DALAM PENGEMBANGAN UMKM DISABILITAS BERBASIS POTENSI DI KABUPATEN WONOSOBO

Setelah pada bab sebelumnya dibahas mengenai potret pemerintah dan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo yang memberikan gambaran umum hubungan antara pemerintah daerah, komunitas disabilitas, dan sektor swasta, pada bab ini analisis akan difokuskan lebih mendalam untuk memahami bagaimana kolaborasi multipihak berlangsung dalam pengembangan UMKM disabilitas berbasis potensi lokal.

Bab ini bertujuan memberikan jawaban atas pertanyaan utama dalam penelitian, yaitu bagaimana proses *collaborative governance* dijalankan dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Dengan pendekatan yang komprehensif, pembahasan ini berupaya memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika peran aktor, pola interaksi, serta faktor pendukung dan penghambat kolaborasi. Hasil analisis diharapkan dapat menjadi masukan praktis dan strategis bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pemberdayaan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas.

Pembahasan difokuskan pada tiga aspek utama. Pertama, peran dan kontribusi para pemangku kepentingan dalam proses pengembangan UMKM disabilitas. Kedua, pola interaksi dan dinamika kerja sama antara pemerintah, komunitas disabilitas, sektor swasta, dan masyarakat. Ketiga, faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat kolaborasi tersebut dalam mendukung keberhasilan pengembangan UMKM disabilitas.

Pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo memiliki karakteristik yang unik karena melibatkan penyandang disabilitas sebagai subjek utama sekaligus pelaku usaha. Difabel Mart menjadi contoh nyata kolaborasi antara Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW), Pemerintah Kabupaten Wonosobo, dan sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Difabel Mart tidak hanya berfungsi sebagai pusat pemasaran produk UMKM disabilitas, tetapi juga sebagai ruang pembelajaran dan penguatan kapasitas penyandang disabilitas.

Keberhasilan model Difabel Mart menunjukkan bahwa pengembangan UMKM disabilitas memerlukan pendekatan terintegrasi antara penguatan individu, kebijakan yang mendukung, dan kolaborasi lintas sektor. Namun, tantangan tetap muncul baik dari sisi internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia dan aksesibilitas, maupun eksternal seperti dukungan kebijakan yang belum optimal.

Dalam konteks tersebut, proses *collaborative governance* menjadi kunci utama. Berdasarkan perspektif *Collaborative Governance Regime* (CGR) yang dikemukakan oleh Emerson dan Nabatchi, kolaborasi yang efektif membutuhkan tiga komponen utama: dinamika kolaborasi, tindakan bersama, dan adaptasi terhadap hasil. Dalam dinamika kolaborasi, *principled engagement, shared motivation, and capacity for joint action* menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan dan sinergi antaraktor.

Melalui analisis dalam bab ini, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mendalam mengenai kompleksitas kolaborasi multipihak dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Data empiris hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mendukung analisis, sementara kerangka CGR digunakan sebagai pisau analisis utama untuk memahami dinamika, efektivitas, serta tantangan kolaborasi yang terjadi.

## **A. Peran Aktor dalam *Collaborative Governance* Pengembangan UMKM Disabilitas**

Dalam kerangka *Collaborative Governance*, peran aktor menjadi fondasi penting dalam menciptakan sinergi multipihak. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat sejumlah aktor kunci yang terlibat secara aktif dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo, yaitu pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, media lokal, dan masyarakat sebagai konsumen.

### **1. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo**

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo memainkan peran strategis dalam menggerakkan pengembangan UMKM disabilitas melalui pendekatan *collaborative governance*. Peran ini dijalankan terutama oleh dua instansi utama, yakni Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisdagkopUKM) serta Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD).

Secara umum, pemerintah berperan sebagai fasilitator, regulator, dan penyedia dukungan teknis maupun non teknis dalam rangka meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Peran ini diwujudkan melalui tiga aspek utama: pelatihan dan peningkatan kapasitas, penguatan akses pasar, serta dukungan kelembagaan dan kebijakan.

a) Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Penyandang Disabilitas

Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop UKM) telah menyelenggarakan berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis, keahlian manajerial, serta kapasitas berwirausaha para penyandang disabilitas agar mereka dapat bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Tabel 4. 1  
Data UMKM Disabilitas dan Pelatihan Oleh Pemerintah

No	Nama	Usaha	Pelatihan
1	Wardatiningsih	Aneka Kue Kring dan Snack	Pelatihan Barang dan Jasa Pelatihan Literasi Keuangan Pelatihan Jual Beli Online
2	Nunung Sri Lestari	Batik	Pelatihan Strategi Bisnis dan Digital Marketing Pelatihan Jual Beli Online
3	Umi Farhah	Keripik dan Sale Pisang	Pelatihan Boga
4	Jembar	Keripik Carica	Pelatihan Boga

5	Yati	Keripik Busil dan Pisang	-
6	Sunariyah	Keripik Singkong	Pelatihan Boga
7	Masruri	Batik	-
8	Arifin	Service HP	-
9	Sunariyah	Keripik Ketela	-
10	Badarohimah	Dawet	Pelatihan Strategi Bisnis dan Digital Marketing
11	Ari	Batik	Pelatihan Jual Beli Online
12	Waluyo	Roti	-
13	Saiful	Basreng	-
14	Nur Avina	Opak Ilat	Digital Marketing (BLK)
			Pelatihan Strategi Bisnis dan Digital Marketing

Sumber: Data Temuan Lapangan dari Pendamping UMKM 2024

Berdasarkan tabel di atas, terdapat 14 UMKM Disabilitas di Kabupaten Wonosobo yang tercatat dan terdata menjadi subjek pendampingan dan pelatihan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui DisdagkopUKM. Pelatihan yang telah diberikan terbagi kedalam tiga kategori, yakni; Pelatihan teknis sesuai bidang usaha, pelatihan pemasaran digital, dan pelatihan strategis. Hal ini sebagaimana telah banyak diungkapkan pada bab sebelumnya oleh Kepala Bidang Koperasi dan UKM maupun Pendamping UMKM.

Pelatihan teknis sesuai bidang usaha bertujuan meningkatkan keterampilan teknis praktis sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. Contohnya adalah pelatihan boga yang diberikan kepada pelaku UMKM di sektor makanan seperti Umi Farhah (Keripik dan Sale Pisang), Jembar (Keripik

Carica), dan Sunariyah (Keripik Singkong). Pelatihan ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memberikan wawasan baru dalam inovasi resep dan teknik produksi.

Pelatihan pemasaran digital dalam menghadapi era digitaliasi dirancang untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital. Pelaku usaha seperti Nunung Sri Lestasi (batik) dan Nur Avina (opak ilat) menerima pelatihan *digital marketing* dan jual beli online. Langkah ini memberikan mereka bekal untuk memanfaatkan *marketplace* dan media sosial sebagai platform pemasaran yang lebih luas.

Pelatihan strategis, seperti pelatihan literasi keuangan dan strategi bisnis menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas manajerial pelaku UMKM. Pelatihan ini membantu mereka mengelola arus kas, memahami konsep perencanaan keuangan, serta membuat strategi bisnis yang lebih terarah. Wardatiningsih, misalnya, mendapatkan pelatihan literasi keuangan sebagai bagian dari pengembangan usahanya di bidang snack.

Melanjutkan upaya pemberdayaan pelaku UMKM disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DisdagkopUKM) Kabupaten Wonosobo, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) juga turut berkontribusi melalui program-program pelatihan dan pendampingan. Program pelatihan yang di desain oleh Dinsos PMD bertujuan untuk

mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan membuka peluang bagi penyandang disabilitas untuk dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional.

Dinsos PMD menyelenggarakan berbagai pelatihan yang menyesuaikan dengan potensi dan kebutuhan spesifik penyandang disabilitas. Salah satu yang menjadi unggulan adalah pelatihan membatik yang diadakan di Desa Maroon. Pelatihan yang dilakukan melalui kerja sama dengan Pemerintah Desa Maroon. Seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini

---

### **Merajut Kemandirian Penyandang Disabilitas Melalui Batik Ciprat di Desa Wisata Maron**

19 Juli, 2024 | [Desa Wisata](#)



Pembuatan Batik Ciprat. Sumber: telagamenjerwonosobo.com

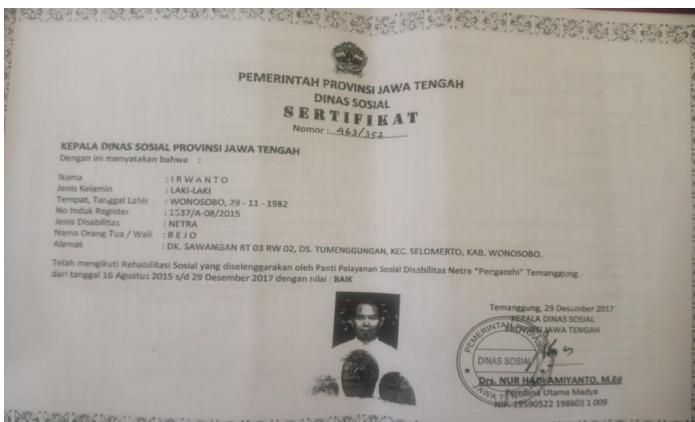
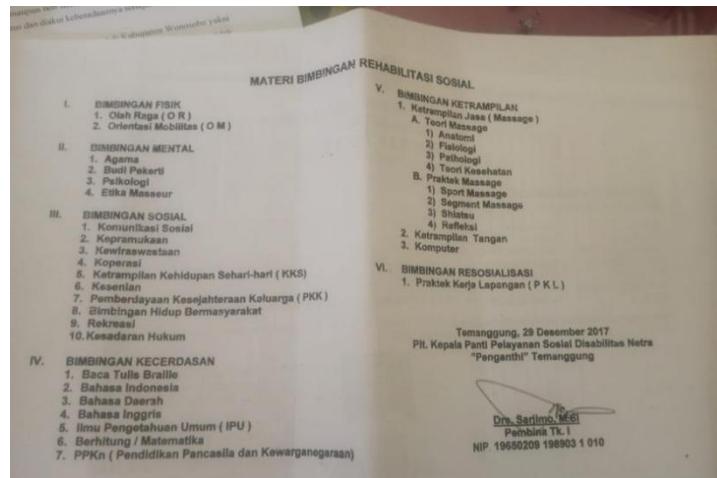
Gambar 14 Dokumentasi Pelatihan Batik di Desa Maroon Sumber: <https://www.masterplandesa.com/desa-wisata/merajut-kemandirian-penyandang-disabilitas-melalui-batik-ciprat-di-desa-wisata-maron/>

Program sebagaimana gambar di atas diadakan untuk meningkatkan keterampilan para penyandang disabilitas dalam bidang seni batik, yang tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga peluang untuk mengembangkan usaha berbasis kerajinan tangan. Selain itu, pelatihan pijat juga diberikan untuk penyandang disabilitas netra, yang dilaksanakan di Temanggung. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan yang bisa dijadikan mata pencaharian bagi penyandang netra, membuka peluang kerja yang lebih luas untuk disabilitas netra.

Dalam wawancara, salah satu peserta atau disabilitas yang pernah ikut membagikan pengalamannya seperti demikian:

“... Saya ikut pelatihan di Balai Kartini Temanggung selama dua tahun. Kami tinggal di asrama, belajar teori, dan praktik pijat hingga mendapatkan sertifikat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.” (Dokumentasi transkip wawancara, 19 September 2024).

Pernyataan di atas menunjukkan adanya rancangan khusus oleh pemerintah untuk melatih keterampilan pijat profesional bagi tuna netra, lengkap dengan fasilitas asrama untuk tempat tinggal peserta selama program berlangsung. Dalam pelatihan tersebut, peserta tidak hanya mendapatkan praktik langsung tetapi juga mempelajari teori-teori yang relevan, seperti anatomi tubuh, teknik pijat, hingga etika pelayanan. Setelah menyelesaikan pelatihan, mereka diberikan sertifikat resmi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 15 Sertifikat Pelatihan Pijat

Sumber: Data Temuan Lapangan

Berdasarkan pada gambar dapat kita ketahui bersama bahwa terdapat contoh sertifikat hasil pelatihan yang ditemukan oleh penulis. Di situ tertera sertifikat atas nama Irwanto yang menunjukkan bahwa ia telah menyelesaikan pelatihan rehabilitasi sosial di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra ‘Penganti’, Temanggung, selama dua tahun (16 Agustus 2015-29 Desember 2017). Pelatihan ini mencakup berbagai aspek, seperti bimbingan fisik, mental, sosial, kecerdasan, keterampilan pijat (teori dan praktik), serta sosialisasi melalui praktik kerja lapangan.

Sertifikat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini mencatat hasil dengan nilai baik, menegaskan kompetensi nya sebagai terapis pijat profesional. Pelatihan semacam ini sejatinya tidak hanya membantu meningkatkan keterampilan, tetapi juga memberikan kepercayaan diri untuk menjalankan usaha pijat. Hal ini membuktikan bahwa dengan pelatihan yang tepat, tuna netra dapat mengembangkan keahlian-nya menjadi mandiri secara ekonomi.

Dinsos PMD juga melatih pelaku UMKM disabilitas untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai alat pemasaran. Hal ini terungkap dalam wawancara sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya yang menyebutkan pelaku UMKM didampingi untuk belajar menggunakan *platform e-commerce*, media sosial, dan *market place* guna menjangkau pasar yang lebih luas. Upaya ini dirancang untuk memastikan produk UMKM disabilitas dapat bersaing di pasar yang semakin modern dan berbasis teknologi.

Dinsos PMD yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial juga memberikan pelatihan kewirausahaan dan modal usaha kepada tujuh penyandang disabilitas melalui Sentra Terpadu Kartini di Temanggung. Program ini memiliki tujuan meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas. Salah satu penerima manfaat adalah Mashuri, yang kini mengembangkan usaha batik setelah pelatihan. Mashuri memproduksi batik tulis, batik ciprat, hingga batik cabut warna. Sebagaimana mana dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Ket [Foto]: Kemensos Beri Pelatihan dan Modal Usaha Disabilitas

#### Kemensos Beri Pelatihan dan Modal Usaha Disabilitas

Minggu, 19/02/2023 19:58 WIB Lainnya Temanggung 548 0

Temanggung, Media Center - Sebanyak tujuh disabilitas asal Kabupaten Wonosobo mendapat pelatihan dan modal usaha dari Sentra Terpadu Kartini Temanggung.

Ketua Pokja Penyaluran Sentra Terpadu Kartini, Agustin Phone Hastuti dalam siaran pers, di Temanggung, Minggu (19/2/2023) mengatakan, dari ketujuh penerima manfaat tersebut mendapat bantuan kewirausahaan dan pemenuhan hidup layak total senilai Rp 26.969.000.

"Kegiatan penyaluran ini merupakan kegiatan rutin, Sentra Terpadu Kartini bagi penerima manfaat yang selesai menerima layanan Asisten Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Berbasis Residensial Sentra Terpadu Kartini di Temanggung," katanya.

Kepala Dinas Sosial Wonosobo, Harti menyampaikan terima kasih, karena penyandang disabilitas dari Wonosobo telah difasilitasi pelatihan dan usaha. Pihaknya berkomitmen akan mengawali dan mendampingi kelangsungan usaha penerima manfaat tersebut.

Gambar 16 Pelatihan Kewirausahaan dari Dinsos

Sumber:

[https://mediacenter.temanggungkab.go.id/frontend/d\\_berita/5](https://mediacenter.temanggungkab.go.id/frontend/d_berita/5)

Melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kapasitas penyandang disabilitas dapat diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Dinsos PMD dan Disdagkop UKM telah melaksanakan berbagai program pelatihan yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan kapasitas berwirausaha penyandang disabilitas.

Pelatihan ini terbagi dalam tiga kategori utama: teknis sesuai bidang usaha, pemasaran digital, dan pelatihan strategis seperti literasi keuangan.

Melalui kerja sama dengan lembaga seperti Sentra Terpadu Kartini dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, program-program ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis tetapi juga sertifikasi resmi untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kompetensi peserta. Hasilnya, pelatihan ini telah membantu penyandang disabilitas mengembangkan usaha mereka, seperti produksi batik dan jasa pijat profesional.

Temuan ini, khususnya pada apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo sama dengan apa yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat pada penelitian yang dilakukan (Ilham et al., 2024) berjudul ‘Pemetaan Jaringan Pendukung Transformasi Bisnis Digital Pada UMKM Disabilitas Indonesia: Analisis Stakeholder Komprehensif’ mengidentifikasi dan memahami peran dan interaksi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendukung UMKM.

Pemerintah berperan membuat regulasi yang mendukung UMKM Disabilitas dan menyediakan penyediaan pelatihan sekaligus dukungan finansial. Kendala yang dihadapi adalah rumitnya birokrasi dan koordinasi antar lembaga. Sementara peranan dari organisasi non-profit memberikan dukungan dan advokasi dalam bentuk pelatihan kewirausahaan maupun dukungan mental yang sama juga dengan yang dilakukan oleh Ikatan Disabilitas Wonosobo.

Dari perspektif *Collaborative Governance Regime*, berbagai langkah pelatihan dan peningkatan kapasitas yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Sosial dan Disdagkop UKM menunjukkan adanya *principled engagement* dalam bentuk komitmen kebijakan yang konsisten, *shared motivation* untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif, serta *capacity for joint action* yang diwujudkan melalui kerja sama lintas lembaga.

Pemerintah daerah tidak hanya menjalankan perannya sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga secara aktif memfasilitasi pelatihan teknis, strategis, dan digital yang relevan dengan kebutuhan riil penyandang disabilitas. Kehadiran program sertifikasi resmi, penguatan kapasitas manajerial, hingga fasilitasi akses modal menunjukkan bahwa kolaborasi lintas aktor pemerintah daerah, pemerintah provinsi, lembaga pelatihan, dan mitra komunitas telah terjalin dalam kerangka tata kelola kolaboratif yang cukup solid.

Meski demikian, hasil analisis ini juga mengindikasikan bahwa keberlanjutan dampak pelatihan masih sangat dipengaruhi oleh efektivitas koordinasi antarinstansi, kesinambungan pendampingan, dan kesiapan penyandang disabilitas untuk memanfaatkan peluang pasar yang semakin kompetitif. Dalam konteks *Collaborative Governance*, hal tersebut menjadi tantangan sekaligus peluang penguatan *capacity for joint action* agar dampak pemberdayaan tidak berhenti pada tahap pelatihan saja, tetapi benar-benar terinternalisasi dalam praktik usaha sehari-hari.

b) Peningkatan Akses dan Promosi Produk

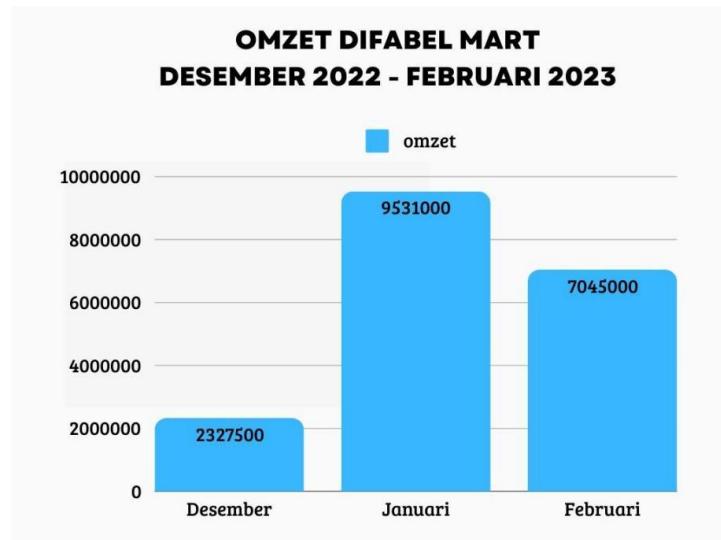
Peningkatan akses pasar dan promosi produk merupakan aspek krusial dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Strategi ini mencakup inisiatif pemasaran, keterlibatan pemerintah dalam memperluas jaringan pasar, dan peran sektor swasta melalui CSR. Hal ini juga sedikit banyak telah dijabarkan pada bab sebelumnya, berikut adalah penjabaran detail terkait dengan upaya tersebut.

Difabel Mart, yang dikelola oleh Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) yang juga dibantu oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo, menjadi pusat promosi dan penjualan produk UMKM disabilitas. Tempat ini tidak hanya berfungsi sebagai toko oleh-oleh khas Wonosobo, tetapi juga simbol pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Sebagaimana terkait dengan testimoni pengunjung pada Difabel Mart juga

telah diberikan pada bab sebelumnya yang mana menunjukkan kesan positif. Dalam hal ini dapat dikatakan Difabel Mart dapat menjadi sentra pemasaran.

Difabel Mart yang berlokasi strategis di kawasan Taman Rekreasi Kalianget, diketahui memanfaatkan tingginya arus wisatawan yang menggunakan bus sebagai peluang pasar. Dengan produk yang ditawarkan beragam, seperti makanan ringan keripik talas, sale pisang, dan camilan khas lainnya. Kemudian, ada juga kerajinan tangan, seperti batik dan aksesoris, ditambah layanan jasa pijat yang dijalankan oleh penyandang tuna netra. Hal ini menciptakan nilai tambah karena memberikan pengalaman unik bagi wisatawan yang berkunjung.

Difabel Mart berfungsi sebagai ‘etalase’ yang memperkenalkan potensi kreatif penyandang disabilitas kepada masyarakat luas. Inisiatif ini menunjukkan bahwa produk dari UMKM disabilitas tidak hanya layak konsumsi tetapi juga memiliki daya saing. Lebih dari itu, Difabel Mart berperan sebagai medium edukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung UMKM disabilitas, menjadikannya model bisnis yang inklusif. Dari temuan penelitian, diketahui bahwa omzet dari Difabel Mart sebagai berikut ini.



Gambar 17 Omzet Difabel Mart 2022-2023

Sumber: Data Temuan Lapangan dari Difabel Mart

Gambar omzet Difabel Mart dari Desember 2022 hingga Februari 2023, terdapat fluktuasi yang mencerminkan dinamika penjualan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk inisiatif yang dilakukan oleh Difabel Mart dan potensi waktu operasional. Pada Desember 2022, omzet Difabel Mart tercatat paling rendah dibandingkan dua bulan berikutnya. Periode Desember sering kali dipengaruhi oleh momen liburan akhir tahun, tetapi mungkin Difabel Mart belum secara maksimal memanfaatkan potensi wisata yang datang ke kawasan Wonosobo.

Selain masih tergolong baru, pengelolaan yang kurang maksimal, pada bulan Januari mencatat puncak omzet sebesar Rp. 9.531.000. Hal ini menunjukkan peningkatan yang

signifikan dibandingkan Desember, dengan kenaikan lebih dari 300%. Adapun dengan adanya beberapa kunjungan dan studi banding, termasuk pelaksanaan program-program pelatihan dan promosi yang telah dimulai pada bulan sebelumnya menunjukkan trend positif atau dampak nyata.

Penurunan omzet kembali terjadi pada bulan Februari dibandingkan Januari, namun angka Rp. 7.045.000 tetap lebih tinggi dibandingkan Desember. Hal ini disebabkan oleh menurunnya arus wisatawan pasca liburan akhir tahun. Kemudian promosi atau aktivitas pemasaran pada bulan Februari memang tidak seagresif pada bulan Januari. Dari sini dapat kita lihat artinya ada potensi untuk pengembangan dilakukan melalui Difabel Mart

Gambar di atas juga menunjukkan bahwa keberadaan Difabel Mart mampu mendorong peningkatan pendapatan UMKM disabilitas, terutama ketika pemasaran dilakukan secara efektif. Lonjakan omzet di Januari 2023 memperlihatkan bahwa kombinasi lokasi strategis, inisiatif promosi, dan optimalisasi digital mulai menunjukkan hasil. Dengan dukungan pemasaran digital, produk UMKM disabilitas berpeluang menjangkau pasar yang lebih luas, yang kemungkinan besar juga berkontribusi pada peningkatan omzet.

Keterlibatan IDW dalam pengelolaan Difabel Mart dan juga fasilitasi dari Pemerintah maupun sektor swasta memberikan dampak pada kesejahteraan UMKM disabilitas, terutama dalam aspek penjualan produk. Dukungan tersebut

tidak hanya memberikan akses pasar yang lebih luas melalui tempat pemasaran strategis dan pelatihan digital, tetapi juga memperkuat kapasitas para pelaku usaha disabilitas untuk bersaing di pasar semakin kompetitif.

Selain itu, program kemitraan dengan perusahaan swasta melalui inisiatif tanggung jawab perusahaan (CSR) turut membantu memperluas jaringan distribusi produk serta memberikan nilai tambah melalui kampanye promosi. Dengan kolaborasi ini, UMKM disabilitas mampu meningkatkan omzet, mengembangkan kualitas produk, serta memperkuat keberlanjutan usaha mereka dalam jangka panjang.

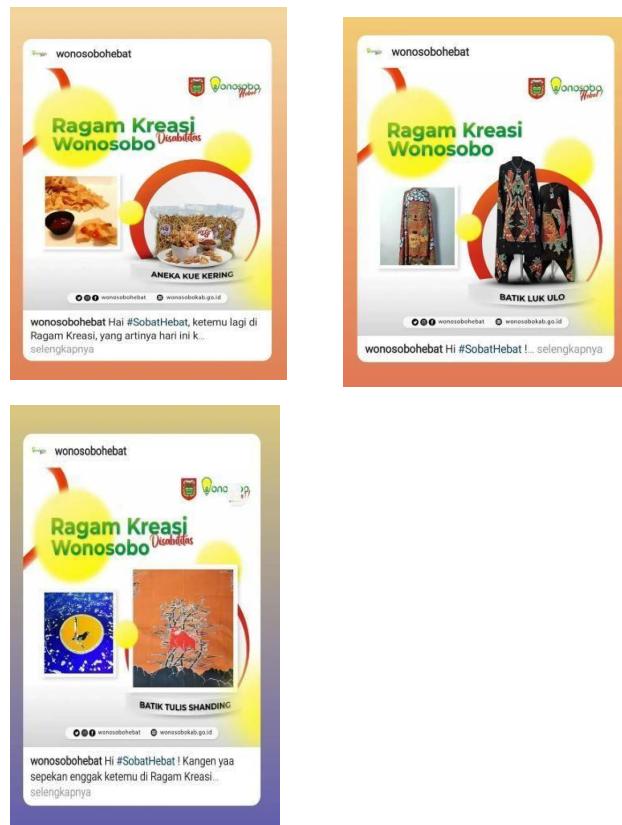
### **Bantu Promosikan Produk UMKM Wonosobo, Pemkab Luncurkan Platform Ayo Promo**

Wahyu Tri Atmojo – Rabu, 18 Oktober 2023 | 18:29 WIB



**Gambar 18 Platform Digital UMKM  
Wonosobo**

Berdasarkan pada gambar di atas Pemerintah Kabupaten Wonosobo meluncurkan platform “Ayo Promo” sebagai upaya membantu mempromosikan produk-produk UMKM di Kabupaten Wonosobo. Platform ini diluncurkan pada 18 Oktober 2023 dan bertujuan untuk memperluas akses pemasaran produk lokal ke pasar yang lebih luas. Platform ini menjadi solusi bagi pelaku UMKM, termasuk UMKM disabilitas, untuk memperkenalkan produk secara lebih efektif melalui media digital.



Gambar 19 Promosoi Produk UMKM Disabilitas pada Platform Online

Berdasarkan pada gambar di atas postingan tersebut menampilkan produk-produk UMKM disabilitas yang ada di Kabupaten Wonosobo dengan tema “Ragam Kreasi Wonosobo Disabilitas”. Konten seperti ini adalah bagian dari kampanye promosi yang rutin dilakukan melalui platform digital resmi Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Tujuannya adalah meningkatkan visibilitas produk lokal yang dihasilkan oleh pelaku usaha penyandang disabilitas.

Dengan adanya dukungan ini, UMKM disabilitas tidak hanya mendapatkan akses pasar yang lebih luas, tetapi juga penguatan kapasitas melalui pelatihan digital dan fasilitasi pemasaran. Inisiatif tersebut mencerminkan strategi inklusif dan berkelanjutan dalam mendorong kemandirian ekonomi pelaku usaha disabilitas, sekaligus mendidik masyarakat untuk lebih mendukung produk lokal.

Temuan seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo dengan ‘*Platfrom*’ online untuk mendukung adanya akses pasar bagi produk UMKM disabilitas sama halnya Penelitian oleh (Sariani et al., 2024) yang berjudul ‘UMKM Go- International: Pembuatan Video Profil Bilingual Sebagai *Branded-Content* Silvia Piobang *Handycraft*’.

Dalam penelitian ini yang dilakukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Deperindag) Provinsi Sumatera Barat dan Dinas Koperasi dan UMKM (Diskopukm) Kota Padang terhadap UMKM Binaannya, yakni Silvia Piobang *Handycraft* melalui strategi pemasaran konten dan

kesadaran merek dengan pembuatan video profil bilingual.

Dari perspektif *Collaborative Governance Regime*, upaya peningkatan akses pasar dan promosi produk bagi UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo menunjukkan adanya tiga komponen penting yang saling melengkapi. Pertama, *principled engagement* tampak jelas dalam komitmen berbagai aktor pemerintah daerah, organisasi penyandang disabilitas, dan sektor swasta untuk secara bersama-sama menciptakan ruang pemasaran yang inklusif. Peran IDW sebagai pengelola Difabel Mart mencerminkan konsistensi nilai bersama (*shared principles*) dalam mewujudkan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas.

Kedua, *shared motivation* tercermin dari semangat kolaboratif yang terus dibangun. Pemerintah daerah menyediakan platform digital “Ayo Promo”, sementara organisasi difabel aktif memanfaatkan kesempatan promosi di media sosial dan berbagai pameran. Inisiatif ini menunjukkan adanya tujuan bersama untuk memperluas jangkauan pasar sekaligus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung produk lokal hasil karya penyandang disabilitas.

Ketiga, *capacity for joint action* terwujud dalam pengelolaan Difabel Mart sebagai etalase produk UMKM disabilitas yang tidak hanya melibatkan IDW, tetapi juga mendapatkan dukungan CSR perusahaan swasta. Sinergi ini memperlihatkan penggabungan sumber daya publik dan privat yang mampu menciptakan inovasi pemasaran dan peluang distribusi yang lebih luas.

Temuan fluktuasi omzet Difabel Mart selama tiga bulan pengamatan membuktikan bahwa keberhasilan pemasaran sangat dipengaruhi efektivitas kolaborasi lintas pihak. Meski masih terdapat ruang penguatan, seperti optimalisasi promosi digital dan diversifikasi pasar, capaian sementara ini menjadi bukti nyata bahwa model kolaborasi multipihak dapat meningkatkan visibilitas sekaligus keberlanjutan usaha penyandang disabilitas.

Secara keseluruhan, rangkaian strategi ini tidak hanya membantu menciptakan akses pasar yang lebih adil dan inklusif, tetapi juga membangun fondasi tata kelola kolaboratif yang mendukung terwujudnya kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

### c) Penguatan Kelembagaan dan Dukungan Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberdayaan penyandang disabilitas melalui kelembagaan dan penerapan kebijakan yang mendukung keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) disabilitas. Langkah-langkah strategis yang telah diambil mencakup pengembangan organisasi disabilitas, kolaborasi lintas sektor, serta perumusan kebijakan yang inklusif.

Dukungan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Wonosobo tidak terlepas dari peraturan perundang-undangan yang ada. Sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 20 Dukungan Kebijakan Disabilitas

Berdasarkan pada gambar “Dasar Hukum” di atas yang berisi tiga peraturan hukum terkait penyandang disabilitas, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah Hak Asaasi Manusia.

Ketiga dasar hukum tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara umum tetapi juga memberikan landasan kuat untuk pemberdayaan ekonomi, khususnya bagi UMKM disabilitas. Dengan adanya payung hukum yang jelas, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk memastikan UMKM disabilitas dapat berkembang dan berdaya saing. Hal ini diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi serta mengurangi kesenjangan sosial yang masih dihadapi oleh para pelaku UMKM disabilitas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan bekerja, berwirausaha, dan memperoleh akses terhadap program pengembangan ekonomi. Hal ini menjadi dasar bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menyediakan pelatihan keterampilan, akses modal usaha, dan fasilitas penunjang bagi UMKM yang dikelola oleh penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas berfokus pada perlindungan hak-hak penyandang disabilitas di Wonosobo, termasuk hak ekonomi. Dengan adanya Perda ini, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas pemasaran, pendampingan usaha, dan akses terhadap pasar bagi UMKM disabilitas. Dukungan ini membantu penyandang disabilitas mengembangkan usaha mereka secara berkelanjutan.

Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kabupaten Wonosobo Ramah HAM memperkuat komitmen Kabupaten Wonosobo dalam menciptakan lingkungan yang ramah bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam sektor ekonomi. Kebijakan ini membuka peluang bagi UMKM disabilitas untuk berpartisipasi dalam pameran, mendapatkan akses terhadap program bantuan ekonomi, dan menikmati fasilitas publik yang inklusif seperti Difabel Mart.

Penguatan kelembagaan ini lebih mendetailkan atas temuan penelitian dilakukan (Ilham et al., 2024) berjudul ‘Pemetaan Jaringan Pendukung Transformasi Bisnis Digital Pada UMKM Disabilitas Indonesia: Analisis Stakeholder Komprehensif’ mengidentifikasi dan memahami peran dan interaksi berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam mendukung UMKM.

Pemangku kepentingan dalam studi ini ditunjukkan secara umum seperti pemerintah, lembaga keuangan, organisasi non-profit, akademisi, asosiasi usaha, dan masyarakat. Masing-masing memiliki peranan dan kontribusi dalam mendukung UMKM berbasis disabilitas. Pemerintah berperan membuat regulasi yang mendukung UMKM Disabilitas dan menyediakan penyediaan pelatihan sekaligus dukungan finansial.

Bentuk regulasi sebagaimana dalam penelitian itu tidak dicantumkan contoh atau bentuknya seperti apa, justru temuan dalam penelitian penulis, Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah melakukan aksi sebagaimana dapat dilihat pada narasi sebelumnya dan contoh bentuk regulasi pada gambar 20.

Dari perspektif *Collaborative Governance Regime*, penguatan kelembagaan dan kebijakan di Kabupaten Wonosobo mencerminkan *principled engagement* yang kokoh karena semua aktor memiliki acuan hukum yang sama dalam bekerja sama. Adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015, dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tidak hanya menjadi fondasi legal, tetapi

juga memperkuat legitimasi tindakan kolaboratif antara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, dan mitra lain.

*Shared motivation* terlihat melalui konsistensi kebijakan yang mendukung kemandirian ekonomi penyandang disabilitas secara nyata, misalnya dengan menyediakan fasilitas Difabel Mart, alokasi stand khusus dalam pameran, dan program pendampingan usaha. Kebijakan inklusif ini memperlihatkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya bersikap responsif, tetapi proaktif menyiapkan ekosistem pemberdayaan yang komprehensif.

*Capacity for joint action* juga tercermin dalam bagaimana kebijakan daerah diimplementasikan melalui kerja sama lintas sektor. Pemerintah kabupaten bersama organisasi seperti Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) mengeksekusi program-program pelatihan, fasilitasi promosi, hingga penyediaan bantuan permodalan. Dengan demikian, regulasi yang ada tidak berhenti pada level normatif, melainkan ditransformasikan menjadi intervensi nyata yang berdampak pada UMKM disabilitas.

Temuan ini sejalan dengan kajian Ilham et al. (2024), yang menegaskan pentingnya sinergi multipihak dalam mendukung transformasi UMKM disabilitas. Namun, berbeda dari penelitian Ilham yang lebih banyak bersifat konseptual, penelitian ini menunjukkan bagaimana Kabupaten Wonosobo telah mempraktikkan dukungan regulasi secara konkret, lengkap dengan contoh-contoh kebijakan dan implementasinya

di lapangan.

Keseluruhan upaya penguatan kelembagaan dan kebijakan ini menjadi salah satu pilar utama *Collaborative Governance*, yang diharapkan dapat terus diperkuat dengan evaluasi rutin, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta adaptasi kebijakan sesuai kebutuhan penyandang disabilitas di masa mendatang.

## **2. Organisasi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Wonosobo**

Organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo, terutama Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) memainkan peran sentral dalam *collaborative governance* pengembangan UMKM disabilitas. Kedua organisasi ini tidak hanya menjadi wadah berkumpulnya komunitas penyandang disabilitas, tetapi juga aktor kunci dalam proses pemberdayaan sosial dan ekonomi.

### **a) Pengorganisasian dan Fasilitasi usaha**

Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) merupakan organisasi induk yang menaungi berbagai kelompok penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo, antara lain HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia), PERTUNI (Persatuan Tuna Netra Indonesia), dan GERKATIN (Gerakan Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia). Sejak berdiri, IDW telah memantapkan perannya sebagai penghubung komunitas penyandang disabilitas dengan pemerintah, sektor swasta, dan lembaga donor, sekaligus sebagai fasilitator penguatan

kapasitas individu dan kelompok usaha difabel.

Dalam wawancara, Ketua IDW menegaskan bahwa peran utama organisasi adalah memetakan potensi usaha anggota, mengoordinasikan kebutuhan pelatihan, serta memfasilitasi akses permodalan dan peluang pasar. Ia menjelaskan:

“... Peran kami lebih ke fasilitator. Kami mendata siapa yang sudah punya usaha, siapa yang mau mulai, lalu mengajukan ke dinas untuk pelatihan atau bantuan.”(Dokumen Transkip Wawancara, 17 September 2024)

Fungsi pengorganisasian ini dijalankan secara sistematis melalui pendataan rutin. Anggota didorong untuk mengisi formulir profil usaha dan mencantumkan jenis produk, kapasitas produksi, kebutuhan dukungan, serta hambatan yang mereka hadapi. Data tersebut menjadi dasar perencanaan program pendampingan maupun proposal kerja sama dengan mitra eksternal.

Sebagai organisasi yang memiliki visi memberdayakan penyandang disabilitas agar mandiri secara ekonomi, IDW secara aktif menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas. Salah satu kegiatan yang cukup signifikan adalah Pelatihan

Pemasaran dan *Public Speaking di Era Digital*, hasil kerja sama IDW dengan RTI International melalui program *Community Partnership Program (CPP)*. Kegiatan ini diikuti oleh 50 orang peserta pada tanggal 27–28 Juli 2024, dan fokus utamanya adalah membekali penyandang disabilitas dengan kemampuan memanfaatkan media digital untuk promosi produk, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam mempresentasikan usaha mereka. Gambar dokumentasi pelatihan ini telah ditampilkan pada bab sebelumnya.

Selain pelatihan digital, IDW juga rutin mengadakan pelatihan teknis yang relevan dengan jenis usaha para anggota. Misalnya, pelatihan pembuatan kerajinan tangan (seperti anyaman, aksesoris, dan batik), pengolahan produk pangan lokal seperti keripik, sale pisang, dan jajanan tradisional. Pelatihan-pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kualitas produksi sekaligus menumbuhkan kreativitas anggota agar mampu menciptakan keunggulan kompetitif di pasar lokal.

Tidak hanya berhenti pada aspek teknis, IDW juga memberi perhatian besar pada penguatan kapasitas manajerial dan pengelolaan usaha berbasis kelompok. Beberapa materi yang diberikan dalam pelatihan manajemen usaha mencakup penyusunan rencana bisnis sederhana, pengelolaan arus kas, strategi pemasaran, dan pengembangan kemitraan. Program ini dirancang agar para pelaku UMKM difabel dapat mengelola usaha secara lebih terstruktur, profesional, dan berkelanjutan.

Ketua HWDI, sebagai salah satu penggerak organisasi perempuan penyandang disabilitas, menekankan bahwa upaya-upaya ini menjadi bekal penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi, terutama bagi perempuan difabel yang selama ini masih terpinggirkan:

“... Saya ingin Difabel Mart dan usaha-usaha teman-teman jadi tempat belajar bersama. Kami ingin anggota bisa lebih percaya diri, lebih mandiri, tidak lagi hanya bergantung pada bantuan.” (Dokumen Transkip Wawancara, 17 September 2024)

Dalam menjalankan perannya, IDW kerap menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, baik pemerintah daerah, sektor swasta, maupun komunitas lokal. Contoh konkret kolaborasi ini adalah kerja sama dengan Baznas Kabupaten Wonosobo dalam mendukung penguatan usaha Difabel Mart, termasuk pelatihan, penguatan manajemen, dan pendampingan usaha. Sementara itu, sinergi dengan Dinas Sosial dan DisdagkopUKM membantu organisasi memperoleh akses lebih luas pada program pelatihan kewirausahaan, pameran produk, dan bantuan modal.

Selain program-program formal, IDW juga mengadakan pendampingan rutin berbasis komunitas, misalnya melalui pertemuan bulanan yang dilaksanakan secara bergiliran di rumah anggota atau di sekretariat organisasi. Dalam pertemuan ini, anggota difabel saling berbagi pengalaman, mendiskusikan tantangan usaha, hingga merancang langkah-langkah untuk mengoptimalkan pemasaran. Pendampingan semacam ini tidak

hanya memperkuat keterampilan praktis, tetapi juga memupuk solidaritas sosial yang menjadi fondasi penting keberhasilan usaha kelompok.

Peran pengorganisasian dan fasilitasi yang dijalankan oleh IDW mencerminkan dimensi *capacity for joint action* dalam kerangka *Collaborative Governance*. Artinya, organisasi ini mampu memadukan berbagai sumber daya yang tersedia—pengetahuan, jejaring, fasilitas, dan dukungan kebijakan—untuk menciptakan ekosistem pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

b) Pengelolaan Difabel Mart

Difabel Mart merupakan etalase utama produk UMKM disabilitas yang dikelola langsung oleh Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW). Meski memiliki struktur pengelolaan tersendiri, pengisian jabatan pengurus dan pengawasan aktivitas operasional tetap berada dalam koordinasi IDW sebagai organisasi induk. Hal ini memperlihatkan peran IDW tidak hanya sebagai pengelola unit usaha, tetapi juga sebagai penghubung strategis antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat konsumen dalam rantai nilai pengembangan ekonomi inklusif.

Difabel Mart berlokasi di kawasan wisata Taman Rekreasi Kalianget, yang merupakan salah satu area dengan kunjungan wisatawan cukup tinggi. Lokasi strategis ini memberikan keunggulan kompetitif bagi pemasaran produk-produk UMKM disabilitas. Produk yang ditampilkan di

antaranya keripik, sale pisang, aneka kerajinan, batik, hingga jasa pijat tuna netra. Keberagaman produk tidak hanya meningkatkan potensi pendapatan, tetapi juga menunjukkan kapasitas kreativitas penyandang disabilitas.

Sebagai pusat promosi, Difabel Mart telah mencatat pencapaian yang cukup signifikan. Berdasarkan data yang ditemukan penulis (*lihat pada Gambar 16*), omzet yang dicapai pada Januari 2023 sebesar Rp9.531.000. Angka tersebut menunjukkan potensi ekonomi yang besar dari inisiatif berbasis komunitas ini, meskipun pada bulan-bulan berikutnya omzet mengalami fluktuasi karena pengaruh faktor musiman dan strategi promosi yang belum optimal.

IDW tidak hanya mengelola operasional penjualan, tetapi juga menjalankan pelatihan mandiri terkait pemasaran, pengemasan, dan peningkatan kualitas produk. Pelatihan tersebut menjadi bagian dari strategi pemberdayaan ekonomi agar pelaku UMKM disabilitas mampu memproduksi barang lebih kompetitif di pasar lokal maupun digital. Ketua HWDI menjelaskan bahwa sejak awal pendirian Difabel Mart, gagasan utamanya adalah menciptakan sistem usaha yang profesional sekaligus ramah difabel:

“... Kami ingin Difabel Mart menjadi tempat yang bukan hanya sekadar jualan, tetapi juga tempat belajar bersama tentang pemasaran, pembukuan, sampai komunikasi publik.” (Dokumen Transkip Wawancara, 18 September 2024).

Dalam praktiknya, Difabel Mart berfungsi sebagai pusat distribusi sekaligus ruang edukasi publik. Banyak wisatawan, komunitas, hingga lembaga pendidikan yang datang tidak hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk belajar mengenai proses produksi yang dikelola oleh penyandang disabilitas. Hal ini semakin menguatkan citra positif produk difabel di Kabupaten Wonosobo.

Namun, pengelolaan Difabel Mart tidak lepas dari tantangan. Lokasi strategis di kawasan wisata juga memiliki konsekuensi, seperti ketergantungan pada musim liburan dan keterbatasan aksesibilitas fasilitas publik, misalnya toilet yang terlalu jauh bagi pengguna kursi roda. Ketua HWDI juga menuturkan bahwa sistem pencatatan masih dilakukan secara semi-manual, sehingga belum sepenuhnya efisien dan transparan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan manajemen berbasis digital dan peningkatan promosi yang lebih berkelanjutan.

Sebagai penghubung antara pelaku usaha dan pemerintah daerah, IDW memiliki peran advokasi yang signifikan dalam memastikan program bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Proses ini juga menunjukkan dimensi *principled engagement* dalam kerangka *Collaborative Governance*, yaitu dialog terbuka dan kesediaan semua pihak untuk menyepakati prioritas bersama.

Secara keseluruhan, Difabel Mart dapat dianggap sebagai model pemberdayaan ekonomi inklusif yang berpotensi direplikasi di daerah lain. Dengan dukungan berkelanjutan dari

pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil, keberadaan Difabel Mart menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kemandirian ekonomi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

c) Advokasi dan Jejaring Kolaborasi

Selain peran penguatan kapasitas dan pengelolaan Difabel Mart, organisasi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo menjalankan fungsi penting sebagai aktor advokasi kebijakan dan penjaga jejaring kolaborasi multipihak. Peran advokasi ini menjadi krusial untuk memastikan program pemerintah maupun dukungan sektor swasta sesuai dengan kebutuhan riil komunitas difabel.

Ketua IDW menegaskan bahwa peran utama organisasi bukan hanya sebagai pelaksana kegiatan teknis, tetapi juga sebagai penghubung antara komunitas difabel, pemerintah daerah, dan mitra swasta. Dalam wawancara, beliau menyampaikan:

“... Peran kami lebih ke fasilitator. Kami mendata siapa yang sudah punya usaha, siapa yang mau mulai, lalu kami ajukan ke dinas untuk pelatihan atau bantuan. Jadi tidak semua langsung dapat, tapi kami kawal supaya teman-teman difabel ada datanya.” (Dokumen Transkip Wawancara, 17 Desember 2024)

Fungsi advokasi tersebut dijalankan melalui keterlibatan aktif dalam forum-forum koordinasi. IDW bersama organisasi lain rutin diundang rapat koordinasi dengan Dinas Sosial dan Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kabupaten Wonosobo.

Dalam forum ini, organisasi menyampaikan usulan program, mengevaluasi bantuan yang telah berjalan, dan mendiskusikan peluang promosi produk. Ketua IDW menuturkan:

“... kalau ada rapat koordinasi kami diundang. Biasanya membahas program, anggaran, juga kalau ada pameran.”  
(Dokumen Transkip Wawancara, 17 Desember 2024)

Selain forum resmi, relasi informal dengan pejabat pemerintah juga terbangun cukup baik. Ketua PERTUNI memberi contoh perhatian personal yang ditunjukkan pejabat daerah:

“... Pak Kasatpol PP itu perhatian. Kalau ketemu kami, beliau langsung tanya kabar teman-teman tuna netra.”  
(Dokumentasi Transkip Wawancara, 19 September 2024)

Dalam pengembangan usaha, jejaring kolaborasi yang dijalin tidak terbatas pada pemerintah saja. HWDI, sebagai organisasi perempuan penyandang disabilitas, aktif menjalin kerja sama dengan sektor swasta, terutama CSR Bank Wonosobo yang terlibat dalam penguatan modal usaha dan pengelolaan Difabel Mart. Ketua HWDI menjelaskan:

“...Difabel Mart itu kami inisiasi dulu, lalu kerja sama dengan Pemda. Sekarang juga dibantu CSR Bank Wonosobo. Jadi sudah lintas-lintas pihak.” (Dokumen Transkip Wawancara, 18 September 2024)

Selain itu, organisasi disabilitas memanfaatkan jejaring media lokal untuk mendukung promosi produk dan kampanye publik. Ketua HWDI menuturkan:

“...kalau ada event besar kami biasa kontak wartawan supaya teman- teman diliput. Supaya masyarakat tahu produk kita.” (Dokumentasi Trankip Wawancara, 18 September 2024)

Di sisi lain, organisasi seperti GERKATIN menghadapi tantangan komunikasi bagi difabel tuli. Untuk mengatasi hambatan tersebut, mereka menjalin kolaborasi dengan organisasi lain yang dapat membantu menjembatani proses pendampingan:

“...kalau untuk UMKM difabel tuli, tantangannya di komunikasi. Jadi kami juga kadang minta bantuan teman dari organisasi lain supaya bisa menjelaskan.” (Dokumentasi Wawancara, 19 September 2024)

Dari perspektif *Collaborative Governance Regime*, aktivitas advokasi dan jejaring ini mencerminkan *principled engagement* dan *shared motivation*. Organisasi penyandang disabilitas tidak hanya pasif menunggu bantuan, tetapi secara aktif memastikan keberlanjutan program, menyuarakan kebutuhan komunitas, sekaligus membangun sinergi dengan mitra eksternal.

Namun, dinamika kolaborasi ini masih menghadapi tantangan regenerasi kader. Ketua HWDI mengungkapkan kekhawatiran tentang keberlanjutan kepemimpinan:

“...saya berharap generasi muda bisa lebih aktif, karena regenerasi ini yang agak sulit.” (Dokumentasi Transkip Wawancara, 18 September 2024)

Secara keseluruhan, peran advokasi dan jejaring kolaborasi organisasi disabilitas di Kabupaten Wonosobo menjadi fondasi penting bagi terciptanya tata kelola pengembangan UMKM difabel yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

### **3. Sektor Swasta, Media, dan Masyarakat**

Sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) memegang peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Kolaborasi antara sektor swasta dan komunitas difabel di Kabupaten Wonosobo telah memberikan kontribusi nyata dalam menyediakan sumber daya, membuka akses pasar, dan meningkatkan kapasitas pelaku UMKM disabilitas.

Salah satu kontribusi utama sektor swasta adalah penyediaan bantuan finansial untuk pengembangan infrastruktur pendukung, contohnya dukungan dari AirNav melalui CSR berupa dana sebesar Rp50.000.000 untuk pembangunan Difabel Mart. Toko ini menjadi pusat promosi, penjualan, sekaligus simbol pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Lokasi strategis Difabel Mart di kawasan wisata Taman Rekreasi Kalianget dimanfaatkan sebagai etalase produk, mulai keripik talas, sale pisang, batik, aksesoris, hingga layanan pijat tuna netra.

Selain itu, sektor swasta turut mendukung pelatihan keterampilan dan transformasi digital, seperti program pelatihan

pemasaran digital hasil kolaborasi RTI International bersama IDW, di mana peserta dilatih memanfaatkan marketplace dan media sosial. Pelatihan ini memperkuat kemampuan difabel dalam menjangkau pasar yang lebih luas dan membangun kepercayaan diri.



Gambar 21 Penerimaan CsR Bank Wonosobo

Dukungan serupa juga diberikan oleh Bank Wonosobo, lembaga keuangan daerah yang secara konsisten menjadikan UMKM disabilitas prioritas CSR. Seperti tergambar dalam dokumentasi penulis (Gambar 21), pada peringatan HUT ke-44 Bank Wonosobo, bantuan CSR disalurkan khusus untuk penyandang disabilitas yang bergerak di bidang usaha. Dalam wawancara, Penanggung Jawab Program CSR menyampaikan:

“... Tahun ini kita arahkan CSR untuk teman-teman difabel supaya mereka bisa terus produktif. Contohnya nanti kita ada rencana bantu yang membatik di Garung,

dengan pendampingan dan dana CSR dari kami. (Dokumentasi Transkip Wawancara, 26 September 2024)

Pendekatan CSR yang dilakukan Bank Wonosobo tidak hanya berfokus pada pendanaan, tetapi juga pendampingan usaha yang berkelanjutan, sehingga mendukung visi Pemda dalam meningkatkan ekonomi inklusif:

“... Program CSR ini bagian dari upaya kita mendukung Pemda dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk teman-teman difabel.”(Dokumentasi Transkip Wawancara, 26 September 2024)

Temuan ini menguatkan penelitian Pratiwi & Rahmi (2024) yang menunjukkan peran CSR PT Bio Farma dalam meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, dimana pola intervensi tidak hanya berupa bantuan dana tetapi juga pendampingan penguatan usaha. Selain sektor swasta, media lokal berperan penting sebagai agen promosi dan advokasi publik.

Media membantu mengangkat potensi UMKM disabilitas, menyuarakan kebutuhan, sekaligus mengubah persepsi masyarakat. Sebagaimana disampaikan Pimpinan Redaksi *Wonosobo Satu Menit*:

“... Lewat media lokal, saya berusaha angkat cerita-cerita mereka. Kadang saya bingung juga, apa cukup hanya dengan tulisan? Tapi saya percaya, kalau lebih banyak yang tahu, dukungan akan datang lebih besar.”( Dokumen Transkip Wawancara, 29 September 2024)

Media menjadi jembatan komunikasi antara UMKM, pemerintah, dan masyarakat. Namun tantangan tetap ada, seperti fasilitas publik yang belum inklusif. Kritik konstruktif pun muncul:

“... Fasilitas seperti toilet di Difabel Mart yang ramah disabilitas saja belum ada. Apa susahnya memperhatikan hal-hal kecil seperti itu?” (Dokumen Transkip Wawancara, 29 September 2024)

Dari sisi masyarakat konsumen, wawancara menunjukkan adanya tren positif. Konsumen mengapresiasi kualitas produk UMKM disabilitas dan menganggap pembelian bukan semata karena empati, melainkan karena produknya memang layak. Seorang konsumen menyatakan:

“Menurut saya, belanja dari UMKM disabilitas itu bukan karena kasihan, tapi karena mereka memang punya produk yang bagus.”(Dokumen Wawancara, 21 September 2024)

Namun, masih terdapat persepsi pembelian berbasis belas kasihan pada sebagian pembeli baru. Beberapa konsumen juga berharap produk lebih bervariasi dan kemasannya lebih menarik agar lebih kompetitif di pasar wisatawan.

Dalam perspektif *Collaborative Governance Regime*, sektor swasta, media, dan masyarakat menunjukkan tiga komponen penting: *Principled engagement*, yaitu komitmen bersama membangun ekonomi inklusif. *Shared motivation*, dalam bentuk kepedulian dan pengakuan terhadap potensi difabel.

*Capacity for joint action*, melalui pendanaan, promosi, dan penciptaan pasar suportif.

Temuan ini menunjukkan bahwa meski sudah ada kontribusi nyata, kolaborasi masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek regulasi, keberlanjutan pendampingan, dan penyediaan infrastruktur publik ramah difabel. Dengan sinergi antara CSR sektor swasta, promosi media, dan dukungan masyarakat, diharapkan UMKM disabilitas di Wonosobo semakin mandiri secara ekonomi, berdaya saing, dan mampu mengurangi kesenjangan sosial dalam jangka panjang.

## **B. Pola Interaksi dan Analisis *Collaborative Governance* dalam Pengembangan UMKM Disabilitas**

### **1. Pola Interaksi**

Pola interaksi dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo mencerminkan relasi yang bertingkat, mulai dari koordinasi kebijakan di tingkat pemerintah, praktik pendampingan di komunitas penyandang disabilitas, hingga kontribusi sektor swasta dan peran media dalam advokasi. Interaksi ini beragam intensitasnya, kadang bersifat formal terjadwal, kadang spontan karena inisiatif komunitas atau respons terhadap kebutuhan mendesak.

Pemerintah daerah berperan sebagai fasilitator utama, dengan Dinas Sosial dan DisdagkopUKM yang memimpin jalur kebijakan, pendanaan, dan kurasi produk.

Salah satu pejabat DisdagkopUKM menyebutkan:

“... Kalau pendampingan, kami lebih ke regulasi, bagaimana pelaku UMKM disabilitas ini bisa masuk ke pameran, difasilitasi permodalan, difasilitasi legalitas, dan kita kurasi produknya. Tetapi memang soal keberlanjutan, ya harus ada kolaborasi dengan dinas lain, organisasi disabilitas, dan juga pihak swasta.”(Dokumen Transkip Wawancara, 23 September 2024)

Interaksi formal ini diwujudkan melalui program pelatihan, pameran produk, dan penyediaan akses modal. Namun, sebagaimana pengakuan informan komunitas, relasi ini tidak selalu lancar:

“... Kadang pelatihannya banyak, tapi soal pemasaran itu kita masih bingung. Kalau mau daftar bantuan juga kadang informasinya telat atau harus nunggu lama.” (Dokumentasi Transkip Wawancara, 22 September 2024)

Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) memposisikan diri sebagai penghubung strategis antara pemerintah, penyandang disabilitas, dan sektor swasta. Ketua IDW menggambarkan peran tersebut:

“... Peran kami lebih ke fasilitator. Kami mendata siapa yang sudah punya usaha, siapa yang mau mulai, lalu mengajukan ke dinas untuk pelatihan atau bantuan.”(Dokumentasi Transkip Wawancara , 17 September 2024)

IDW juga mengelola Difabel Mart, yang diakui menjadi simpul interaksi multipihak. Difabel Mart tidak hanya

menjadi tempat penjualan produk, tetapi juga ruang bagi penyandang disabilitas untuk bertukar pengalaman, belajar pemasaran, dan menjalin hubungan dengan konsumen. Salah satu pelaku usaha menyebutkan:

“... Kalau di Difabel Mart, saya bisa ketemu teman-teman lain, jadi tahu produk mereka. Ada juga pelanggan yang jadi langganan tiap libur datang beli.”(Dokumen Transkip Wawancara, 17 September 2024)

Sektor swasta melalui CSR juga menjadi pilar interaksi penting. Bank Wonosobo tidak hanya menyalurkan dana CSR tetapi terlibat aktif dalam pendampingan usaha. Penanggung Jawab CSR Bank Wonosobo menekankan:

“Program CSR ini juga bagian dari upaya kita untuk mendukung Pemda dengan meningkatkan ekonomi masyarakat, termasuk teman-teman difabel.” (Dokumen Transkip Wawancara, 26 September 2024)

Kolaborasi sektor swasta terlihat lebih progresif karena disertai komitmen untuk penguatan kapasitas produksi dan literasi digital. Rencana mendukung pelatihan membatik di Garung, misalnya, menunjukkan keberlanjutan interaksi, bukan hanya bantuan sekali waktu.

Media lokal seperti Wonosobo Satu Menit memainkan peran advokasi dan publikasi yang signifikan. Pemimpin Redaksi mengatakan:

“... Lewat media lokal, saya berusaha angkat cerita-cerita mereka. Kadang saya bingung juga, apa cukup

hanya dengan tulisan? Tapi saya percaya kalau lebih banyak yang tahu, dukungan akan datang lebih besar.” (Dokumen Transkip Wawancara, 29 September 2024)

Interaksi media ini memperkuat eksposur UMKM disabilitas, yang secara psikologis meningkatkan rasa percaya diri pelaku usaha. Media juga menjadi ruang kontrol sosial terhadap komitmen pemerintah:

“... Fasilitas seperti toilet di Difabel Mart yang ramah disabilitas saja belum ada. Apa susahnya memperhatikan hal-hal kecil seperti itu?” (Dokumen Transkip Wawancara, 29 September 2024)

Masyarakat konsumen pun berkontribusi menciptakan interaksi yang positif. Salah satu pelanggan setia Difabel Mart menyebutkan:

“... Saya sering beli sale pisang atau keripik di Difabel Mart. Rasanya enak, harganya juga wajar. Jadi kalau beli di situ rasanya ikut bantu teman-teman difabel.” (Dokumen Transkip Wawancara, 22 September 2024)

Hal ini menunjukkan pola interaksi berbasis solidaritas sosial, di mana konsumen tidak hanya membeli produk karena kualitas, tetapi juga karena nilai sosial yang terkandung di dalamnya. Namun, pola interaksi ini juga memiliki hambatan. Keterbatasan komunikasi lintas sektor menyebabkan inkonsistensi informasi, terutama dalam distribusi bantuan dan jadwal pelatihan. Salah satu anggota komunitas difabel mengeluhkan:

“... Informasinya sering terlambat, jadi yang bisa ikut pelatihan ya yang kebetulan dekat atau sering kontak dengan pengurus.” (Dokumentasi Transkip Wawancara, 22 September 2024)

Selain itu, koordinasi antar dinas juga belum sepenuhnya solid, yang berdampak pada keberlanjutan program. Pemerintah sendiri mengakui perlunya perbaikan tata kelola kolaborasi:

“... Mungkin nanti perlu semacam forum rutin, biar tidak jalan sendiri-sendiri.” (*Wawancara, 23 September 2024*)

Secara keseluruhan, pola interaksi dalam pengembangan UMKM disabilitas di Wonosobo memperlihatkan kolaborasi yang mulai terbentuk secara sistematis, meskipun belum sepenuhnya optimal. Model jejaring ini memiliki potensi kuat untuk diperluas melalui komunikasi yang lebih intensif, sistem informasi terpadu, dan evaluasi partisipatif. Dengan penguatan pola interaksi tersebut, kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM disabilitas yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan

## 2. Analisis *Collaborative Governance Regime*

Pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo memerlukan pendekatan yang kolaboratif antara pemerintah, komunitas disabilitas, dan sektor swasta. Dengan latar belakang tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, kolaborasi ini tidak hanya bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan tetapi juga menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan. *Model Collaborative Governance Regime (CGR)* menjadi kerangka analisis yang relevan untuk memahami dinamika kolaborasi, tindakan, serta dampak dan adaptasi yang dihasilkan.

Analisis ini akan menguraikan tiga elemen utama dalam CGR, yaitu dinamika kolaborasi, tindakan kolaborasi, dan dampak serta adaptasi hasil kolaborasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana berbagai pihak bekerja bersama untuk memberdayakan UMKM disabilitas, serta tantangan yang harus diatasi agar kolaborasi dapat memberikan manfaat jangka panjang.

a) Dinamika Kolaborasi

Dinamika kolaborasi merupakan aspek penting dalam model *Collaborative Governance Regime (CGR)*. Dalam konteks pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo, dinamika ini mencakup tiga elemen utama, yaitu *shared motivation, principled engagement, dan capacity for joint action*. Ketiga elemen ini saling terkait dan menjadi landasan keberhasilan kolaborasi antara pemerintah, komunitas disabilitas, dan sektor swasta.

1) *Shared Motivation*

*Shared motivation* terwujud dalam komitmen bersama berbagai pihak untuk mendukung pemberdayaan UMKM disabilitas. Pemerintah Kabupaten Wonosobo menunjukkan motivasi ini melalui kebijakan inklusif, seperti

pendirian Difabel Mart sebagai pusat pemasaran dan pelatihan. Difabel Mart menjadi simbol kolaborasi yang inklusif, melibatkan komunitas disabilitas dan sektor swasta.

Selain itu, sektor swasta seperti Bank Wonosobo dan AirNav Indonesia turut berkontribusi melalui berbagai program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, memberikan bantuan finansial dan pelatihan kepada pelaku UMKM disabilitas. Komunitas seperti Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) juga menunjang motivasi kuat dalam memberdayakan anggotanya dengan mengelola Difabel Mart dan menyediakan pelatihan yang relevan.

Kesatuan motivasi ini menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan UMKM disabilitas secara berkelanjutan. Namun, beberapa tantangan tetap ada, seperti perbedaan tingkat motivasi dan kapasitas antara pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah daerah sering menghadapi keterbatasan anggaran, sementara IDW dan sektor swasta terkadang memiliki prioritas yang berbeda. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan koordinasi yang intensif dan penguatan mekanisme dalam komunikasi.

## 2) *Principled Engagement*

*Principled engagement* dalam dinamika kolaborasi terlihat dari adanya komunikasi yang efektif dan dialog terbuka antara pihak-pihak yang terlibat. Pemerintah daerah, komunitas disabilitas, dan sektor swasta memiliki peran yang jelas dalam kolaborasi ini. Pemerintah bertindak sebagai fasilitator utama dengan menyediakan kebijakan

infrastruktur, seperti pameran UMKM dan *platform* digital “Ayo Promo”.

Komunitas disabilitas melalui IDW mengambil peran operasional dengan mengelola Difabel Mart dan menyelenggarakan pelatihan langsung kepada anggotanya. Di sisi lain, sektor swasta memberikan kontribusi strategis dalam bentuk bantuan pendanaan dan pelatihan teknis. Kejelasan peran ini mengurangi potensi konflik dan memastikan bahwa setiap pihak dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama.

Contoh konkret adalah pelatihan *digital marketing* yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan komunitas, dimana setiap pihak memberikan kontribusi sesuai bidang keahliannya. Meskipun demikian, kadang terjadi perbedaan visi dalam penentuan prioritas kegiatan kolaborasi. Oleh karena itu, dialog yang intensif dan penyelarasan tujuan harus terus dilakukan agar *engagement* dari setiap pihak tetap optimal.

### 3) *Capacity For Joint Action*

*Capacity for joint action* ditunjukkan oleh kemampuan berbagai pihak untuk berkontribusi sesuai kapasitasnya. Pemerintah Kabupaten Wonosobo telah mengadakan berbagai pelatihan keterampilan teknis dan manajerial bagi pelaku UMKM disabilitas. IDW, sebagai pengelola Difabel Mart, tidak hanya berperan dalam pemasaran tetapi juga memberikan pendampingan langsung

kepada anggotanya. Selain itu, sektor swasta memperkuat kapasitas kolaborasi dengan menyediakan bantuan dana, alat produksi, dan pelatihan teknis.

Kolaborasi ini menghasilkan program-program konkret seperti pelatihan membatik di Desa Maroon dan pelatihan pijat profesional di Temanggung. Dengan memadukan sumber daya pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, kapasitas untuk bertindak bersama menjadi semakin kuat. Namun, untuk memastikan kapasitas ini tetap terjaga, diperlukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program dan penyusunan rencana aksi yang lebih terintegrasi. Tanpa langkah ini, kolaborasi dapat kehilangan arah dan momentum.

b) Tindakan Kolaborasi

Tindakan kolaborasi mencakup implementasi program-program konkret yang melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuan pemberdayaan UMKM disabilitas. Di Kabupaten Wonosobo, tindakan ini diwujudkan melalui pelatihan, pendampingan, pemasaran, dan pengembangan infrastruktur.

1) Pelatihan dan Pendampingan

Pelatihan menjadi salah satu bentuk tindakan kolaborasi yang paling signifikan. Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Dinas Sosial dan Disdagkop UKM, secara rutin mengadakan pelatihan keterampilan teknis dan pemasaran digital. Contoh pelatihan yang berhasil dilakukan adalah pelatihan boga untuk pelaku UMKM di sektor

makanan seperti keripik singkong dan sale pisang.

Selain pelatihan teknis, pelatihan strategis seperti literasi keuangan dan strategi bisnis juga diberikan untuk meningkatkan kapasitas manajerial pelaku UMKM disabilitas. IDW memainkan peran penting dalam melaksanakan pelatihan berbasis komunitas, yang meliputi keterampilan teknis seperti *public speaking* dan pemasaran digital.

Pendampingan juga dilakukan oleh Pendamping UMKM dari Disdagkop UKM dan juga pendampingan intensif dilakukan oleh IDW. Pendampingan ini melibatkan kunjungan rutin ke lokasi usaha para pelaku UMKM disabilitas. Pendampingan ini mencakup evaluasi langsung terhadap keberlanjutan usaha serta pemberian saran untuk pengembangan produk dan pemasaran. Upaya ini membantu pelaku UMKM disabilitas merasa percaya diri dan termotivasi untuk terus meningkatkan usahanya.

## 2) Pemasaran dan Akses Pasar

Difabel Mart menjadi pusat pemasaran yang memberikan akses pasar yang lebih luas kepada UMKM disabilitas. Terletak di kawasan wisata strategis, Difabel Mart tidak hanya menjadi tempat penjualan tetapi juga simbol pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas. Pemerintah dan sektor swasta mendukung inisiatif ini dengan menyelenggarakan pameran dan *expo*, yang memungkinkan pelaku UMKM memamerkan produknya kepada khalayak lebih luas.

Inisiatif pemasaran digital juga dilakukan melalui platform seperti “Ayo Promo”, yang membantu UMKM disabilitas memanfaatkan teknologi untuk memasarkan produknya. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan dalam memperluas akses ke pasar nasional dan internasional. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pelatihan lanjutan yang mendalam terkait penggunaan teknologi digital untuk pemasaran.

### 3) Pengembangan Infrastruktur

Pemerintah Kabupaten Wonosobo mendukung pengembangan infrastruktur melalui pendirian Difabel Mart. Selain itu, program CSR dari sektor swasta, seperti bantuan dana dari Bank Wonosobo, turut berkontribusi pada pembangunan fasilitas yang mendukung kegiatan UMKM disabilitas. Namun, beberapa keterbatasan masih ada, seperti kebutuhan akan fasilitas yang lebih inklusif di Difabel Mart.

Infrastruktur pendukung lainnya, seperti alat produksi modern, juga menjadi fokus. Beberapa pelaku usaha mendapatkan bantuan alat dari program CSR untuk meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini menunjukkan bahwa pengembangan infrastruktur tidak hanya mencakup lokasi fisik, tetapi juga mencakup sarana yang mendukung operasional usaha.

### c) Dampak dan Adaptasi Hasil Kolaborasi

Dampak kolaborasi antara pemerintah, komunitas disabilitas, dan sektor swasta dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari berbagai aspek, baik positif atau negatif. Selain itu, adaptasi menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan hasil yang dicapai.

#### 1) Dampak Positif

Salah satu dampak utama adalah peningkatan pendapatan pelaku UMKM disabilitas. Data menunjukkan bahwa Difabel Mart berhasil meningkatkan omzet UMKM disabilitas, terutama pada bulan-bulan tertentu yang didukung oleh promosi dan pameran. Selain itu, pelatihan yang diberikan telah mampu membantu pelaku usaha meningkatkan kualitas produk dan memperluas jangkauan pasar.

Kolaborasi ini memberikan dampak sosial berupa penurunan stigma terhadap penyandang disabilitas. Masyarakat semakin mengenal dan menghargai kemampuan penyandang disabilitas dalam berwirausaha. Difabel Mart berfungsi sebagai etalase yang memperkenalkan potensi mereka kepada khalayak luas.

Selain itu, keterlibatan sektor swasta melalui program CSR membantu pelaku UMKM disabilitas mendapatkan akses ke peralatan modern, pelatihan lanjutan, dan pendampingan usaha yang berkelanjutan. Program ini

secara signifikan meningkatkan daya saing produk UMKM disabilitas.

## 2) Dampak Negatif dan Tantangan

Meskipun banyak pencapaian positif, kolaborasi ini juga menghadapi tantangan. Salah satunya adalah ketimpangan data antara Difabel Mart dan Disdagkop UKM, yang menyebabkan beberapa pelaku UMKM tidak mendapatkan akses merata ke program pelatihan dan pendampingan. Infrastruktur di Difabel Mart juga belum sepenuhnya inklusif, seperti fasilitas toilet ramah disabilitas yang masih belum tersedia.

Tantangan lainnya adalah kurangnya koordinasi antara pihak- pihak yang terlibat, yang terkadang tumpang tindih program atau pembagian peran yang tidak merata. Hal ini dapat memengaruhi efektivitas kolaborasi secara keseluruhan. Yang efeknya langsung kepada jalannya UMKM disabilitas yang belum memiliki pasar stabil atau sedang pada tahap merintis dalam persaingan pasar yang kompleks dan kompetitif.

## 3) Adaptasi Hasil Kolaborasi

Untuk mengatasi tantangan tersebut, langkah adaptasi terus dilakukan. Pemerintah berupaya meningkatkan sistem pendataan untuk mengintegrasikan pelaku UMKM yang belum terjangkau. Difabel Mart juga berfokus pada penguatan promosi digital untuk menarik lebih banyak pembeli dan meningkatkan kunjungan. Selain

itu, pemerintah dan komunitas disabilitas bekerja sama untuk memastikan bahwa program-program pelatihan dan pemasaran dapat menjangkau lebih banyak pelaku UMKM.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan inklusivitas dan keberlanjutan hasil kolaborasi. Kolaborasi lintas sektor yang lebih erat diperlukan untuk mengoptimalkan hasil yang telah dicapai. Dengan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan memperkuat koordinasi, kolaborasi ini dapat menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan.

Dengan pendekatan CGR, kolaborasi di Kabupaten Wonosobo telah menunjukkan potensi besar untuk mendukung pengembangan UMKM disabilitas. Meskipun tantangan masih ada, adaptasi yang dilakukan memastikan bahwa hasil yang dicapai dapat terus berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang. Hal ini juga menjadi landasan bagi penguatan model kolaborasi lintas sektor di masa depan, yang diharapkan dapat menciptakan ekosistem pemberdayaan yang lebih inklusif dan inovatif.

### **C. Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengembangan UMKM Disabilitas**

Pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo memerlukan dukungan kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, komunitas disabilitas, dan sektor swasta. Dalam upaya ini, terdapat berbagai faktor yang berperan sebagai pendukung maupun penghambat. Faktor pendukung seperti

dukungan kebijakan pemerintah, solidaritas komunitas disabilitas, dan kontribusi sektor swasta, memberikan dorongan signifikan untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha.

Namun, pengembangan ini juga menghadapi berbagai hambatan signifikan. Salah satu tantangan utama adalah masalah data disabilitas.

Perbedaan data mengakibatkan ketidak-efektifan program, karena tidak semua penyandang disabilitas terdaftar dan menerima perlakuan yang sama. Ada individu yang mendapat pelatihan dan dukungan, tetapi ada pula yang tidak tersentuh oleh program serupa. Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pengembangan UMKM disabilitas.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur, kurangnya akses informasi, dan stigma sosial juga menjadi penghambat utama. Hambatan-hambatan ini tidak hanya mempersulit penyandang disabilitas dalam mengembangkan usahanya. Tetapi juga memperlambat langkah menuju tercipta nya ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Wonosobo. Adapun secara rinci faktor-faktor pendukung dan hambatan dalam pengembangan UMKM disabilitas akan dibahas sebagai berikut ini:

### **1. Faktor Pendukung**

Faktor pendukung dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonoobo mencakup beberapa elemen penting yang mendorong keberhasilan upaya pemberdayaan penyandang disabilitas:

### a. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah memiliki peran strategis dalam menciptakan kebijakan yang mendukung menciptakan kebijakan yang mendukung inklusivitas penyandang disabilitas, terutama dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan ini tidak hanya bersifat makro, tetapi juga diwujudkan dalam bentuk program konkret seperti pelatihan, bantuan modal, serta penyediaan sarana pemasaran yang inklusif.

Pemerintah melalui dinas terkait, seperti Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM serta Dinas Sosial telah menyediakan berbagai program pelatihan yang bertujuan meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan pemasaran bagi penyandang disabilitas. Pelatihan ini mencakup aspek penting seperti pengelolaan usaha, peningkatan keterampilan produksi, dan pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan modal usaha yang di kerja samakan dengan pihak swasta atau pun antar pemerintah. Ini sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi bagi penyandang disabilitas. Bantuan ini dapat menjadi stimulan bagi UMKM disabilitas untuk dapat meningkatkan kapasitas produksi dan keberlanjutan usaha mereka. Sehingga juga dapat bersaing di pasar lokal maupun nasional dan tidak kalah dengan UMKM non disabilitas.

Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo juga menunjukkan komitmen nya terhadap inklusivitas melalui kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Salah satu kebijakan konkret yang mendukung UMKM disabilitas adalah pendirian Difabel Mart. Difabel Mart berperan sebagai wadah pemasaran yang memungkinkan produk-produk hasil karya UMKM disabilitas dapat lebih mudah di akses oleh masyarakat luas.

Keberhasilan kebijakan pemerintah dalam mendukung UMKM disabilitas juga tidak lepas dari kolaborasi dengan berbagai pihak, seperti sektor swasta dan komunitas disabilitas. Dukungan CSR dari Bank Wonosobo, misalnya, merupakan bagian dari sinergi antara pemerintah dan sektor swasta untuk mendorong inklusivitas serta peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Dukungan kebijakan pemerintah melalui program pelatihan, bantuan modal, pendirian wadah seperti Difabel Mart menjadi langkah konkret dalam mendorong inklusivitas penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Dengan adanya kebijakan yang berpihak dan program yang berkelanjutan, UMKM disabilitas memiliki peluang besar untuk berkembang secara mandiri dan berdaya saing di pasar lokal maupun nasional.

## b. Solidaritas Komunitas Disabilitas

Komunitas disabilitas memiliki peran krusial dalam mendukung pengembangan UMKM disabilitas melalui pendekatan berbasis solidaritas dan pemberdayaan. Salah satu contoh nyata adalah peran Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW), yang aktif dalam berbagai inisiatif pemberdayaan ekonomi dan penguatan kapasitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo.

IDW secara proaktif menyelenggarakan pelatihan yang berfokus pada peningkatan keterampilan dan kapasitas anggota komunitas disabilitas. Pelatihan dirancang dengan pendekatan inklusif dan mempertimbangkan kebutuhan spesifik para penyandang disabilitas. Program pelatihan yang diberikan oleh IDW seperti keterampilan teknis, pemasaran dan branding produk, dan manajemen usaha.

Pendekatan berbasis komunitas ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga menciptakan ruang aman bagi para penyandang disabilitas untuk belajar bersama, saling mendukung, dan bertukar pengalaman. Ruang ini menjadi tempat di mana individu merasa dihargai, dipahami, dan bebas berekspresi tanpa rasa takut akan stigma atau diskriminasi.

Solidaritas dalam IDW menjadi fondasi utama dalam membangun jaringan yang kuat diantara pelaku usaha disabilitas. Melalui wadah ini, anggota komunitas mendapatkan dukungan moral dan teknis yang sangat dibutuhkan. Seperti saling berbagai pengalaman, anggota

yang telah lebih sukses dulu berbagi pengalaman, tantangan, dan solusi kepada anggota lainnya. Hal ini membantu mengurangi rasa cemas dan meningkatkan motivasi dalam mengembangkan usaha.

Komunitas menjadi penghubung antara pelaku usaha disabilitas dengan pihak-pihak eksternal, seperti pemerintah, sektor swasta, maupun pasar potensial. Misalnya, IDW aktif memperkenalkan produk anggotanya ke acara pameran, bazar, atau *platform* daring. Selain itu, melalui kolaborasi internal, anggota komunitas dapat memberikan bantuan teknis dalam produksi maupun pengemasan produk, sehingga kualitas produk semakin meningkat.

Dukungan moral yang diberikan antar anggota komunitas menjadi salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam memperkuat semangat kewirausahaan. Penyandang disabilitas sering menghadapi hambatan mental dan stigma sosial yang menghambat produktivitas mereka. Melalui solidaritas komunitas, mereka mendapatkan rasa peningkatan kepercayaan diri, rasa kebersamaan, dan motivasi yang berkelanjutan.

Melalui interaksi positif dan dukungan moral, para anggota komunitas semakin percaya diri untuk menjalankan dan mengembangkan usahanya. Adanya rasa ‘senasib dan sepenanggungan’ di dalam komunitas menciptakan semangat kebersamaan untuk saling membantu dan mendorong satu sama lain. Melihat kesuksesan rekan-rekan sesama penyandang disabilitas memberikan motivasi

tambahan bagi anggota lain untuk tetap berkarya dan produktif.

Peran Ikatan Disabilitas Wonosobo sangat vital dalam mendukung pengembangan UMKM disabilitas. Melalui pelatihan berbasis komunitas, penguatan jaringan usaha, serta dukungan moral dan teknis, IDW berhasil menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyandang disabilitas untuk berkarya dan berwirausaha. Solidaritas yang terbangun di dalamnya menjadi penggerak utama dalam membangun kepercayaan diri, mengatasi hambatan, menciptakan peluang ekonomi.

c. Peran Sektor Swasta melalui CSR

Sektor swasta memegang peranan penting dalam upaya mendukung perkembangan UMKM disabilitas melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Keterlibatan pihak swasta menjadi salah satu bentuk kontribusi nyata dalam membantu penyandang disabilitas untuk dapat mandiri secara ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan hidup mereka. Program ini memberikan dukungan berupa pelatihan keterampilan, bantuan peralatan produksi, hingga dukungan pemasaran yang dirancang khusus memenuhi kebutuhan dan potensi UMKM disabilitas.

Salah satu contoh nyata dukungan dari sektor swasta dapat dilihat melalui program CSR yang dilakukan oleh Bank Wonosobo. Bank daerah ini memiliki peran strategis dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat,

termasuk penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Dengan memanfaatkan dana CSR, Bank Wonosobo memberikan bantuan dana dan pendampingan usaha kepada kelompok disabilitas yang memiliki keterampilan membatik di wilayah Garung,

Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produktivitas usaha membatik yang dikelola oleh para difabel, sehingga mereka mampu mengembangkan bisnis dan memperluas pasar. Selain itu, pendampingan yang diberikan bertujuan untuk memastikan keberlanjutan usaha agar tetap berjalan dan mampu bersaing di pasar lokal maupun nasional. Tidak hanya itu, perusahaan seperti AirNav dan lembaga seperti Baznas juga turut memberikan kontribusi yang signifikan .

AirNav, sebagai salah satu institusi yang peduli terhadap perkembangan ekonomi masyarakat, menyelenggarakan program pelatihan keterampilan usaha. Pelatihan ini dirancang untuk meningkatkan kompetensi para pelaku UMKM disabilitas, baik dalam hal ketrampilan teknis produksi maupun manajemen usaha. Selain pelatihan, Baznas memberikan bantuan berupa peralatan produksi seperti mesin jahit alat cetak, dan berbagai peralatan lain yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan usaha para penyandang disabilitas.

Dukungan dari sektor swasta tidak berhenti hanya pada bantuan materil dan pelatihan. Media lokal turut memainkan peran penting dalam mempromosikan produk-

produk yang dihasilkan oleh UMKM disabilitas. Melalui publikasi dan pemberitaan di berbagai platform, media membantu memperkenalkan produk-produk tersebut kepada masyarakat luas. Promosi ini menjadi jembatan yang menghubungkan antara produsen, dalam hal ini penyandang disabilitas, dengan konsumen yang lebih luas.

Selain itu, pameran dan bazar yang sering di fasilitasi oleh perusahaan maupun lembaga swasta memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM disabilitas untuk memamerkan dan memasarkan produk mereka secara langsung. Dengan demikian, dukungan dari media dan kegiatan pameran turut membantu meningkatkan daya saing produk UMKM disabilitas. Dari sisi keberlanjutan, program CSR yang dilakukan oleh sektor swasta tidak hanya memberikan dampak sesaat, tetapi juga mendorong adanya transformasi ekonomi yang berkelanjutan bagi penyandang disabilitas.

Melalui program pelatihan yang konsisten dan pendampingan usaha, penyandang disabilitas dibekali dengan keterampilan baru yang relevan dengan kebutuhan pasar. Hal ini memberikan peluang yang lebih besar bagi mereka untuk mengelola usaha secara profesional dan mandiri. Dukungan berupa bantuan peralatan juga memberikan kemudahan dalam proses produksi, sehingga mereka dapat meningkatkan efisiensi dan kualitas produk.

Selain itu, adanya kolaborasi antara sektor swasta dengan pemerintah daerah semakin memperkuat ekosistem pengembangan UMKM disabilitas. Kebijakan pemerintah yang mendukung inklusivitas dan pengetasan kemiskinan menjadi dasar sinergi antara kedua pihak. Program CSR dari sektor swasta menjadi salah satu bentuk dukungan terhadap visi pemerintah daerah dalam menciptakan peluang ekonomi yang lebih merata, termasuk bagi kelompok disabilitas.

Sinergi ini juga membantu mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas seperti keterbatasan akses terhadap pelatihan, pendanaan, dan pasar. Peran komunitas disabilitas dalam hal ini juga tidak dapat diabaikan. Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) berperan sebagai jembatan antara pelaku usaha disabilitas dengan berbagai pihak yang memberikan dukungan. IDW secara aktif menginisiasi program pelatihan berbasis komunitas, penguatan jaringan antar pelaku usaha, serta advokasi untuk menyuarakan aspirasi penyandang disabilitas.

Kolaborasi yang terjalin antara komunitas disabilitas, sektor swasta, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan dalam mendukung pengembangan UMKM disabilitas. Secara keseluruhan, keterlibatan sektor swasta melalui program CSR telah memberikan kontribusi yang nyata dalam mendukung pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Program pelatihan, bantuan peralatan, dan dukungan pemasaran menjadi langkah

konkret yang membantu meningkatkan kapasitas dan daya saing usaha penyandang disabilitas.

## **2. Faktor Hambatan**

Meskipun pemerintah, komunitas disabilitas, dan sektor swasta telah memberikan dukungan, terdapat berbagai hambatan signifikan yang masih menghalangi pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Hambatan struktural dan teknis juga masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Salah satu kendala utama yang ditemukan adalah keterbatasan anggaran, yang memerlukan pendekatan kreatif dalam melaksanakan program pemberdayaan.

Hambatan-hambatan ini tidak hanya bersumber dari faktor eksternal seperti keterbatasan infrastruktur dan stigma sosial tetapi juga dari permasalahan internal seperti perbedaan data pelaku UMKM disabilitas yang berdampak pada tidak merata nya akses terhadap program pelatihan, pameran, dan bantuan lainnya. Untuk dapat dilihat secara rinci maka akan dijelaskan seperti berikut ini:

a. Keterbatasan Anggaran dan Kreativitas Pelaksanaan Program

Salah satu hambatan terbesar adalah anggaran yang kecil seperti pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM. Hal ini menyebabkan terbatasnya pelaksanaan program-program spesifik untuk disabilitas, seperti pelatihan berkelanjutan atau keikutsertaan dalam pameran di luar

daerah. Contohnya, dalam wawancara dengan pihak dinas, disebutkan bahwa *expo* UMKM di Kabupaten Wonosobo hanya bisa terlaksana karena lobi ke kementerian untuk mendatangkan kegiatan tersebut.

Pemerintah daerah tidak memiliki anggaran khusus *expo*, sehingga harus memanfaatkan kreativitas untuk memastikan kegiatan tetap berjalan. Sebagaimana disampaikan seperti berikut ini:

“... Kenapa mereka harus diptoteksi secara khusu? Kongkritnya begini, komitmen pemerintah daerah selalu meningat disabilitas. Tetapi, anggaran kami kecil. Kami tidak punya dana untuk *expo* di luar. Jadi, kami lobby kementerian agar kegiatan diselenggarakan di Wonosobo tanpa pemda mengeluarkan duit, dan kami memberikan satu stand khusus untuk disabilitas.” (Dokumentasi Wawancara, 23 September 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kreativitas dalam memanfaatkan peluang menjadi solusi sementara untuk memastikan kegiatan tetap berjalan, meski dengan keterbatasan anggaran. Pengalaman salah satu disabilitas yang bergerak dalam bidang jasa pun demikian:

“... Awalnya kami ikut program pemerintah. Ada insentif biaya untuk hidup, tapi tidak cukup untuk dua tahun penuh. Jadi, kami mencari tambahan dengan cara memijat guru atau karyawan disana. Dari hasil itu, kami bisa bertahan hidup sampai selesai pelatihan dan menjadi profesional.” (Dokumentasi Wawancara, 23 September 2024)

Pernyataan ini mencerminkan keterbatasan sistemik dalam pendanaan program pelatihan jangka panjang bagi

penyandang disabilitas. Meskipun pelatihan seperti yang diselenggarakan di Sentra Kartini memiliki fasilitas yang mendukung, seperti tempat tinggal dan akses pelatihan intensif, intesif biaya hidup yang terbatas memaksa peserta untuk mencari cara tambahan untuk bertahan hidup.

Pengalaman ini menunjukkan dua sisi. Di satu sisi, pelatihan ini memberikan kesempatan nyata bagi peserta untuk mengembangkan keterampilan dan menjadi mandiri secara profesional. Namun, di sisi lain, keterbatasan anggaran memengaruhi kenyamanan dan keberlanjutan peserta selama masa pelatihan. Jika dukungan anggaran lebih memadai, peserta seperti ini dapat fokus sepenuhnya pada pembelajaran tanpa harus memikirkan cara memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Konteks ini juga memberikan gambaran bahwa program pemerintah memerlukan perencanaan yang lebih ter integrasi, terutama dalam hal pendanaan yang berkelanjutan. Selain itu, pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan pelatihan seperti ini dapat berjalan dengan optimal dan tidak membebani peserta secara finansial.

Masalah pendanaan juga menjadi kendala besar bagi UMKM disabilitas untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas melalui pameran dan bazar. Pendamping UMKM mengungkapkan bahwa anggaran yang tersedia sering kali tidak cukup untuk menanggung biaya transportasi dan akomodasi para pelaku UMKM yang ingin

berpartisipasi dalam *event* tersebut. Seperti yang disampaikan seperti berikut ini.

“... Untuk mengikuti pameran dan bazar, mereka harus menanggung biaya transportasi dan akomodasi sendiri, meskipun kami sering membantu dengan memberikan subsidi. Tapi, terkadang, anggaran dari pemerintah terbatas.” (Dokumentasi transkip wawancara, 26 September 2024).

Keterbatasan anggaran ini membatasi partisipasi UMKM disabilitas dalam *event-event* besar yang sebenarnya memiliki potensi untuk memperkenalkan produk mereka ke pasar yang lebih luas. Terkait dengan hal ini, bila kita analisis lebih dalam menunjukkan bahwa tantangan ini tidak hanya soal pendanaan tetapi juga akses terhadap informasi mengenai sebuah *event* tersebut. Banyak pelaku UMKM disabilitas yang tidak mendapatkan informasi tepat waktu sehingga mereka tidak bisa mempersiapkan diri dengan baik.

#### b. Perbedaan Data Pelaku UMKM Disabilitas

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kurangnya pendataan terperinci terkait produk unggulan dari UMKM disabilitas. Bidang Koperasi dan UMKM menyadari pentingnya sistem pendataan khusus untuk memetakan potensi produk secara lebih akurat. Pada sesi wawancara dengan penulis, disampaikan seperti demikian.

“... Saat ini, data produk unggulan dari UMKM disabilitas belum ter dokumentasi secara detail, tetapi kami mengenal beberapa produk yang

potensial dari hasil pembinaan dan pelatihan yang sudah dilakukan. Contohnya, ada produk kerajinan tangan seperti batik hingga produk makanan ringan khas Wonosobo seperti keripik atau jajanan tradisional. Produk- produk ini sering kami fasilitasi dalam acara pameran atau bazar. Ke depannya, kami berencana membuat sistem pendataan khusus untuk produk-produk ini agar lebih mudah dipromosikan dan dikembangkan.” (Dokumentasi transkip wawancara, 23 September 2024).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun data produk unggulan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo belum ter dokumentasi secara rinci, Bidang Koperasi dan UMKM sudah mengidentifikasi beberapa produk potensial dari hasil pembinaan dan pelatihan yang telah dilakukan. Produk unggulan tersebut mencakup kerajinan tangan, seperti batik, hingga makanan ringan khas daerah, seperti keripik atau jajanan tradisional wonosobo. Produk-produk ini sering difasilitasi dalam kegiatan pameran atau bazar untuk memperluas jangkauan pasar.

Berikut adalah pembagian pelaku UMKM di Disdagkop UKM Kabupaten Wonsobo dan yang terdaftar di Difabel Mart (Ikatan Disabilitas Wonosobo) berdasarkan data yang didapatkan di lapangan.

**Tabel 4. 3 Keterdaftaran UMKM di Disdagkop UKM dan Difabel Mart**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Usaha</b>	<b>Terdaftar di Disfagkop UKM</b>	<b>Terdaftat di Difabel Mart</b>
1	Wardatiningsih	Aneka Kue Kering dan Snack	v	v
2	Nunung Sri Lestari	Batik	v	-
3	Umi Farhah	Keripik dan Sale Pisang	v	v
4	Jembar	Keripik Carica	v	v
5	Sunariyah	Keripik Singkong	v	v
6	Masruri	Batik	v	v
7	Arifin	Service HP	v	-
8	Badarohimah	Dawet	v	v
9	Ari	Batik	v	-
10	Waluyo	Roti	v	-
11	Saiful	Basreng	v	v
12	Nur Avina	Opak Ilat	v	-
13	Saminem	Keripik Kelapa, Peyek	-	v
14	Irwanto	Jasa Pijat	-	v
15	Bintoro	Jasa Pijat	-	v

16	Lastiyah	Jasa Pijat	-	v
17	Maryam Ramadani	Aksesoris	-	v
18	Ahmat Arifin	Kopi Arabica	-	v
19	Teguh	Kepikik Teri	-	v
20	Yuni Haryanto	Aneka Jamu Tradisional	-	v
21	Mahfud Hamzah	Kopi Robusta	-	v
22	Fuad	Rengginang	-	v
23	Tri Widayanti	Keripik Pisang, Singkong	v	v
24	Wawan Widiyanto	Mie Ayam	-	v

Sumber: Data Olahan 2024

Berdasarkan tabel di atas data pelaku UMKM yang terdaftar di Disdagkop UKM dan Difabel Mart (Ikatan Disabilitas Wonosobo) didapatkan beberapa pelaku UMKM tercatat di kedua lembaga, yakni Disdagkop UKM dan Difabel Mart. Mereka ini adalah Wardatiningsih, Umi Farhah, Jembar, Sunariyah, Masruri, Badarohimah, Saiful, Tri Widayanti. Tidak menjadi heran, apabila contoh kisah sukses bila dilapangan sering kali dari pemerintah menyebutkan Wardatiningsih. Baik dari Dinsos maupun Disdagkop UKM, itupun bisa ditelusur disegala media secara nasional.

Pelaku UMKM yang terdaftar di kedua lembaga ini sebagian besar merupakan pelaku usaha yang sudah cukup aktif dan memiliki usaha dengan jenis produk khas, seperti makanan ringan (keripik dan snack) serta batik. Hal ini

menunjukkan bahwa mereka mendapatkan perhatian dari lebih dari satu lembaga, yang berpotensi mendukung pertumbuhan usaha mereka.

Adapun pelaku UMKM disabilitas yang hanya tercatat di Disdagkop UKM seperti Nunung Sri Lestari, Arifin, Ari, Waluyo, dan Nur Avina merupakan pelaku UMKM yang kemungkinan besar belum teridentifikasi atau belum bergabung dengan komunitas di Difabel Mart. Jenis usaha mereka sebagian besar bergerak di sektor jasa (service HP dan usaha roti) atau batik. Tidak terdaftar nya mereka di Difabel Mart mungkin disebabkan sudah terfasilitasinya dengan dinas dan sudah memiliki pasar atau hadir sebelum Difabel Mart ada.

Pelaku UMKM yang hanya tercatat di Difabel Mart seperti Saminem, Irwanto, Bintoro, Lastiyah, Maryam Ramadani, Ahmat Arifin, Teguh, Yuni Haryanto, Mahfud Hamzah, Fuad, dan Wawan Widiyanto yang mana kelompok ini sebagian besar terdiri dari pelaku usaha yang bergerak di sektor jasa (pijat), makanan khas daerah (keripik dan rengginang), minuman (kopi), dan aksesoris.

Tidak terdaftar nya di Disdagkop UKM dapat menjadi indikasi adanya kesenjangan antara data yang dihimpun oleh Disdagkop UKM dan Difabel Mart. Hal ini juga menunjukan kemungkinan kurangnya integrasi atau koordinasi antara kedua lembaga dalam pendataan dan pembinaan UMKM. Ini menjadi titik lemah dari Disdagkop UKM, Pendamping UMKM, bahkan Dinsos yang tidak

punya data spesifik, dengan Ikatan Disabilitas Wonosobo.

Ketimpangan data antara Disdagkop UKM dan Difabel Mart dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti kriteria pendaftaraan, akses informasi, dan perbedaan fokus pembinaan. Disdagkop UKM mungkin lebih fokus pada UMKM yang sudah memiliki legalitas formal atau kinerja yang cukup baik, sedangkan Difabel Mart lebih terbuka pada pelaku UMKM disabilitas tanpa memperhatikan skala usaha.

Pelaku UMKM yang terdaftar di Difabel Mart kemungkinan memiliki akses informasi lebih terbatas terhadap program-program yang diselenggarakan oleh Disdagkop UKM, sehingga tidak terdaftar di lembaga tersebut. Disdagkop UKM mungkin lebih fokus pada sektor usaha strategis seperti batik dan kuliner modern, sementara Difabel Mart berfokus pada pelaku usaha disabilitas yang bergerak dalam sektor apa saja.

Perbedaan data ini menyebabkan ketidakmerataan akses terhadap program. Beberapa pelaku UMKM disabilitas melaporkan bahwa mereka tidak pernah dilibatkan dalam pelatihan atau program pemberdayaan, meskipun mereka sudah terdaftar di dinas sekali-pun. Salah satu pelaku UMKM mengatakan:

“... Saya tahu ada pelatihan-pelatihan, tetapi saya sendiri belum pernah ikut. Mungkin informasinya tidak sampai ke saya. Sellama ini saya lebih banyak ikut pelatihan di IDW.” (Dokumentasi Wawancara, 29 September 2024)

Hal ini menunjukkan kurangnya sistem pengelolaan data yang ter integrasi, sehingga beberapa penyandang disabilitas tidak ter jangkau oleh program-program yang seharusnya inklusif. Akibatnya, pelaksanaan program sering kali tidak merata, hanya menjangkau sebagian kecil pelaku UMKM disabilitas yang sudah memiliki akses informasi, sementara yang lain tertinggal.

c. Keterbatasan Infrastruktur dan Sarana Promosi

Keterbatasan infrastruktur dan sarana promosi masih menjadi tantangan signifikan dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Kendala ini tidak hanya membatasi mobilitas dan aksesibilitas penyandang disabilitas, tetapi juga memengaruhi mereka untuk memasarkan produk secara efektif. Meski telah ada upaya dari Pemerintah, Komunitas Disabilitas, dan Sektor Swasta, tantangan ini tetap menjadi perhatian yang membutuhkan solusi berkelanjutan.

Dari sisi infrastruktur, fasilitas umum yang kurang ramah disabilitas masih menjadi hambatan utama. Salah satu contohnya adalah aksesibilitas ke tempat pelatihan atau pameran. Banyak lokasi pelatihan yang tidak dilengkapi jalur akses yang memadai bagi pengguna kursi roda atau fasilitas lain yang mendukung kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Hal ini disampaikan oleh salah satu pelaku UMKM dalam sesi wawancara:

“... Kalau fasilitas di Difabel Mart cukup membantu, tetapi toilet yang ramah disabilitas itu belum ada. Kasian teman-teman kalau butuh fasilitas itu.” (Dokumentasi Wawancara, 29 September 2024)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun Difabel Mart telah memberikan kemudahan sebagai pusat pemasaran bagi UMKM disabilitas, masih ada kebutuhan mendesak untuk melengkapi fasilitas tersebut dengan sarana yang lebih inklusif, seperti toilet ramah disabilitas dan jalur akses yang lebih baik.

Selain keterbatasan infrastruktur, sarana promosi juga menjadi salah satu hambatan bagi pelaku UMKM disabilitas, terutama mereka yang baru memulai usaha. Difabel Mart mengalami tantangan besar, terutama dalam menarik pengunjung. Wisatawan cenderung mengunjungi pusat oleh-oleh besar yang telah bekerja sama dengan agen perjalanan.

Difabel Mart lebih sering dikunjungi oleh pembeli individu yang mengetahui tempat ini melalui media sosial atau memiliki kepedulian terhadap isu disabilitas. IDW terus berupaya meningkatkan promosi, tetapi keterbatasan modal membuat mereka harus mengandalkan inisiatif pribadi para anggota. Banyak pelaku usaha yang belum memiliki akses ke platform digital untuk memasarkan produk mereka. Hal ini menyebabkan produk-produk lokal dari komunitas disabilitas sulit dikenal oleh masyarakat luas. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pelaku usaha:

“... Saya baru belajar jualan online, tapi masih bingung pakai aplikasi. Promosi masih lewat teman-teman saja.” (Dokumentasi Wawancara, 29 September 2024)

Tantangan ini semakin terasa mengingat pentingnya pemasaran digital dalam era modern. Meskipun telah ada pelatihan digital yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial maupun mitra swasta seperti AirNav dan Baznas, keterbatasan pemahaman terhadap teknologi digital menjadi penghalang bagi beberapa pelaku UMKM disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang dilakukan belum sepenuhnya menjangkau semua pelaku usaha atau tidak cukup mendalam untuk mengatasi tantangan mereka dalam memanfaatkan platform digital.

Sarana promosi offline seperti pameran dan bazar juga menghadapi kendala dalam hal distribusi informasi dan keterbatasan kapasitas. Sebagian pelaku usaha menyebut bahwa mereka tidak selalu mendapat informasi tepat waktu mengenai jadwal pameran atau *event* pemasaran. Bahkan, ketika ada kesempatan untuk mengikuti pameran, kuota peserta yang terbatas sering kali membuat mereka kehilangan peluang untuk memamerkan produk.

Meski begitu, komunitas seperti IDW dan lembaga swasta seperti Baznas telah berkontribusi untuk menjembatani kekurangan tersebut. IDW, misalnya memanfaatkan Difabel Mart sebagai wadah untuk memasarkan produk anggotanya. Selain itu, IDW sering mengadakan pelatihan berbasis komunitas yang fokus pada

pengemasan dan strategi pemasaran sederhana, seperti belajar bersama antar pelaku usaha disabilitas.

Pendamping UMKM di Kabupaten Wonosobo mencatat bahwa meskipun kualitas produk-produk disabilitas tergolong baik, banyak produk yang kalah bersaing karena pengemasan yang kurang menarik. Sebagaimana ia sampaikan demikian:

“... Kalau kita bandingkan dengan produk lain yang di jual di toko modern, produk UMKM disabilitas sering kalah tampilan meskipun kualitasnya bagus. Dari segi kualitas produk sebenarnya bagus, tetapi ketika masuk expo, yang dicari biasanya produk dan pengemasan yang menarik” (Dokumentasi transkip wawancara, 26 September 2024).

Pernyataan di atas menyoroti pengemasan produk menjadi salah satu tantangan yang cukup serius bagi UMKM disabilitas. Pengemasan produk tidak hanya berfungsi sebagai pelindung, tetapi juga sebagai media komunikasi yang menciptakan kesan pertama bagi konsumen. Dalam konteks pasar modern, konsumen cenderung memilih produk yang memiliki tampilan visual menarik dan profesional. Sayangnya, banyak produk UMKM disabilitas belum memenuhi ekspektasi ini, meskipun kualitasnya sebenarnya setara.

Dari pernyataan itu, terlihat bahwa persoalan ini tidak hanya berdampak pada daya tarik visual produk, tetapi juga pada peluang UMKM disabilitas masuk ke pasar yang lebih luas, seperti toko modern atau jaringan distribusi besar. Toko-toko ini cenderung menetapkan standar

tampilan tertentu yang harus dipenuhi oleh produk untuk bisa masuk ke etalase mereka. Tanpa *branding* dan pengemasan yang sesuai, produk UMKM disabilitas sulit menembus pasar ini, meskipun kualitasnya memenuhi standar.

Secara keseluruhan, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, komunitas disabilitas, dan sektor swasta, tantangan infrastruktur dan sarana promosi masih menjadi isu yang perlu segera ditangani. Solusi yang lebih terintergrasi dan inklusif dapat memastikan bahwa UMKM disabilitas tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan pasar yang semakin kompetitif.

#### d. Kurangnya Akses Informasi dan Koordinasi

Akses informasi yang terbatas dan kurangnya koordinasi antar pemangku kepentingan menjadi salah satu hambatan utama dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Banyak pelaku UMKM disabilitas yang tidak mengetahui adanya program pelatihan atau bantuan yang disediakan pemerintah. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan memanfaatkan peluang yang sebenarnya telah tersedia.

Seorang pelaku UMKM di bidang kuliner, mengungkapkan keterbatasan ini dalam wawancara. Ia mengatakan seperti demikian:

“... Setahu saya, ada pelatihan dari pemerintah,, tapi saya belum pernah ikut.” (Dokumentasi transkip wawancara, 28 September 2024).

Pernyataan ini menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi informasi pemerintah, di mana pelaku UMKM disabilitas sering kali tidak terjangkau oleh sosialisasi program. Akibatnya, banyak dari mereka yang merasa terpinggirkan dan tidak mendapatkan manfaat dari program yang sebenarnya dirancang untuk mendukung usaha mereka.

Sebagaimana dilihat pada tabel 4.1, dari data yang disajikan, terlihat bahwa pelatihan yang diberikan oleh pemerintah tidak merata di antara pelaku UMKM disabilitas. Beberapa pelaku UMKM seperti Wardatiningsih dan Nunung Sri Lestari mendapatkan lebih dari satu pelatihan, menunjukkan adanya fokus atau prioritas terhadap usaha tertentu. Sebaliknya, pelaku UMKM seperti Yati, Masruri, Arifin, dan beberapa lainnya tidak mendapatkan pelatihan sama sekali, meskipun bergerak dalam bidang usaha yang potensial.

Bila dicermati lebih dalam lagi, beberapa jenis pelatihan lebih sering diadakan dibandingkan yang lain. ‘Pelatihan Boga’ mendominasi jenis pelatihan yang diterima oleh pelaku UMKM di bidang makanan, seperti Umi Farhah, Jembar, dan Sunariyah. ‘Pelatihan Strategi Bisnis dan Digital Marketing’ juga cukup sering diberikan, misalnya kepada Nunung Sri Lestari, Badarohimah, dan Nur Avina. ‘Pelatihan Jual Beli Online’ diberikan kepada

beberapa pelaku UMKM, seperti Wardantiningsih, Nunung Sri Lestari, dan Ari.

Namun, terdapat pelaku usaha di bidang yang sama tetapi tidak mendapatkan pelatihan serupa. Contohnya: Yati dan Sunariyah (keripik) tidak mendapatkan pelatihan Digital Marketing, padahal ini relevan untuk pengembangan usaha mereka. Arifin (service HP) tidak mendapatkan pelatihan teknis atau pemasaran yang dapat mendukung usaha berbasis jasa.

Kurangnya akses informasi juga terkait dengan minimnya media komunikasi yang efektif. Sosialisasi program pemerintah sering kali dilakukan melalui jalur formal seperti surat edaran atau pengumuman di kantor dinas, yang sulit dijangkau oleh sebagian besar pelaku UMKM disabilitas. Banyak dari mereka lebih mengandalkan informasi dari komunitas atau teman-teman mereka, yang sering kali tidak memiliki akses langsung ke sumber informasi resmi.

Di sisi lain, masalah koordinasi antar instansi juga memperburuk situasi. Program-program yang dijalankan oleh pemerintah daerah, komunitas, dan sektor swasta cenderung berjalan sendiri-sendiri tanpa ada integrasi yang jelas. Pendamping UMKM menyebutkan bahwa banyak program yang berpotensi besar, tetapi dampaknya tidak maksimal karena kurangnya kolaborasi.

“... Kadang ada pelatihan dari dinas tertentu, tapi tidak terhubung dengan program pemasaran atau bantuan dari instansi lain. Jadi, hasil pelatihan itu

tidak berlanjut menjadi peluang usaha” (Dokumentasi transkip wawancara, 26 September 2024).

Contohnya, program pelatihan *digital marketing* yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disdagkop UKM) sering kali tidak diikuti oleh program pendampingan pemasaran yang lebih mendalam. Akibatnya, pelaku UMKM yang sudah mendapatkan pelatihan tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikan ilmu tersebut secara langsung dalam pengembangan usaha mereka.

Hal ini mencerminkan perlunya integrasi antara pelatihan, pendampingan, dan program pemasaran untuk menciptakan dampak yang lebih berkelanjutan. Komunitas seperti Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW) sebenarnya sudah berusaha menjembatani kesenjangan informasi ini. IDW secara aktif menyampaikan informasi tentang program pemerintah kepada anggotanya dan membantu mereka untuk mengikuti pelatihan atau mendapatkan bantuan. Namun, skala jangkauan komunitas juga masih terbatas.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

#### A. Kesimpulan

- 1. Peran Pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam pelaksanaan *collaborative governance* pengembangan UMKM disabilitas** terwujud melalui fungsi fasilitator, regulator, dan katalisator kolaborasi multi pihak. Pemerintah daerah tidak hanya merancang kebijakan yang mendukung pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas, tetapi juga turut aktif memfasilitasi pelatihan, pendampingan usaha, serta penyediaan ruang pemasaran seperti Difabel Mart. Selain itu, pemerintah mendorong partisipasi sektor swasta melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan memperkuat keterlibatan organisasi disabilitas lokal seperti Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW). Meskipun demikian, efektivitas peran pemerintah masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, alokasi anggaran yang terbatas, serta perlunya penguatan kapasitas birokrasi untuk mengelola kolaborasi lintas sektor secara lebih adaptif dan berkelanjutan.
- 2. Bentuk interaksi, pola kerja sama, dan relasi kolaborasi santara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas, sektor swasta, dan pihak lainnya** dalam pengembangan UMKM disabilitas di Kabupaten Wonosobo menunjukkan dinamika yang

saling melengkapi. Pemerintah berperan sebagai pemangku kebijakan sekaligus penghubung antaraktor. IDW memainkan peran sebagai penggerak komunitas disabilitas, pengelola aktivitas ekonomi kolektif seperti Difabel Mart, serta pelaksana pelatihan berbasis komunitas. Sektor swasta turut ambil bagian melalui pendanaan CSR dan penyediaan pelatihan teknis. Relasi yang terbangun antara pihak-pihak tersebut berlangsung melalui prinsip kepercayaan, komunikasi terbuka, dan tujuan bersama untuk mendorong kemandirian ekonomi penyandang disabilitas. Meski telah menunjukkan praktik kolaborasi yang progresif, pola kerja sama ini masih menghadapi hambatan dalam sinkronisasi program, pembagian peran yang setara, dan mekanisme koordinasi berkelanjutan.

3. **Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengembangan UMKM disabilitas** meliputi berbagai aspek internal dan eksternal. Faktor pendorong utama di antaranya adalah adanya visi bersama dalam pemberdayaan disabilitas, kepemimpinan komunitas yang kuat melalui IDW, serta dukungan regulasi inklusif dari pemerintah daerah. Keterlibatan sektor swasta dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap inklusi sosial turut memperkuat kolaborasi ini. Sebaliknya, pelaksanaan kolaborasi juga menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur ramah disabilitas, kesenjangan data antarinstansi, rendahnya literasi digital pelaku UMKM disabilitas, dan lemahnya sinergi antaraktor. Faktor-faktor penghambat ini mengindikasikan perlunya mekanisme

pengelolaan kolaborasi yang lebih sistematis, penguatan kapasitas kelembagaan, serta integrasi kebijakan yang berpihak pada kelompok rentan secara konsisten.

## **B. Rekomendasi**

### **1. Penguatan Peran Pemerintah dalam Tata Kelola Kolaboratif**

Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu mempertegas perannya sebagai fasilitator dan integrator kolaborasi lintas sektor dalam pengembangan UMKM disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan memperluas skema pelatihan berbasis kebutuhan disabilitas, memperbaiki sistem pendampingan UMKM, serta mengalokasikan anggaran khusus untuk program inklusi ekonomi. Selain itu, perlu dibentuk forum koordinasi multipihak secara berkala yang melibatkan organisasi disabilitas, sektor swasta, dan OPD teknis untuk memastikan kesinambungan dan keberlanjutan program kolaboratif.

### **2. Peningkatan Kualitas dan Kelembagaan Kolaborasi Antaraktor**

Diperlukan penguatan pola kerja sama antara pemerintah, organisasi penyandang disabilitas seperti IDW, dan sektor swasta. Pemerintah dapat memfasilitasi penyusunan nota kesepahaman (MoU) lintas sektor sebagai acuan kerja sama jangka panjang. Organisasi disabilitas juga perlu didorong untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan, termasuk dalam bidang manajemen usaha, advokasi kebijakan, dan pemanfaatan

teknologi digital. Sementara itu, keterlibatan sektor swasta perlu difokuskan tidak hanya pada aspek CSR, tetapi juga pada skema kemitraan bisnis berkelanjutan.

### **3. Penataan Ulang Strategi Inklusif dan Penguatan Infrastruktur Pendukung**

Agar tata kelola kolaboratif dapat berjalan optimal, perlu dilakukan penguatan strategi berbasis data yang terintegrasi dan inklusif. Pemerintah dan mitra kerja harus memastikan tersedianya infrastruktur yang aksesibel bagi pelaku UMKM disabilitas, termasuk fasilitas di pusat pemasaran seperti *Difabel Mart*. Literasi digital juga harus ditingkatkan melalui pelatihan terpadu dan dukungan teknologi adaptif. Evaluasi rutin terhadap program kolaborasi menjadi penting guna menyesuaikan pendekatan dengan kebutuhan lapangan dan memperbaiki hambatan yang muncul secara dinamis.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/ Jurnal:

Atika, A.R. (2024) ‘Pengembangan Bisnis UMKM Santri Disabilitas Tuna Netra pada Bidang Inovasi dan Pemasaran di Cianjur Jawa Barat’, 5(1), pp. 367– 378.

Bahry, N. S., Kori, N. L., Ali, A. M., Mat, A., & Adzmi, A. (2023). The Challenges of Disabled Entrepreneurs: A Systematic Review. *Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship*, 8(2), 54-54.

Biorxiv n2 (2024) ‘No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title’, 1, pp. 4–6.

Bhogal-Nair, A., Lindridge, A. M., Tadajewski, M., Moufahim, M., Alcoforado, D., Cheded, M., ... & Liu, C. (2024). Disability and well-being: Towards a capability approach for marketplace access. *Journal of Marketing Management*, 40(5-6), 512-541.

Dwi Phitaloka, R. and Sri Wibawani (2023) ‘Collaborative Governance BUM Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo’, *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 11(1), pp. 8–16. doi:10.31289/publika.v11i1.9523.

Eko, S. (2021) ‘Government Making: Rebuilding Government Science’, *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 2(1), pp. 1–20. doi:10.47431/governabilitas.v2i1.109.

Fiantika, F.R. *et al.* (2022) *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Hertati, D. and Arif, L. (2022) ‘Collaborative Governance in the Management of a Waste Bank’, *KnE Social Sciences*, 2022, pp. 1–13. doi:10.18502/kss.v7i9.10923.

Ie, M. and Maupa, H. (2024) ‘AFEKTIF PEMILIK USAHA MIKRO’, 8(1), pp. 191–202.

Ilham, M. *et al.* (2024) ‘Pemetaan Jaringan Pendukung Transformasi Bisnis Digital Pada UMKM Disabilitas di Indonesia : Analisis Stakeholder Komprehensif Agus Hermawan berurutan sehingga mengarah pada pengembangan pertanyaan penelitian . Meskipun’, 2(3).

Izzadilla Hidayanu Pratiwi and Dewi Rahmi (2024) ‘Peran Corporate Social Responsibility dalam Meningkatkan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas (Studi Kasus CSR PT Bio Farma)’, *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1), pp. 1–7. doi:10.29313/bcses.v4i1.9605.

Mauksch, S., & Dey, P. (2024). Treating disability as an asset (not a limitation): A critical examination of disability inclusion through social entrepreneurship. *Organization*, 31(4), 624-644.

Niam, M.F. *et al.* (2024) *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by E. Damayanti. Widina Media Utama.

Norstedt, M., & Germundsson, P. (2023). Motives for entrepreneurship and establishing one’s own business among people with disabilities: Findings from a scoping review. *Disability & Society*, 38(2), 247-266.

Nopiah, R. and Islami, P.A. (2022) ‘Peran Pemberdayaan Ekonomi Digital Difa City Tour (Ojek Difa) Terhadap Kesejahteraan

Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta', *Convergence: The Journal of Economic Development*, 4(1), pp. 1–18. doi:10.33369/convergencejep.v4i1.22890.

Pratiwi, P.A. *et al.* (2024) 'Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL', *Mutiara : Jurnal Penelitian dan Karya Ilmiah*, 2(1), pp. 133–149.

Putri, B.K. *et al.* (2024) 'Evolusi teori governance: perbandingan implementasi di negara maju dan berkembang', 6(3), pp. 377–389.

Rahimi, N., Tan, F. and Bachtiar, N. (2023) 'Determinan Wirausaha Penyandang Disabilitas di Indonesia: Analisis Kelompok Sektor Primer, Sekunder dan Tersier', *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis*, 5, pp. 1268–1276. doi:10.37034/infeb.v5i4.658.

Rahmadevi, R.T. and Hertati, D. (2024) 'Public Policy ':, 5(1).

Rianda Dirkareshza, Meurina Desthabu, Aura Dwi Karunia, M.F.B. (2024) 'Jurnal Kreatif : Karya Pengabdian untuk Masyarakat Aktif dan Inovatif Afiliasi Judul PENDAYAGUNAAN PEMAHAMAN HAK CIPTA ATAS KARYA LOKAL PENYANDANG DISABILITAS DALAM PENINGKATAN EKONOMI KREATIF', 1, pp. 12–31.

Rinaldi, A. (2023) 'Peningkatan Kapabilitas Individu Disabilitas di UMKM Kreatif melalui Pengembangan Kompetensi dan Knowledge Management', *Prosiding Seminar Nasional USM*, 4(1), pp. 35–57. Available at: <https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/semnas/article/view/7080%0A>

e/downloa d/7080/5083.

Rokhamah *et al.* (2024) *Metode Penelitian Kualitatif Teori, Metode, dan Praktik, Jurnal Ilmu Pendidikan.*

Sariani *et al.* (2024) ‘UMKM GO-INTERNATIONAL : PEMBUATAN VIDEO PROFIL BILINGUAL SEBAGAI BRANDED-CONTENT SILVIA PIOBANG HANDYCRAFT’, 11(2), pp. 170–177.

Sawitri, A.P. *et al.* (2021) ‘Penguatan UMKM Penyandang Disabilitas Naeema Melalui Perijinan Usaha dan Modal Usaha’, *Ekobis Abdimas : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), pp. 80–87. doi:10.36456/ekobisabdimas.2.2.4856.

Sholikhan, M., Fajrie, N. and Purbasari, I. (2023) ‘Pengembangan Website Ramah Disabilitas Sebagai Media Aktualisasi Diri Penerima Manfaat di Panti Pelayanan Sosial “Pendowo” Kabupaten Kudus’, *Kesatria : Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer dan Manajemen)*, 4(4), pp. 1180– 1187. Available at: <https://tunasbangsa.ac.id/pkm/index.php/kesatria/article/view/267%0Afies/ 5320/Sholikhan et al. - 2023 - Pengembangan Website Ramah Disabilitas Sebagai Med.pdf>.

Siti Syamsiah Renny Tounbama *et al.* (2021) *Analisis dan Interpretasi Data dalam Penelitian Kualitatif.* Available at: <http://ocw.upj.ac.id/files/Slide-KOM302-Analisis-Data-Kualitatif-2.pdf>.

Sukmana, D., Akhmad Nulhaqim, S. and Cipta Apsari, N. (2023) ‘Pengembangan Sumber Daya Manusia Pada Organisasi Pelayanan Sosial Untuk Penyandang Disabilitas (Studi Kasus

Pada Yayasan Biruku Indonesia)', *Kebijakan : Jurnal Ilmu Administrasi*, 14(1), pp. 12–21.  
doi:10.23969/kebijakan.v14i1.5814.

Suryati, S. and Utami Fitri, H. (2023) 'Penerapan Bimbingan Karir Ditinjau Dari Teori Trait And Factor Untuk Meningkatkan Keterampilan Pada Penyandang Disabilitas', *Social Science and Contemporary Issues Journal*, pp. 437–441. Tommy, S. (2023) 'Collaborative Governance: Sebuah Tinjauan Literatur', *Prosiding Seminar Nasional USM*, pp. 113–124.

Available at:

[https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/semnas/article/view/7102%](https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/semnas/article/view/7102)

[https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/semnas/article/viewFile/7102/5104.](https://www.ojs.serambimekkah.ac.id/index.php/semnas/article/viewFile/7102/5104)

Wahyuningsih, S., Tasriastuti, N.A. and ... (2023) 'Pengembangan Ketrampilan Menjahit Para Penyandang Disabilitas Kabupaten Grobogan Bersama Lpk Belva', *Fokus* ..., 1(2), pp. 1–11.

Yunanto, S.E. (2021) 'GOVERNMENT MAKING ':, 2, pp. 1–19.  
Zachari, N.N. *et al.* (2024) 'Empowering People with Disabilities through Batik Toeli Laweyan Industry in Surakarta Pemberdayaan Masyarakat Penyandang Disabilitas melalui Industri Batik Toeli Laweyan di Surakarta Pendahuluan Metode', 12(1), pp. 10–18.

**Undang-Undang:**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. *Penyandang Disabilitas.* 15 April 2016.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69. Jakarta.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. *Cipta Kerja.* 02 November 2020.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245. Jakarta.

**Sumber Berita:**

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia  
Siaran Pers Hm.4.6/303/Set.M.Ekon.3/08/2023 Dorong UMKM  
Naik Kelas Dan Go Export, Pemerintah Siapkan Ekosistem  
Pembiayaan Yang Terintegrasi Jakarta, 24 Agustus  
2023

[Https://Www.Ekon.Go.Id/Publikasi/Detail/5318/Dorong-Ukm-Naik-Kelas-Dan-Go-Export-Pemerintah-Siapkan-Ekosistem-Pembiayaan-Yang-Terintegrasi](https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/Dorong-Ukm-Naik-Kelas-Dan-Go-Export-Pemerintah-Siapkan-Ekosistem-Pembiayaan-Yang-Terintegrasi) Diakses Pada 15 Juni 2024.

KemenKopUKM Ajak Penyandang Disabilitas Optimalkan  
Teknologi Digital  
<https://www.rri.co.id/umkm/521930/kemenkopukm-ajak-penyandang-disabilitas-optimalkan-teknologi-digital> diakses pada 15 juni 2024.

## Olahan Data Wawancara Komunitas/ Organisasi Disabilitas

**Nama** : Irwanto  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Profesi/ Jabatan** : Ketua Pertuni/ UMKM Jasa Pijat

### A. Peran organisasi/ komunitas disabilitas di Kabupaten Wonosobo

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
”Kami ada organisasi tuna netra sendiri sebenarnya mas, namanya PERTUNI, Persatuan Tuna Netra Indonesia. Di Wonosobo ini istilahnya Pengurus Cabang. Kebetulan saya Irwanto Ketuanya. IDW juga saya masuk pengurus. Jadi, IDW itu kalau di Wonosobo kita biar jadi satu meskipun sudah punya organisasi masing-masing. Seperti mbak Maryam sekretaris itu HWDI. Saya Pertuni. Ada Rungu itu Gerkatin. Selama ini, kita punya kumpulan sendiri dan ada perkumpulan bersama di IDW itu. Meskipun Netra seringkali masih belum bisa seperti yang lainya karena keahlian cuma	PERTUNI berjejaring dengan organisasi disabilitas lain melalui IDW	PERTUNI aktif dalam jaringan IDW namun belum mendapat perhatian khusus

Pijat."		
“Pertemuan rutinan itu sering kali dilakukan di IDW, namun selama kita jalan ini, terutama organisasi kami sendiri yang bersama temen-temen Netra di PERTUNI belum kerangkul. Belum ada agenda mau pertemuan ini membahas	PERTUNI kurang memiliki agenda internal selain pelatihan pijat	Kegiatan PERTUNI masih terbatas, belum berkembang seperti organisasi disabilitas lainnya

“apa, program selain pelatihan itu belum ada, karena dari kita yang mungkin mentok di tukang pijat. Ada yang mulai masak, tapi ya saya sendiri ngicipi Gak enak. Kalau pijat karena kita sekolah dulu 2 tahun, jadi bisa mas.”		
“Saya ikut pelatihan di Balai Kartini Temanggung selama dua tahun. Kami tinggal di asrama, belajar teori, dan praktik pijat hingga mendapatkan sertifikat dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.”	Keahlian pijat diperoleh dari pelatihan formal pemerintah provinsi	Pelatihan pijat berbasis sertifikasi menjadi keahlian utama anggota PERTUNI
“Awalnya kami ikut program pemerintah. Ada insentif untuk biaya hidup, tapi tidak cukup untuk dua tahun penuh. Jadi, kami mencari tambahan dengan cara memijat guru atau karyawan di sana. Dari hasil itu, kami bisa bertahan hidup sampai selesai pelatihan dan menjadi profesional.”	Bertahan hidup selama pelatihan dengan usaha mandiri	Disabilitas netra menunjukkan kemandirian dalam menyelesaikan pelatihan keterampilan

## B. Mengetahui kondisi UMKM Jasa Pijat dan Dukungan Lingkungan

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>”Saya buka praktek pijat di rumah kontrakan. Kontraknya 6,5 juta per tahun. Di Difabel Mart juga ada tempat pijat, tapi kadang sepi. Jadi, saya buka praktek sendiri. Dalam sehari, bisa pijat sampai 10 orang. Tarifnya 50 ribu untuk 2 jam. Lumayan untuk hidup, meski saya sendiri makan hanya sekali sehari.”</p>	<p>Praktik pijat dilakukan di dua lokasi, Difabel Mart kurang ramai</p>	<p>Usaha jasa pijat berjalan mandiri, namun lokasi usaha strategis belum mendukung</p>

<p>”Pak Sukemto itu luar biasa. Dia Kasatpol PP di Wonosobo, sekaligus penasehat PERTUNI. Beliau sering mendukung kegiatan kami, bahkan kadang membantu dari kantong pribadinya. Teman-teman Satpol PP satu regu sering pijat di tempat saya, gantian tiap minggu. Itu juga bikin saya semangat, karena merasa usaha ini dihargai.”</p>	<p>Dukungan personal dari aparat pemerintah sangat membantu</p>	<p>Relasi personal dengan pejabat lokal memberi dukungan nyata bagi usaha</p>
<p>”Harapannya, ada lebih banyak perhatian dari pemerintah dan IDW untuk teman-teman netra. Kami ingin diberi pelatihan keterampilan lain, biar nggak hanya andalkan pijat. Kalau ada kesempatan, kami juga ingin usaha kecil lainnya berkembang, supaya lebih mandiri.</p>	<p>Ada keinginan diversifikasi keterampilan dan usaha</p>	<p>Pelatihan keterampilan baru sangat dibutuhkan untuk kemandirian jangka panjang</p>
<p>”Sampai sekarang, saya merasa pemerintah daerah belum benar-benar memperhatikan kami. Bantuan atau program yang diberikan sangat minim dan tidak merata. Banyak teman-teman tuna netra yang tidak mendapatkan akses pelatihan atau bantuan. Bahkan untuk usaha pijat saja, dukungan dari</p>	<p>Pemerintah kurang hadir secara nyata bagi tuna netra</p>	<p>Dukungan terhadap tuna netra belum merata dan belum menyentuh kebutuhan esensial</p>

pemerintah hampir tidak ada.”		
-------------------------------	--	--

### **C. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
”Sejauh ini, dukungan langsung hampir tidak ada. Tempat usaha seperti di Difabel Mart pun sepi tanpa adanya promosi dari pemerintah. Kalau dibilang bantuan, paling hanya ada janji-janji tanpa realisasi. Kami merasa usaha kami kurang dihargai.	Pemerintah kurang mempromosikan usaha jasa disabilitas	Minimnya promosi dari pemerintah membuat usaha jasa pijat kurang berkembang
”Kebijakan itu ada, tapi hanya di atas kertas. Implementasinya tidak sampai ke kami. Contohnya, tidak ada program pelatihan yang berkesinambungan atau dukungan untuk memperluas peluang kerja. Kami butuh lebih dari sekadar formalitas; kami butuh tindakan nyata.”	Implementasi kebijakan disabilitas masih lemah	Perlu kebijakan yang benar-benar di implementasikan, bukan hanya di atas kertas
”Harapannya, pemerintah benar-benar hadir untuk kami. Mulai dari menyediakan tempat usaha yang strategis hingga memberikan pelatihan tambahan di luar pijat. Kami juga ingin ada	Harapan pada pemerintah untuk fasilitasi pengembangan usaha	Pemerintah diharapkan aktif dalam pelatihan dan pengembangan usaha berbasis potensi netra

<p>promosi agar masyarakat tahu keahlian kami, sehingga usaha kami bisa berkembang.”</p>		
<p>“Pertama, tempat usaha yang layak dan strategis. Kedua, pelatihan keterampilan baru di luar pijat. Ketiga, promosi besar-besaran untuk jasa pijat kami. Kalau pemerintah benar-benar memprioritaskan ini, kami bisa menjadi lebih mandiri.</p>	<p>Usulan program prioritas untuk kemandirian disabilitas netra</p>	<p>Skema prioritas dukungan jelas: lokasi, keterampilan baru, dan pemasaran</p>

**Nama** : Ipunk  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Profesi/ Jabatan** : Ketua Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW)

**A. Peran dan Dukungan IDW terhadap UMKM Disabilitas di Kabupaten Wonosobo**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
“IDW berkomitmen untuk menciptakan lingkungan terbuka yang menawarkan dukungan tanpa syarat kepada setiap anggota, sehingga anggota dapat tumbuh dan berkontribusi sebanyak mungkin di berbagai bidang kehidupan sehari-hari. Dengan menjadikan martabat manusia sebagai hak dasar, IDW ini kan ada juga untuk memberi informasi masyarakat umum agar lebih memahami, sabar, dan tidak mementingkan diri sendiri, sehingga semua orang dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. terutama perhatian kepada penyandang disabilitas.”	IDW fokus pada pemberdayaan ekonomi difabel melalui UMKM, pelatihan, advokasi	IDW sebagai motor pemberdayaan ekonomi difabel

<p>“Awal mula untuk mengumpulkan dan saling mengetahui orang yang sama dengan kami itu sulit sekali mas, awalnya kita pertemuan orang itu cuma 10 dan lama kelamaan menjadi banyak dan itu rutin setiap bulan 1x dan berpindah- pindah dari netra, fisik, rungu, kadang umum</p>		
<p>ngopi, banyak. IDW ini merupakan organisasi disabilitas di Kabupaten Wonosobo, adanya IDW menjadi induk dari beberapa organisasi disabilitas yang ada. Ada Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Wonosobo, ada Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Wonosobo, ada Gerakan untuk kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (GERKATIN) Wonosobo, anak-anak berkebutuhan khusus, dan pokoknya seluruh difabel yang ada di Wonosobo.”</p>		
<p>“Jadi, organisasi ini sebenarnya lahir dari keinginan teman-teman difabel di Wonosobo untuk meningkatkan kemandirian ekonomi. Visi kami adalah menciptakan masyarakat</p>		

<p>difabel yang berdaya dan mandiri, khususnya dalam bidang UMKM. Misinya mencakup pelatihan keterampilan, pengembangan usaha, dan advokasi kebijakan yang inklusif. Nilai utama kami itu kebersamaan, solidaritas, dan semangat untuk maju bersama. Soal kepengurusan, kami memiliki struktur yang jelas, meski detail periodesasinya mungkin berbeda di setiap kelompok. Intinya, kami semua bergerak bersama sebagai komunitas."</p>		
<p>"Peran kami itu lebih ke fasilitator. Kami menjembatani pelaku UMKM difabel dengan pemerintah, pihak CSR, atau siapa pun yang mau mendukung. Kami juga menyediakan tempat untuk menjual produk mereka, seperti di Sentra UMKM di Kalianget. Selain itu, kami bantu teman-teman ini promosi lewat media sosial."</p>	<p>IDW menjembatani UMKM difabel dengan mitra dan menyediakan tempat jualan</p>	<p>IDW sebagai penghubung strategis dan fasilitator usaha</p>

<p>"Ada beberapa program yang sudah kami jalankan. Misalnya, kami pernah mengadakan pelatihan digital marketing. Kemudian, kami bekerja sama dengan CSR untuk merenovasi lokasi Sentra UMKM. Promosi produk juga kami lakukan lewat media sosial, dan kami melibatkan UMKM non-difabel supaya variasi produk di Sentra ini lebih beragam."</p>	<p>IDW aktif dalam pelatihan dan perbaikan fasilitas</p>	<p>Bentuk dukungan konkret IDW terhadap UMKM difabel</p>
<p>"Dukungan kami itu mencakup fasilitas, seperti Sentra UMKM. Selain itu, kami bantu mereka dengan pelatihan, promosi, dan kadang pendampingan untuk pengembangan produk. Kalau untuk dana, kami masih bergantung pada CSR atau inisiatif lain."</p>	<p>Bantuan menyeluruh secara teknis dan non-teknis</p>	<p>IDW mendampingi pelaku dari hulu ke hilir</p>
<p>"Ya, kami pernah adakan pelatihan digital marketing. Sayangnya, ini baru sekali dilakukan, dan kami sadar bahwa pelatihan seperti ini harusnya rutin."</p>	<p>Pelatihan keterampilan masih terbatas</p>	<p>Kebutuhan pelatihan masing tinggi</p>

<p>"Biasanya kami lihat dari keterampilan yang mereka punya. Misalnya, kelompok tuli itu unggul di makanan siap saji, sementara kelompok netra lebih banyak bergerak di layanan pijat. Kami coba kembangkan apa yang memang sudah menjadi keahlian mereka."</p>	<p>Pendekatan pengembangan berbasis keahlian</p>	<p>Pemetaan dilakukan lewat interaksi langsung</p>
<p>"Masih banyak kekurangan, jujur saja. Lokasi Sentra UMKM kami, misalnya, belum sepenuhnya ramah difabel. Aksesibilitas di tempat umum juga masih jauh dari ideal. Kalau berkunjung di Difabel Mart saja, itu toilet sangat jauh. Untuk teman-teman khusunya yang seperti saya cacat fisik di kaki, kemudian yang netra, cukup kesulitan dan jauh"</p>	<p>Upaya untuk menciptakan fasilitas inklusif</p>	<p>IDW peduli dengan kenyamanan akses difabel</p>
<p>"Ya, ada. Bantuan teknis kami itu lebih ke pendampingan produksi dan pemasaran. Kami juga bantu mereka memahami cara meningkatkan kualitas produk."</p>	<p>Bantuan teknis diberikan secara berkelanjutan</p>	<p>IDW tidak hanya memberi fasilitas, tapi juga bimbingan teknis</p>
<p>"Kebanyakan tentang pengemasan, branding, dan pemasaran. Mereka juga butuh panduan soal legalitas produk, seperti sertifikasi halal atau PIRT."</p>	<p>Isu teknis jadi kebutuhan utama</p>	<p>Ada kebutuhan mendesak untuk pelatihan teknis</p>

<p>"Kami andalkan media sosial untuk promosi. Dari situ, wisatawan dari luar kota seperti Yogyakarta dan Bandung mulai tertarik datang. Meskipun itu dalam rangkaian Studi Tiru, karena memang Difabel Mart itu hanya 1 di Indonesia"</p>	<p>Media sosial sebagai alat pemasaran utama</p>	<p>Promosi digital membuka peluang baru</p>
<p>"Pelatihan digital marketing adalah salah satu contohnya. Tapi ini baru awal, kami harap ada lebih banyak program seperti ini ke depannya. Yang belum lama kita bekerjasama dengan RTI untuk pelatihan pemasaran dan cara ngomong, nyales sing apik lah mas bahasane. Karena wis lumayan ya sing wani dodolan, ya sing penting bisa public speaking apik disik di masa saat ini too, media digital. Kanca-kanca ben iso adaptasi ning jaman digital ngene iki. Pesertane lumayan mas 50 orang. Semuanya kegiatan kami tampilkan di akun instagram @wonosoboidw mas. Bisa dicek semuanya ada foto dan vidio kalau ingin melihat"</p>	<p>Kolaborasi pelatihan publik dan digital makin berkembang</p>	<p>Pelatihan mulai menyasar aspek komunikasi dan adaptasi digital</p>

<p>"Iya, kami juga bekerja sama dengan UMKM non-difabel. Produk mereka ikut dijual di Sentra, asalkan tidak tumpang tindih atau sama dengan dengan produk difabel. Contohnya misalnya dari Difabel sudah membuat Carica, jadi dari Non Difabel tidak boleh Carica. Misalnya sudah ada keripik, maka tidak boleh keripik"</p>	<p>Kolaborasi inklusif untuk memperkuat variasi produk</p>	<p>Kebijakan IDW menjamin keberlanjutan usaha difabel</p>
--	--	---

<p>"Kami selalu terbuka untuk diskusi dan koordinasi. Biasanya, kami mulai dengan pendekatan informal dan membangun kepercayaan terlebih dahulu."</p>	<p>Pendekatan humanis dalam menjalin kemitraan</p>	<p>IDW mengedepankan kepercayaan sebagai dasar kerjasama</p>
<p>"Sejauh ini yang paling menonjol adalah pelatihan digital marketing. Kami berharap ke depannya bisa ada pelatihan lain yang lebih rutin."</p>	<p>Fokus utama pelatihan masih digital, pelatihan lain belum intensif</p>	<p>Pelatihan masih bersifat awal, perlu kontinuitas</p>
<p>"Kami dorong mereka untuk mencoba hal baru. Misalnya, dari pengemasan produk sampai eksplorasi rasa untuk produk makanan."</p>	<p>Kreativitas difabel terus ditumbuhkan</p>	<p>IDW memberi ruang inovasi pelaku UMKM</p>

## B. Kendala dan Tantangan Internal

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>"Sebenarnya belum ada pemetaan yang formal, tapi kami identifikasi potensi melalui kelompok-kelompok yang sudah terbentuk. Dari situ, kami lihat siapa yang bisa dikembangkan untuk masuk ke UMKM."</p>	<p>Tidak ada data potensi difabel yang sistematis</p>	<p>Pemetaan kelembagaan masih lemah</p>

<p>"Kami berusaha sebisa mungkin. Misalnya, untuk Sentra UMKM, renovasi yang didukung CSR itu sudah kami arahkan supaya lebih ramah difabel, meski masih banyak yang harus diperbaiki."</p>	<p>Infrastruktur belum memenuhi kebutuhan difabel</p>	<p>Fasilitas umum belum inklusif</p>
<p>"Kami tidak punya dana khusus, jadi biasanya kami cari bantuan dari CSR. Sistem konsinyasi juga kami terapkan supaya pelaku UMKM bisa memulai tanpa harus menanggung biaya produksi di awal."</p>	<p>Sumber dana terbatas belum mandiri</p>	<p>Pembiayaan masih jadi hambatan utama</p>
<p>"Saat ini belum ada. Kami masih bergantung pada dukungan eksternal seperti CSR untuk hal ini."</p>	<p>Ketiadaan program finansial internal</p>	<p>Ketergantungan tinggi terhadap sumber luar</p>

### C. Hubungan dan Harapan terhadap Pemerintah

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>"Ada, tapi masih terbatas. Pemerintah daerah memberikan lokasi Difabel Mart di Kalianget untuk Sentra UMKM. Namun, dukungan lain seperti permodalan atau pelatihan masih belum maksimal."</p>	<p>Bentuk kerja sama masih terbatas</p>	<p>Perluasan bentuk dukungan dari pemerintah dibutuhkan</p>

<p>"Ada, tapi masih terbatas. Pemerintah daerah pernah menawarkan lokasi di Kalianget untuk Sentra UMKM. Namun, dukungan lain seperti permodalan atau pelatihan masih belum maksimal."</p>	<p>Pemda belum mendukung aspek pemberdayaan UMKM</p>	<p>Pemerintah belum maksimal dalam mendampingi UMKM disabilitas</p>
<p>"Harapannya, pemerintah lebih serius mendukung. Lokasi strategis seperti Dieng, misalnya, akan sangat membantu pengembangan Sentra UMKM."</p>	<p>Lokasi strategis bisa tingkatkan visibilitas UMKM difabel</p>	<p>Pemerintah perlu sediakan akses lokasi premium</p>
<p>"Fokuslah pada aksesibilitas dan pelatihan berkelanjutan. Bantuan permodalan juga sangat penting supaya pelaku UMKM difabel bisa lebih mandiri."</p>	<p>Pemerintah perlu dukung keberlanjutan UMKM difabel</p>	<p>Tiga area dukungan penting: Infrastruktur, pelatihan, permodalan</p>

#### **D. Dampak Sosial-Ekonomi bagi Pelaku UMKM Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
<p>"Belum signifikan, tapi ada peningkatan. Misalnya, mereka mulai punya penghasilan tambahan dari produk yang dijual."</p>	<p>Dampak ekonomi mulai dirasakan</p>	<p>Usaha memberi kontribusi meski belum signifikan</p>
<p>"Program kami membantu mereka merasa lebih percaya diri. Mereka juga merasa lebih dihargai karena mampu menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi."</p>	<p>Pemberdayaan berdampak pada kepercayaan diri</p>	<p>Efek psikologis positif dari keterlibatan UMKM</p>

**Nama : Maryam**  
**Jenis Kelamin : Perempuan**  
**Profesi/ Jabatan : Sekretaris Ikatan Disabilitas**  
**Wonosobo (IDW)/ Ketua Himpunan Wanita Disabilitas**  
**Indonesia (HWDI) Wonosobo/ Pelaku UMKM**

### **A. Inisiatif dan Kepemimpinan Komunitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
<p>“Saya sama Pak Bupati kontraknya 5 tahun. Kontrak MoU kerja sama terkait dengan Difabel Mart di tempat wisata itu. Jadi, pengelolaan Kali Anget itu saya bukan serta merta berdasarkan omongan, tapi ada hitam di atas putih antara saya dengan Bupati (Pak Afif).”</p>	<p>Ada inisiatif kerja sama formal dari komunitas dengan pemerintah</p>	<p>Kepemimpinan komunitas berbasis legalitas dan jejaring</p>
<p>”Yang awal saya itu cuma sekitar 6 orang di bidang UMKM, khususnya makanan. Itu sekarang total ada 30-an, Mas. Saya mendampingi mereka produksi dari yang belum bisa apa-apa, sampai cara bikin Petos. Bahkan mereka ke rumah saya. Bikin Petos itu gampang, Tempe Atos. Saya dampingi satu per satu, mulai dari minyaknya</p>	<p>Maryam sebagai pelatih dan pendamping produksi UMKM disabilitas</p>	<p>Peran aktif sebagai agen pemberdayaan ekonomi inklusif</p>

yang masih banyak, rasa kurang apa, produksinya, sampai packaging-nya.”		
“Semua berawal dari Kabupaten Wonosobo yang menjadi Kabupaten Ramah HAM (Hak Asasi Manusia), dan saya adalah salah satu anggotanya waktu itu. Jadi, saya merasa menjadi sebuah kewajiban, sebagai anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, untuk benar-benar mengedepankan HAM. Itu kenapa Difabel Mart dijadikan sebuah brand. Karena Wonosobo sudah juara 1, mendapatkan reward terkait Kabupaten Wonosobo Ramah HAM.”	Motivasi ideologis mendorong branding Difabel Mart	Kepemimpinan visioner berbasis nilai HAM
“Konsep awalnya, saya ingin Difabel Mart menjadi seperti delivery barang, seperti Shopee. Jadi keren banget. Sampai saya berangan-angan tinggi, mau dibuat koperasi, dan teman-teman disabilitas dimodali untuk mengembangkan usahanya. Tapi, ternyata dalam perjalanan banyak tantangan.”	Gagasan pengembangan ke arah koperasi disabilitas	Cita-cita ekonomi kolektif berbasis komunitas
“Saya terdorong karena pengalaman pribadi. Saya mengalami KDRT pada tahun 2012, dan saat itu saya memutuskan untuk	Pengalaman pribadi membentuk semangat kemandirian	Kepemimpinan transformasional dari pengalaman hidup

mandiri.		
Saya ingin ada generasi penerus, tetapi hingga saat ini belum ada rekrutmen karena saya belum menemukan bibit yang cocok.”	Kesadaran pentingnya regenerasi organisasi HWDI	Tantangan kontinuitas organisasi komunitas disabilitas
Saya tidak ingin bergantung pada orang lain. Saya juga melihat perlunya pendampingan psikologis untuk perempuan disabilitas. Awalnya, saya ingin menjadi psikolog untuk mendampingi mereka.”	Aspirasi personal untuk menjadi pendamping psikologis	Kepedulian menyeluruh tidak hanya ekonomi tapi juga mental

## B. Peran Pemerintah dan Dukungan Eksternal

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
Kontrak MoU kerja sama terkait dengan Difabel Mart di tempat wisata itu. Jadi, pengelolaan Kali Anget itu saya bukan serta merta berdasarkan omongan, tapi ada hitam di atas putih antara saya dengan Bupati (Pak Afif).”	Kerja sama formal dengan Pemda untuk tempat Difabel Mart	Pemerintah sebagai fasilitator awal inisiatif komunitas
“Sekarang yang mengelola dinas. Saya sebenarnya ingin melihat bagaimana pengelolaannya, ketika saya dan teman- teman yang	Ketidakpuasan terhadap pengelolaan oleh dinas	Tantangan efektivitas saat alih kelola ke pihak birokrasi

<p>mengelola dibandingkan dinas yang mengelola Difabel Mart itu. Ternyata zonk, Mas.”</p>		
<p>“Dana dari Australia itu saya kolaborasikan. Misalnya, saya mengundang 50 orang untuk sosialisasi, dan saya ambil produknya teman-teman untuk dijadikan hadiah. Itu sekaligus jadi ajang promosi. Semua berawal dari relasi saya dengan teman dari Undip yang tahu tentang Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM.”</p>	<p>Dukungan pendanaan berbasis relasi personal</p>	<p>Peran penting jejaring internasional dan kampus</p>
<p>”Saya diberi tahu oleh salah satu rekan, yang tidak bisa saya sebutkan namanya, mengenai adanya dana CSR dari AirNav yang bertepatan dengan Festival Balon di Kabupaten Wonosobo. Dana ini sebenarnya diperuntukkan untuk komunitas seperti itu. Saya kemudian mencari komunitas balon di Wonosobo dan menjalin komunikasi, menjelaskan segala rencana untuk Difabel Mart, dan mereka setuju. Akhirnya, kami menerima bantuan sebesar Rp50 juta. Dana ini adalah hasil pembagian dari Komunitas Balon, yang</p>	<p>Bantuan CSR sebagai dana awal pembangunan fisik</p>	<p>CSR sebagai penyambung inisiatif komunitas</p>

<p>sebagian juga mereka berikan kepada kami. Bagi kami, dana ini adalah penyelamat untuk memulai pembangunan Difabel Mart, meskipun masih banyak yang harus diperjuangkan.”</p>		
<p>”Kami juga mendapatkan bantuan dari BAZNAS untuk pembiayaan listrik di Difabel Mart. Selain itu, ada freezer yang merupakan bantuan dari Balai Kartini Provinsi melalui Dinas terkait yang membantu menyediakan fasilitas untuk Difabel Mart.”</p>	<p>Kolaborasi berbagai lembaga membantu infrastruktur dasar</p>	<p>Sinergi antar-lembaga mendukung kebutuhan komunitas</p>
<p>Saya diundang karena memiliki usaha jahit di Watumalang. Saat itu, saya merekrut beberapa penyandang disabilitas dari luar kota untuk bekerja di tempat saya.</p>	<p>Pemerintah pernah jadi jembatan awal pengenalan komunitas</p>	<p>Pemerintah sebagai pintu awal penguatan jaringan sosial</p>

### C. Tantangan dan Harapan ke Depan

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>”Saat saya ada program bersih-bersih, dan Kali Anget ada pembangunan, kan debunya masuk semua itu. Itu alasan kenapa Difabel Mart tak tutup dulu, karena bersihinya repot, Mas.</p> <p>Kenapa ini ditutup, padahal untuk jualan? Saya ini paling menjaga kualitas dari Difabel Mart.</p> <p>Alasannya, saya tidak mau orang membeli itu karena belas kasihan, atau produknya benar-benar tidak bersaing.”</p>	<p>Masalah teknis di lokasi berdampak ke operasional</p>	<p>Tantangan eksternal memengaruhi kontiunitas usaha</p>
<p>”Waktu itu perjuangannya lumayan bikin miris kalau sekarang tak ingat. Hujan deras, naik motor, sampai menginap di sana seadanya.</p> <p>Sambil ngawasi pembangunan, sambil nata-nata. Sayangnya tidak terdokumentasi.</p> <p>Anak saya waktu itu masih TK. Hujan-hujan di sana, jemput dan antar sekolah dari sana. Tempatnya belum ada kasur, kita itu tidur pakai kardus.</p> <p>Pokoknya perjuangannya itu keren, Mas.”</p>	<p>Pengalaman sulit dalam proses awal pembangunan</p>	<p>Spirit perjuangan menjadi fondasi keberlanjutan</p>

<p>saya ingin Difabel Mart menjadi seperti delivery barang, seperti Shopee. Jadi keren banget. Sampai saya berangan-angan tinggi, mau dibuat koperasi, dan teman-teman disabilitas dimodali untuk mengembangkan usahanya.</p>	<p>Visi besar untuk digitalisasi dan delivery</p>	<p>Harapan modernisasi usaha disabilitas</p>
<p>”Tempat tinggal saya menjadi tempat perkumpulan teman-teman difabel di Wonosobo. Dulu, kami masih berpindah-pindah tempat, tetapi sekarang sudah menetap di rumah saya dan telah terdaftar serta ditulis di Akta Notaris. Meskipun sejak awal, sekitar tahun 2018, hanya ada saya, Mas Ipunk, dan 2-3 orang lainnya yang aktif. Selama 2 tahun berjalan, dengan pertemuan rutin, kami berhasil merangkul berbagai kelompok disabilitas, seperti netra, gerkatin, dan yang lainnya.”</p>	<p>Minimnya fasilitas komunitas, mengandalkan rumah pribadi</p>	<p>Perlu infrastruktur komunitas yang layak dan tetap</p>
<p>”Saya bergabung dengan IPCTW, yang saat itu hanya sebuah nama tanpa aktivitas. HWDI kemudian mulai bergerak dengan beberapa program. Pada tahun 2000, kami mengurus badan hukum dengan Mas Ipunk sebagai ketua, dan</p>	<p>Keterbatasan awal organisasi sebelum aktif</p>	<p>Proses bertahap membangun struktur organisasi</p>

saya sebagai sekretaris.”		
Saya ingin ada generasi penerus, tetapi hingga saat ini belum ada rekrutmen karena saya belum menemukan bibit yang cocok.”	Belum ada regenerasi yang kuat dalam organisasi	Tantangan kelangsungan organisasi komunitas

## **Pedoman Wawancara Masyarakat**

**Nama** : Naufal Erdian  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki

### **A. Pengalaman Belanja Produk UMKM Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
”Wah, pengalaman saya lumayan ya, Jadi pas transit disini sepulang dari Dieng, Karena memang harus bis kecil kan kalau Dieng. saya nyoba es Dawet yang jual ibu itu, maaf ya difabel. Terus mampir juga ke Difabel Mart buat beli carica. Jujur, saya nggak nyangka ada tempat ini yang fokus banget mendukung UMKM disabilitas	Konsumen punya pengalaman positif dan tak terduga saat berinteraksi dengan produk UMKM disabilitas.	Konsumen memiliki kesan positif terhadap keberadaan UMKM disabilitas, khususnya Difabel Mart.
“Awalnya saya nggak tahu. Pas lihat Difabel Mart, baru ngeh kalau tempat itu dikelola buat mendukung UMKM disabilitas. Ada papan informasinya, terus saya sempat ngobrol sama penjaga tokonya. Rasanya makin salut setelah tahu cerita di balik produk-produknya”	Kesadaran konsumen terhadap UMKM disabilitas meningkat melalui papan informasi dan interaksi langsung.	Informasi visual dan komunikasi langsung berperan penting dalam meningkatkan pemahaman publik.

## **B. Kualitas Produk dan Preferensi Konsumen UMKM Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
<p>“Es Dawetnya segar banget, pas banget diminum siang-siang. Carica-nya juga enak, cocok buat oleh-oleh. Sambil beli ini keripiknya. Yang bikin saya suka, kualitas produknya enak, sempet nyob</p>	<p>Produk disukai konsumen, tapi ada catatan kualitas seperti kadar minyak pada keripik</p>	<p>Kualitas produk UMKM disabilitas diapresiasi, namun tetap perlu peningkatan pada aspek tertentu</p>
<p>Yang jelas difabel atau engga ya, nggak ada rasa "dibedain" atau gimana, tak anggap semuanya profesional. Saya lagi butuh untuk oleh-oleh orang rumah juga.”</p>	<p>Konsumen melihat pelaku UMKM disabilitas sebagai profesional dan produk mereka sebagai layak konsumsi/oleh-oleh.</p>	<p>UMKM disabilitas memiliki potensi sebagai penyedia produk oleh-oleh lokal berkualitas.</p>

## **C. Dampak Sosial dan Harapan Terhadap UMKM Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
<p>Menurut saya, belanja dari UMKM disabilitas itu bukan karena kasihan, tapi karena mereka emang punya produk yang bagus dan layak dihargai. Dengan belanja, kita ikut bantu mereka lebih mandiri, dan</p>	<p>Konsumen mendukung UMKM disabilitas atas dasar kualitas dan bukan belas kasihan</p>	<p>Paradigma konsumen mulai berubah ke arah kesetaraan dan penghargaan terhadap usaha mandiri disabilitas.</p>

pastinya juga ikut terbantu		
Menurut saya bakal lebih bagus kalau ada produk lain kayak snack tradisional atau kerajinan tangan unik dari teman-teman disabilitas.	Konsumen berharap ada diversifikasi produk dari UMKM disabilitas.	Ada peluang pengembangan jenis produk UMKM disabilitas untuk memperluas pasar dan dampak ekonomi.

## Pedoman Wawancara Masyarakat

**Nama** : Caca  
**Jenis Kelamin** : Perempuan

### A. Pengalaman Belanja Produk UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
Pengalaman saya cukup menarik dan tak terduga. Awalnya, saya hanya ingin membeli es dawet di depan toko Difabel Mart. Penjualnya, meskipun terlihat memiliki keterbatasan fisik di tangan, tetap ramah dan cekatan melayani saya. Setelah melihat toko Difabel Mart, saya penasaran dan masuk ke dalamnya. Ternyata, ada banyak produk yang menarik, seperti basreng kemasan, yang akhirnya saya beli juga	Konsumen awalnya tidak berniat membeli, namun akhirnya tertarik dengan produk setelah melihat langsung.	UMKM disabilitas berpotensi menarik perhatian konsumen secara spontan melalui pengalaman langsung.
Penjualnya, meskipun terlihat memiliki keterbatasan fisik di tangan, tetap ramah dan cekatan melayani saya.	Interaksi langsung dengan penjual disabilitas menciptakan kesan positif dan penghargaan terhadap semangat mereka.	Sikap ramah dan profesional pelaku UMKM disabilitas meningkatkan citra positif di mata konsumen.

## **B. Kualitas Produk dan Preferensi Konsumen UMKM Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
Saya cukup puas. Es dawetnya segar dan harganya terjangkau. Basrengnya juga enak, rasanya gurih dan tidak terlalu pedas, cocok untuk saya. Yang paling saya sukai adalah bagaimana semua produk itu dikemas rapi dan dijual langsung oleh individu dengan disabilitas.	Produk memiliki kualitas baik, harga terjangkau, dan kemasan rapi yang menarik perhatian konsumen.	UMKM disabilitas mampu menghasilkan produk yang bersaing dari segi rasa, harga, dan kemasan
Saya merasa kualitasnya tidak kalah dengan produk dari toko lain	Konsumen menilai produk UMKM disabilitas setara dengan produk komersial lainnya.	Persepsi positif terhadap kualitas produk meningkatkan nilai jual UMKM disabilitas di pasar umum.

### C. Dampak Sosial dan Harapan Terhadap UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
Saya mencari camilan dan minuman segar untuk perjalanan pulang, dan untungnya tersedia. Tapi menurut saya, produk seperti souvenir khas Dieng atau produk kreatif lainnya juga bisa dikembangkan. Itu bisa menjadi daya tarik tambahan bagi wisatawan	Konsumen berharap ada diversifikasi produk untuk menarik wisatawan, seperti kerajinan khas lokal.	Diversifikasi produk menjadi potensi strategis pengembangan UMKM disabilitas dalam sektor pariwisata.
Menurut saya, mendukung UMKM disabilitas sangat penting. Membeli dari mereka tidak hanya membantu secara ekonomi, tapi juga memberikan semangat bagi para pelaku UMKM disabilitas untuk terus berkarya. Saya merasa bahwa ini memberikan dampak positif, baik untuk komunitas mereka maupun untuk kesadaran masyarakat umum tentang potensi orang-orang dengan disabilitas. Saya senang bisa berkontribusi, meski kecil	Pembelian dari UMKM disabilitas dipandang berdampak sosial tinggi dan menumbuhkan semangat inklusi.	Dukungan konsumen terhadap UMKM disabilitas memperkuat inklusi sosial dan kemandirian ekonomi kelompok ini.

## Pedoman Wawancara Masyarakat

**Nama** : Renata  
**Jenis Kelamin** : Perempuan

### A. Pengalaman Belanja Produk UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
saya ini kan sedang transit di Kalianget, istirahat sebentar dari Dieng untuk ganti bis, terus iseng mampir ke toko disabilitas. Pengalaman belanja sih biasa aja, toko kecil tapi lumayan rapi	Konsumen mengunjungi UMKM disabilitas secara spontan dan menilai tempatnya sederhana namun cukup rapi.	UMKM disabilitas mulai dikenali oleh konsumen umum meskipun kesan awal masih biasa saja.
Saya beli keripik karena kasihan lihat penjualnya. Jadi, ya niatnya bantu mereka juga	Motivasi pembelian masih didasari rasa iba terhadap kondisi penjual disabilitas.	Masih ada persepsi kasihan dalam interaksi dengan UMKM disabilitas, bukan sepenuhnya karena kualitas produk.

### B. Kualitas Produk dan Preferensi Konsumen UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
alau soal puas, ya jujur masih kurang. Keripiknya terlalu berminyak waktu dicoba. Tapi saya ngerti mungkin mereka masih belajar dan belum sampai	Konsumen menilai kualitas produk masih di bawah standar UMKM pada umumnya, namun memberi	UMKM disabilitas masih perlu meningkatkan kualitas produk, khususnya dalam hal teknik produksi

seperti produk dari UMKM lainnya.	toleransi karena sedang berkembang.	makanan.
Yang saya suka, ya semangat mereka buat jualan, itu sih yang bikin salut.	Konsumen mengapresiasi semangat pelaku UMKM disabilitas meskipun kualitas produk belum maksimal.	Nilai positif dari semangat pelaku usaha tetap menjadi daya tarik meski kualitas produk masih harus diperbaiki.

### C. Dampak Sosial dan Harapan Terhadap UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
enurut saya, produk makanan mereka bisa dikembangkan lagi, terutama dari segi kualitas. Mungkin bisa belajar packaging yang lebih menarik atau cara pengolahan yang lebih baik biar rasanya lebih enak dan tidak terlalu berminyak	Konsumen menginginkan peningkatan kualitas produk dan kemasan agar lebih menarik dan bersaing.	Perlu pendampingan dalam pengembangan keterampilan teknis dan visual produk UMKM disabilitas.
Saya pikir penting banget mendukung UMKM disabilitas. Membeli produk mereka artinya kita ikut memberi mereka kesempatan untuk berkembang dan mandiri. Dampaknya jelas positif, apalagi kalau makin banyak orang yang beli dan kasih feedback supaya mereka bisa lebih baik ke depannya	Dukungan konsumen dianggap berkontribusi pada kemandirian penyandang disabilitas.	Kesadaran akan dampak sosial positif dari dukungan terhadap UMKM disabilitas mulai tumbuh di kalangan konsumen.

## Pedoman Wawancara Masyarakat

**Nama** : Tifani  
**Jenis Kelamin** : Perempuan

### A. Pengalaman Belanja Produk UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>Pengalamannya biasa aja ya. Awalnya saya hanya berniat beli air mineral karena kebetulan transit di Kalianget. Tapi pas masuk ke toko, saya lihat banyak oleh-oleh khas Dieng seperti keripik, makanan ringan, dan lainnya. Akhirnya saya tertarik beli keripik ketela seharga 20 ribu. Yang membuat saya agak kaget, ternyata yang melayani adalah orang dengan disabilitas. Itu aja sih</p>	<p>Konsumen awalnya tidak tahu toko disabilitas, tapi pengalaman belanja jadi berkesan karena dilayani langsung oleh difabel.</p>	<p>Pengalaman belanja bisa meningkatkan kesadaran konsumen terhadap eksistensi UMKM disabilitas.</p>
<p>Awalnya tidak tahu. Saya baru sadar setelah melihat yang melayani saya adalah seorang disabilitas dengan cacat fisik. Setelah bayar, saya baru lihat ada tulisan "Toko Disabilitas" di tempat itu. Jadi, informasi itu tidak sengaja saya dapatkan setelah bayar beli ini</p>	<p>Konsumen tidak memiliki ekspektasi khusus sebelumnya dan interaksi terjadi secara natural.</p>	<p>Interaksi konsumen dengan UMKM disabilitas masih bersifat spontan, bukan karena dorongan program kampanye.</p>

## B. Kualitas Produk dan Preferensi Konsumen UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
Keripik ketelanya enak, renyah, dan harganya juga wajar. Yang saya paling suka ya biasa aja ya. Meski dikelola oleh orang dengan disabilitas, pelayanannya ramah dan profesional. Itu memberikan nilai tambah yang bikin saya merasa produk ini layak untuk dibeli	Konsumen menilai kualitas produk baik dan harganya sesuai.	Produk UMKM disabilitas dapat bersaing dalam hal rasa dan harga di pasar lokal.
	Pelayanan dari pelaku disabilitas dinilai positif dan memengaruhi keputusan pembelian.	Pelayanan yang baik menjadi faktor penting dalam membentuk citra positif UMKM disabilitas di mata konsumen.

## C. Dampak Sosial dan Harapan Terhadap UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
Menurut saya, produk khas daerah seperti ini bisa lebih dikembangkan, baik dari variasi produknya maupun kemasannya. Mungkin juga bisa ditambah dengan informasi lebih jelas tentang siapa pengelolanya atau cerita di balik produk tersebut untuk menarik minat pembeli	Konsumen ingin produk lebih variatif dan memiliki nilai cerita untuk menambah daya tarik	Perlu strategi branding dan storytelling untuk memperkuat identitas produk UMKM disabilitas.
Mendukung UMKM disabilitas itu penting karena bisa membantu mereka. Tapi jujur, alasan saya beli bukan karena kasihan, melainkan ya dari pingin beli air mineral itu aja	Konsumen tidak didorong oleh rasa iba, namun tetap menyadari pentingnya dukungan.	Kesadaran akan pentingnya dukungan terhadap UMKM disabilitas sudah mulai terbentuk meski tidak sepenuhnya menjadi motivasi awal.

## Olahan Data Wawancara Partner

**Nama** : Galih  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Profesi/ Jabatan** : Penanggung Jawab Program CSR Bank  
**Wonosobo**

### A. Peran CSR dalam Pengembangan UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
Kita melihat UMKM disabilitas itu adalah teman-teman difabel yang bisa berkarya dan produktif dengan potensi yang mereka miliki.	Difabel dipandang sebagai pelaku usaha potensial	CSR mendukung pemberdayaan ekonomi difabel berbasis produktivitas
Kontribusi kita ya dari CSR ini, kita coba support mereka supaya tetap bisa berkarya dan lebih produktif ke depannya. Contohnya, nanti kita ada rencana bantu teman-teman difabel yang membatik di Garung, dengan pendampingan dan dana CSR dari kami.	CSR difokuskan pada kegiatan produktif seperti batik	CSR menyasar dukungan rill seperti dana dan pendampingan sektor batik
Tahun ini, kita arahkan CSR untuk teman-teman difabel supaya mereka bisa terus produktif. Contohnya, kita akan bantu mereka yang membatik, baik dari sisi pendampingan maupun bantuan dana supaya mereka bisa lebih	Prioritas CSR tahun ini adalah UMKM disabilitas	Fokus CSR tahun ini berpihak pada kelompok disabilitas secara eksplisit

berkembang. Harapannya, mereka lebih mandiri dan bisa bersaing.”		
--	--	--

## B. Strategi dan Bentuk Dukungan Kepada UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
Tantangannya mungkin mereka butuh support lebih untuk tetap produktif dan berkelanjutan. Strategi kita ya kasih pendampingan dan bantuan dana lewat CSR.	CSR menggunakan pendekatan pelatihan dan pembiayaan	Kombinasi pendampingan dan dana menjadi strategi utama CSR
Kita coba dorong teman-teman difabel ini, misalnya mereka yang membatik di Garung, supaya lebih berkembang dan usahanya bisa jalan terus.	Fokus dukungan pada penguatan kapasitas dan keberlanjutan usaha	Pendekatan CSR menyasar keberlanjutan, bukan hanya bantuan satu kali

## C. Kolaborasi dan Harapan Kepada UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
Ke depannya, kita mau terus lanjutkan program CSR ini biar manfaatnya lebih luas. Harapan kita ya bisa terus sinergi sama Pemda, karena kita juga ingin bantu pengentasan kemiskinan di Wonosobo.	Kolaborasi CSR selaras dengan visi pemerintah daerah	CSR menjadi bagian dari sinergi lintas sektor untuk pengurangan kemiskinan
Kita mau pastikan semua, termasuk teman-teman difabel, bisa merasakan manfaat dari keberadaan Bank Wonosobo.	CSR ditujukan untuk jangka panjang dan inklusif	CSR Bank Wonosobo berkomitmen jangka panjang terhadap pemberdayaan UMKM disabilitas

## Pedoman Wawancara Partner

**Nama** : Manjie  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Profesi/ Jabatan** : Pimpinan Redaksi Wonosobo Satu Menit

### A. Peran Media dalam Pemberdayaan UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>Kalau bicara UMKM berbasis potensi disabilitas, menurut saya itu tentang bagaimana mereka memanfaatkan apa yang mereka punya, meskipun dengan keterbatasan. Misalnya, ada yang jago bikin keripik, ada juga yang kreatif jualan dawet atau basreng. Mereka ini bukan hanya cari nafkah, tapi juga menunjukkan ke dunia bahwa mereka bisa mandiri. Saya sendiri berusaha mendukung mereka lewat media. Dengan menulis, meliput, atau sekadar menyuarakan cerita mereka ke masyarakat yang lebih luas. Kadang saya bingung juga, apa cukup hanya dengan tulisan? Tapi saya percaya,</p>	<p>Media digunakan sebagai alat pemberdayaan dan penyambung suara UMKM disabilitas</p>	<p>Media lokal memiliki peran penting dalam membangun kesadaran publik terhadap potensi UMKM disabilitas</p>

<p>kalau lebih banyak yang tahu, dukungan akan datang lebih besar.</p>		
<p>Yang saya lakukan sebenarnya sederhana. Lewat media lokal, saya berusaha angkat cerita-cerita mereka. Ada yang jualan bakso crispy, basreng, atau keripik carica. Cerita mereka ini sering nggak terlihat. Padahal, mereka butuh sekali dukungan—pelatihan, pasar, atau modal.</p>	<p>Cerita UMKM disabilitas sering tak terlihat tanpa peran media</p>	<p>Media dapat menjembatani informasi dan memperluas dukungan sosial bagi UMKM disabilitas</p>
<p>Saya pernah coba koneksi dengan beberapa pihak, seperti komunitas lokal atau event UMKM, supaya produk mereka lebih dikenal. Tapi ya, saya sadar, ini nggak cukup. Banyak yang harus dilakukan di tingkat kebijakan juga</p>	<p>Inisiatif pribadi untuk koneksi ke pelatihan dan promosi</p>	<p>Dukungan informasi melalui jaringan pribadi berperan dalam mengisi kekosongan sistemik</p>

## B. Tantangan dan Kesenjangan Dukungan

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>Jujur, kolaborasi ini masih jadi PR besar. Kadang pemerintah punya program, tapi pelaksanaannya nggak sampai ke teman-teman disabilitas.</p> <p>Misalnya, ada yang cerita, dia nggak pernah dapat pelatihan dari dinas, padahal dia terdaftar.</p> <p>Kalau saya, peran saya lebih ke jembatan komunikasi. Lewat tulisan, saya sampaikan kebutuhan mereka—apa yang mereka harapkan dari pemerintah atau lembaga lain. Saya nggak tahu, itu cukup efektif atau nggak, tapi setidaknya</p>	Ada ketimpangan antara program pemerintah dan realisasi di lapangan	Kurangnya efektivitas implementasi program pemerintah untuk disabilitas
ada suara mereka yang terdengar		
<p>Wah, tantangannya banyak sekali. Dari stigma masyarakat, kurangnya pelatihan, keterbatasan modal, sampai akses pasar yang minim. Apalagi soal teknologi. Banyak dari mereka yang masih belajar pakai media sosial untuk jualan. Narimah misalnya, dia ingin belajar cara</p>	UMKM disabilitas menghadapi tantangan multidimensi	Hambatan struktural dan sosial masih mendominasi proses pengembangan usaha disabilitas

promosi yang lebih efektif, tapi nggak tahu harus mulai dari mana.		
--	--	--

### C. Harapan dan Gagasan

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
saya berharap ada platform yang khusus untuk UMKM disabilitas. Sebuah ruang di mana produk mereka bisa dikenal lebih luas.	Usulan ruang khusus promosi bagi UMKM disabilitas	Perlu ekosistem inklusif yang memfasilitasi pemasaran produk disabilitas
Kalau saya, lewat media ini, saya mau terus jadi suara mereka. Mungkin kecil, tapi saya percaya, dari hal kecil, perubahan besar bisa terjadi.	Komitmen jangka panjang menggunakan media sebagai sarana advokasi	Peran media sebagai agen perubahan sosial untuk disabilitas perlu diperkuat dan difasilitasi
Pemerintah bisa benar-benar hadir buat mereka. Jangan cuma di atas kertas. Fasilitas seperti toilet di Difabel Mart yang ramah disabilitas saja belum ada. Apa susahnya memperhatikan hal-hal kecil seperti itu? Selain itu, saya berharap ada platform yang khusus untuk UMKM disabilitas.	Aksesibilitas fisik masih diabaikan	Pemerintah perlu lebih peka terhadap kebutuhan dasar inklusi di ruang publik UMKM

## **Olahan Data Wawancara Pemerintah Kabupaten Wonosobo**

**Nama : Dra. Harti, M.M**  
**Jenis Kelamin : Perempuan**  
**Profesi/ Jabatan : Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD)**

### **A. Pengembangan UMKM Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
”UMKM berbasis potensi disabilitas di Kabupaten Wonosobo menunjukkan perkembangan yang positif, terutama sejak difokuskan pada pemberdayaan ekonomi oleh pemerintah daerah. Beberapa UMKM telah berhasil menghasilkan produk unggulan seperti batik, makanan ringan, dan kerajinan tangan lainnya. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan besar dalam hal akses pasar, ketersediaan alat produksi, dan kemampuan pengelolaan keuangan. Sebagian besar pelaku usaha disabilitas masih bergantung pada bantuan pihak eksternal untuk modal dan	UMKM disabilitas berkembang, tetapi masih menghadapi tantangan pada aspek pemasaran, alat, dan pengelolaan usaha	UMKM disabilitas mengalami pertumbuhan, namun masih menghadapi hambatan struktural dan teknis yang signifikan

<p>pelatihan, sehingga keberlanjutannya menjadi salah satu isu utama yang perlu perhatian.”</p>		
<p>”Dinsos PMD telah menerapkan berbagai program, seperti pelatihan keterampilan batik, literasi keuangan, dan pemberian bantuan alat produksi kepada UMKM berbasis disabilitas. Salah satu program unggulan adalah "Bangga</p>	<p>Dinsos punya kebijakan afirmatif: pelatihan, bantuan alat, serta pasar kbusus melalui ASN</p>	<p>Program strategis pemerintah daerah mendorong pertumbuhan UMKM disabilitas melalui intervensi teknis dan promosi pasar lokal</p>
<p>Bela Beli" yang mengarahkan ASN untuk menggunakan produk lokal, termasuk batik hasil produksi penyandang disabilitas. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan pasar yang stabil bagi UMKM disabilitas. Selain itu, ada juga kerja sama dengan BUMD dan Kementerian Sosial untuk memberikan dukungan teknis dan bantuan finansial. Program ini dirancang untuk mendorong kemandirian ekonomi para pelaku UMKM.”</p>		

<p>”Tantangan utama meliputi akses pasar yang terbatas, kurangnya infrastruktur pendukung, rendahnya literasi keuangan, serta keterbatasan alat produksi. Selain itu, stigma sosial terhadap kemampuan disabilitas juga menjadi hambatan tersendiri. Strategi Dinas untuk mengatasi tantangan ini adalah melalui penguatan pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, dan literasi keuangan. Dinas juga membangun jaringan pasar melalui program kerja sama lintas sektor, termasuk dengan sektor swasta dan lembaga sosial.</p>	<p>Tantangan direspon dengan pelatihan dan kolaborasi lintas sektor</p>	<p>Strategi penanggulangan tantangan UMKM difabel melibatkan penguatan kapasitas dan sinergi kelembagaan</p>
<p>”Dinas telah melakukan asesmen potensi disabilitas dengan melibatkan tim dari Kementerian Sosial dan Sentra Kartini di Temanggung. Asesmen ini dilakukan secara berkala untuk memetakan kebutuhan spesifik pelaku usaha disabilitas, seperti alat bantu kerja, pelatihan keterampilan, dan modal usaha. Hasil asesmen digunakan sebagai dasar untuk</p>	<p>Telah dilakukan asesmen potensi untuk dasar perencanaan program</p>	<p>Pendekatan berbasis data digunakan dalam perencanaan pengembangan UMKM disabilitas</p>

<p>merancang program yang lebih tepat sasaran, termasuk pelibatan mereka dalam pelatihan pengelolaan usaha dan pengembangan produk unggulan.”</p>		
<p>”Dinas memberikan pelatihan manajemen usaha untuk memastikan bahwa para pelaku UMKM dapat mencatat dan mengelola keuangan dengan baik. Pendampingan ini juga mencakup pemisahan dana untuk keperluan produksi dan tabungan untuk masa depan”</p>	<p>Pelatihan manajemen dan keuangan menjadi bentuk inovasi dinas</p>	<p>Inovasi pengelolaan usaha memperkuat kemandirian UMKM disabilitas</p>
<p>”Dukungan teknis yang diberikan meliputi pelatihan keterampilan, pengelolaan alat produksi, dan pengembangan produk. Selain itu, terdapat pelatihan literasi keuangan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mencatat pemasukan dan pengeluaran. Bentuk dukungan lainnya adalah fasilitasi pemasaran produk melalui pameran dan media digital.”</p>	<p>Bentuk dukungan menyentuh aspek teknis dan promosi</p>	<p>Pelatihan dan fasilitasi pemasaran menjadi pilar pendukung produktivitas UMKM disabilitas</p>

<p>”Rencana ke depan meliputi perluasan kerja sama dengan sektor swasta untuk pemasaran produk, pembangunan sentra ekonomi berbasis disabilitas, dan penguatan infrastruktur pendukung. Dinas juga akan meningkatkan intensitas pelatihan dan monitoring agar UMKM disabilitas dapat berkembang secara mandiri dan berkelanjutan.”</p>	<p>Strategi masa depan fokus pada kolaborasi, infrastruktur, dan pelatihan</p>	<p>Rencana jangka panjang mencerminkan kesinambungan dan kemandirian UMKM disabilitas</p>
<p>”Program ini telah masuk dalam RPJM Daerah sejak difokuskan pada pemberdayaan difabel tahun 2022. Fokusnya adalah meningkatkan kemandirian ekonomi disabilitas melalui pengembangan UMKM dengan bantuan alat, pelatihan, dan pembukaan akses pasar.”</p>	<p>Pengembangan UMKM disabilitas menjadi bagian RPJM sejak 2022</p>	<p>Komitmen pemerintah daerah diwujudkan dalam dokumen perencanaan resmi</p>

## **B. Interaksi & Relasi Kelembagaan dalam Pengembangan UMKM Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
”Kolaborasi telah dilakukan dengan beberapa pihak, seperti Sentra Kartini di Temanggung, BUMD Bank Wonosobo, dan Kementerian Sosial. Fokus kolaborasi ini adalah memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan akses pasar kepada UMKM disabilitas.”	Terdapat kolaborasi lintas lembaga untuk mendukung UMKM Disabilitas	Kerja sama multi pihak memperluas dukungan sumber daya dan kapasitas pelaku UMKM disabilitas
”Kolaborasi melibatkan pemerintah daerah, BUMD, LSM, dan lembaga pendidikan. Pemerintah memberikan kebijakan dan bantuan teknis, BUMD menyediakan dukungan finansial melalui CSR, dan LSM membantu dalam pendampingan sosial. Lembaga pendidikan berkontribusi dalam pelatihan keterampilan.”	Pembagian peran antar stakeholder cukup jelas dan terarah	Kolaborasi antar lembaga memperkuat keberlanjutan program UMKM disabilitas
”Kolaborasi ini memainkan peran penting dalam mengisi kekurangan pemerintah, terutama dalam hal pendampingan dan pemasaran. LSM dan sektor swasta membantu meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, sementara	Peran kolaboratif bantu tutupi keterbatasan sumber daya pemerintah	Kolaborasi menjadi solusi atas keterbatasan pemerintah dalam pemberdayaan UMKM disabilitas

lembaga pendidikan menyediakan pelatihan keterampilan sesuai kebutuhan.”		
”Kerja sama dengan sektor swasta diwujudkan melalui program CSR. MoU tertulis ada, namun detailnya perlu dikonfirmasi lebih lanjut. Fokus kerja sama ini adalah memasarkan produk UMKM disabilitas, seperti batik dan makanan ringan, melalui saluran distribusi yang lebih luas.”	Ada kerja sama resmi dengan sektor swasta, fokus pada pemasaran	Dukungan sektor swasta memperluas jaringan distribusi produk UMKM disabilitas

### C. Faktor Pendorong dan Penghambat UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
”Kelompok batik difabel yang telah mencapai keuntungan Rp1.800.000 per bulan adalah contoh konkret. Faktor kunci keberhasilan mereka adalah pendampingan intensif, pengelolaan keuangan yang baik, dan akses pasar melalui program "Bangga Bela Beli".”	Pendampingan dan pasar berperan penting dalam kesuksesan UMKM	Keberhasilan UMKM disabilitas dipengaruhi dukungan berkelanjutan dan akses pasar
”Sumber pendanaan meliputi CSR dari sektor swasta, dana desa, dan bantuan dari Sentra Kartini Temanggung. Meskipun pendanaan	Pendanaan tersedia namun belum semua pelaku mampu akses secara mandiri	Aksesibilitas terhadap pendanaan masih menjadi kendala bagi sebagian besar pelaku UMKM

tersedia, pelaku UMKM disabilitas seringkali membutuhkan pendampingan untuk mengaksesnya secara optimal.”		disabilitas
“Hambatan infrastruktur meliputi aksesibilitas fisik yang masih kurang memadai, seperti transportasi ke sentra ekonomi. Dampaknya adalah keterbatasan dalam distribusi produk dan efisiensi operasional.”	Masalah infrastruktur berdampak langsung pada operasional UMKM	Kurangnya infrastruktur aksesibel membatasi mobilitas dan distribusi hasil UMKM disabilitas
“Program pendampingan akan dilakukan mencakup literasi keuangan dan pengelolaan usaha. Program ini cukup efektif, terlihat dari peningkatan kualitas produk dan kemampuan mencatat keuntungan serta pemisahan dana produksi.”	Pendampingan berdampak positif pada peningkatan kualitas dan kapasitas	Program pendampingan merupakan faktor penting dalam pengembangan UMKM disabilitas
“Tidak ada peraturan yang secara langsung menghambat, tetapi kurangnya sistem monitoring dan pengelolaan bantuan menjadi tantangan. Hal ini dapat menyebabkan bantuan tidak dimanfaatkan secara optimal.”	Tantangan bukan regulasi, tapi implementasi dan pengawasan program	Sistem monitoring program masih perlu diperkuat untuk memastikan efektivitas dukungan UMKM disabilitas

**Nama : Siti Sri Heni S. Sp, M.M Dan Andreas Bima K, S.Tr.Sos**  
**Jenis Kelamin : Perempuan dan Laki-Laki**  
**Profesi/ Jabatan : Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dinsos PMD) beserta Pegawai dalam bidang sosial yang Aktif Dengan Disabilitas**

#### **A. Strategi dan Program Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
<p>"Kalau kami mendefinisikan UMKM berbasis potensi disabilitas itu adalah usaha yang dijalankan oleh teman-teman disabilitas, memanfaatkan keterampilan atau potensi yang mereka miliki. Jadi bukan hanya sekadar usaha, tapi usaha yang sesuai dengan kemampuan mereka. Saat ini di Kabupaten Wonosobo, ada sekitar 4.000 penyandang disabilitas dengan berbagai jenis, seperti fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Tapi kalau ditanya jumlah yang benar-benar berwirausaha, datanya</p>	<p>UMKM disabilitas = usaha berbasis potensi/keterampilan penyandang disabilitas. Pendataan masih umum.</p>	<p>Belum ada data spesifik UMKM disabilitas meskipun jumlah disabilitas cukup besar</p>

memang belum terperinci sampai ke situ.”		
"Kami punya beberapa program, misalnya pemberian alat bantu usaha seperti alat servis elektronik, alat membatik, dan alat untuk usaha kuliner. Selain itu, ada juga pelatihan-pelatihan bekerja sama dengan provinsi dan Kemensos, seperti pelatihan memijat untuk teman-teman netra. Kami juga memfasilitasi pemasaran produk UMKM disabilitas, misalnya lewat kegiatan dinas atau kerja sama dengan Difabel Mart. Jadi kami upayakan dukungannya itu konkret dan sesuai kebutuhan mereka.	Bantuan konkret melalui pelatihan dan alat sesuai kebutuhan disabilitas	Dukungan konkret tersedia, namun bergantung pada jenis disabilitas dan kemampuan
"Kami biasanya mulai dari asesmen. Jadi kami petakan dulu potensi mereka. Mana yang memang bisa didorong untuk usaha, mana yang perlu bantuan rehabilitasi sosial, atau mana yang hanya butuh alat bantu. Prosesnya melalui kunjungan lapangan, ngobrol langsung dengan teman-teman disabilitas atau kelompoknya. Dengan begitu, kami tahu	Proses berbasis pendekatan partisipatif dan pemetaan potensi individu	Identifikasi berbasis <i>assesmen</i> langsung & sosial

mana yang bisa diarahkan untuk berwirausaha."		
"Ada banyak jenis pelatihan. Untuk teman-teman netra, kami pernah kirim mereka ke pelatihan pijat di Temanggung selama dua tahun. Ada juga pelatihan membatik di Desa Maron, pelatihan cukur rambut untuk teman-teman tuli, pelatihan marketing, dan lainnya. Selain itu, kami dampingi mereka untuk mendapatkan modal usaha dari Sentra Terpadu Kartini di Temanggung, yang merupakan program Kemensos."	Pelatihan dan dukungan modal terfokus dan kolaboratif	Pelatihan berbasis kebutuhan, kolaborasi dengan Kemensos
"Strateginya, kami mulai dari lingkup kecil dulu, seperti membeli produk mereka untuk kegiatan dinas. Misalnya, snack rapat sering kami pesan dari usaha disabilitas. Selain itu, kami dukung pemasaran melalui Difabel Mart. Ke depan, kami ingin Difabel Mart bisa jadi pusat oleh-oleh khas Wonosobo dan daya tarik wisata, terutama di jalur Dieng."	Mulai dari internal, lalu perluasan pasar melalui branding dan lokasi strategis	Pemasaran bertahap: internal - publikasi melalui Difabel Mart
"Yang kami lihat itu dari perubahan kondisi teman-teman disabilitas	Dampak di ukur dari perubahan ekonomi idan perilaku	Dampak dinilai dari kemandirian & pemanfaatan bantuan

<p>program. Misalnya, ada yang dulunya tidak punya penghasilan, sekarang sudah bisa mandiri. Selain itu, kami juga pantau dari evaluasi program seperti pelatihan atau pemberian alat. Kalau mereka aktif menggunakan bantuan dan usaha mereka berkembang, berarti programnya berhasil."</p>	<p>setelah program</p>	
<p>"Rencana ke depan, kami ingin lebih banyak kolaborasi, baik dengan provinsi, maupun sektor swasta. Selain itu, kami ingin ada pengembangan Difabel Mart sebagai pusat pemberdayaan disabilitas. Kami juga berharap bisa memperluas pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar, supaya usaha teman-teman disabilitas semakin berkembang."</p>	<p>Fokus ke kolaborasi, perluasan peran Difabel Mart, dan pelatihan adaptif</p>	<p>Strategi jangka panjang: Kolaborasi &amp; Penguatan kelembagaan Difabel Mart</p>

## **B. Interaksi & Relasi Kelembagaan dalam Pengembangan UMKM Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
<p>"Ada, tentu saja. Kami sering kerja sama dengan Sentra Terpadu Kartini milik Kemensos, kemudian ada juga pelatihan dari provinsi. Kalau dengan NGO atau swasta, biasanya mereka membantu dari segi pelatihan atau pemasaran. Jadi kolaborasi ini penting untuk mendukung program kami."</p>	<p>Kolaborasi penting untuk memperluas cakupan &amp; efektivitas program</p>	<p>Kolaborasi antar lembaga jadi kunci pengembangan UMKM disabilitas</p>
<p>"Tentu kami menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak. Misalnya, dengan pemerintah provinsi dan Kemensos, kami koordinasi untuk pelatihan dan bantuan alat melalui Sentra Terpadu Kartini di Temanggung. Dengan NGO, biasanya mereka membantu pendampingan teknis, pemasaran produk atau pengelolaan usaha. Untuk sektor swasta, kami coba libatkan mereka dalam mendukung pemasaran, misalnya menjual produk UMKM disabilitas di</p>	<p>Kolaborasi terstruktur &amp; fungsional antar lembaga</p>	<p>Model kerja sama: teknis, pemasaran, hingga CSR</p>

<p>toko-toko atau mereka. Selain itu, ada juga beberapa program CSR dari perusahaan yang membantu teman-teman disabilitas mendapatkan alat produksi atau pelatihan khusus. Kolaborasi ini sangat penting agar program kami lebih luas dan berdampak nyata."</p>		
<p>"Iya, salah satu contohnya kami ajak sektor swasta untuk beli produk mereka, misalnya snack atau oleh-oleh dari UMKM disabilitas. Harapannya ke depan, sektor swasta bisa lebih banyak terlibat, terutama untuk pemasaran ke luar daerah."</p>	<p>Akses pasar swasta masih terbatas, potensi besar dikembangkan</p>	<p>Akses pasar swasta masih awal, perlu perluasan.</p>

### C. Faktor Pendorong dan Penghambat UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>"Contohnya ada Ibu Danti, beliau punya usaha kue kering yang sekarang sudah punya karyawan. Ada juga Pak Kuwat yang servis elektronik, usahanya terus berkembang setelah dapat bantuan alat dari kami. Ini contoh nyata kalau program kami memang bisa membantu teman-teman disabilitas jadi lebih mandiri."</p>	Keberhasilan disebabkan dukungan alat & pelatihan tepat guna	Contoh keberhasilan nyata dukungan program sosial
<p>"Kalau nggak ada, mungkin kendalanya di stigma masyarakat atau kurangnya akses ke informasi. Tapi sejauh ini, teman-teman disabilitas yang mau berusaha pasti kami bantu, asalkan ada kemauan dari mereka."</p>	Motivasi individu + dukungan program = kunci sukses	Hambatan sosial dan informasi masih signifikan

**Nama** : Dibyo Astu Sigit Pramana, S.Sos, M.P.H  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Profesi/ Jabatan** : Kepala Bidang Koperasi dan UKM

### **A. Strategi dan Program Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
<p>"Saat ini, data produk unggulan dari UMKM disabilitas belum terdokumentasi secara detail, tetapi kami mengenal beberapa produk yang potensial dari hasil pembinaan dan pelatihan yang sudah dilakukan. Contohnya, ada produk kerajinan tangan seperti batik hingga produk makanan ringan khas Wonosobo seperti keripik atau jajanan tradisional. Produk-produk ini sering kami fasilitasi dalam acara pameran atau bazar. Ke depannya, kami berencana membuat sistem pendataan khusus untuk produk-produk ini agar lebih mudah dipromosikan dan dikembangkan."</p>	<p>Produk disabilitas potensial sudah ada (batik, makanan ringan), tapi belum terdokumentasi dengan baik. Ada rencana sistem pendataan khusus</p>	<p>Belum ada pendataan formal produk unggulan disabilitas; fasilitasi promosi sudah dilakukan lewat pameran</p>

<p>"Ya, kami memiliki program pembinaan dan pelatihan untuk pelaku UMKM disabilitas, meskipun frekuensinya masih terbatas, biasanya dilakukan satu hingga dua kali setahun. Contohnya, pelatihan kewirausahaan untuk membantu mereka memahami manajemen usaha sederhana, termasuk cara mengelola modal kecil. Frekuensi program ini memang masih bergantung pada alokasi anggaran, tetapi kami berupaya agar semakin rutin dengan menggandeng pihak-pihak lain."</p>	<p>Pelatihan rutin tapi terbatas jumlahnya. Materi meliputi manajemen usaha. Kolaborasi dengan pihak lain di rencanakan.</p>	<p>Program inovatif sudah ada tapi intensitasnya rendah; ada upaya pengembangan melalui kolaborasi.</p>
<p>"Untuk saat ini, roadmap khusus UMKM disabilitas memang belum tersedia. Namun, program tahunan kami sudah mencakup pemberdayaan kelompok ini, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan akses permodalan, dan fasilitasi pemasaran. Arah kebijakannya lebih bersifat umum, tetapi kami berusaha agar UMKM disabilitas bisa lebih terlibat. Kami juga mendorong mereka untuk bergabung dengan program pengembangan yang</p>	<p>Roadmap spesifik belum ada. Namun, kegiatan tahunan sudah mendukung pengembangan UMKM disabilitas. Ada rencana penyusunan roadmap ke depan</p>	<p>Roadmap pengembangan UMKM disabilitas belum formal, tetapi arah program sudah inklusif</p>

<p>bersifat inklusif.</p> <p>Ke depannya, kami ingin menyusun roadmap yang lebih terarah dan terukur agar potensi UMKM disabilitas bisa lebih maksimal.”</p>		
<p>“Disdagkopukm memiliki peran penting sebagai fasilitator dan pendukung utama. Kami memberikan pelatihan, memfasilitasi akses permodalan, hingga membantu promosi melalui berbagai kegiatan seperti pameran atau bazar. Selain itu, kami juga mencoba menjalin kerjasama dengan dinas lain atau pihak swasta untuk menciptakan peluang baru bagi UMKM disabilitas. Kami percaya bahwa dengan dukungan yang tepat, mereka bisa menjadi lebih mandiri dan berkembang pesat.”</p>	<p>Disdagkopukm bertindak sebagai fasilitator: pelatihan, promosi, dan akses permodalan. Komitmen inklusi dalam event daerah &amp; nasional</p>	<p>Peran aktif Disdagkopukm dalam fasilitasi dan inklusi UMKM disabilitas di berbagai event</p>
<p>“Kenapa mereka harus diproteksi secara khusus. Kongkritnya begini, Komitmen dari itu disetiap event yang itu merupakan komitmen pemerintah daerah dan itu turun ke Dinas yang memberdayakan UMKM, kita selalu ingat disabilitas. Contoh, kita ada expo umkm kemaren yang dari</p>		

<p>Kementerian, kemarin kan dalam rangka Ulang Tahun Wonosobo itu kan pinter-pinternya kita. Wonosobo kan Anggaranya kecil, bahkan kami tidak punya anggaran untuk Expo.”</p>		
<p>“Bidang Koperasi dan UMKM di Disdagkopukm Kabupaten Wonosobo telah menyediakan berbagai jenis pelatihan dan bimbingan untuk membantu UMKM disabilitas meningkatkan keterampilan dan kapasitas manajerial mereka. Salah satu program utama adalah pelatihan kewirausahaan, di mana mereka diajarkan tentang dasar-dasar manajemen usaha, pengelolaan keuangan, pemasaran produk, hingga cara mengembangkan produk agar lebih kompetitif. Selain itu, kami juga memberikan pelatihan keterampilan teknis, seperti pembuatan kerajinan atau produk makanan. Pelatihan ini dilakukan dalam bentuk workshop atau sesi tatap muka, dan untuk memaksimalkan hasilnya, kami sering mengandeng narasumber dari praktisi atau pengusaha yang berpengalaman. Kami juga</p>	<p>Pelatihan komprehensif mencakup manajerial dan teknis. Pendampingan juga diberikan</p>	<p>Pelatihan UMKM disabilitas sudah mencakup aspek manajerial dan teknis serta ada pendampingan</p>

memberi pendampingan setelah pelatihan agar peserta bisa langsung mempraktekkan ilmu yang didapat dan mengatasi kesulitan yang mereka hadapi di lapangan."		
"Ke depan, kami berencana untuk memperkuat dukungan terhadap UMKM disabilitas dengan beberapa strategi utama. Salah satunya adalah meningkatkan akses pasar untuk produk UMKM disabilitas, baik secara lokal maupun nasional. Kami juga akan fokus pada penguatan kapasitas manajerial mereka, terutama dalam hal pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk agar lebih kompetitif di pasar. Selain itu, kami berencana untuk menjalin lebih banyak kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga sosial, perusahaan swasta, dan asosiasi, untuk membuka peluang akses pendanaan dan pemasaran yang lebih luas. Kami juga akan lebih intensif melakukan pendampingan dan memberikan pelatihan yang berkelanjutan. Salah	Fokus ke depan: akses pasar, kapasitas manajerial, kolaborasi, dan kemudahan regulasi	Strategi pengembangan UMKM disabilitas difokuskan pada peningkatan kapasitas dan akses pasar dengan pendekatan kolaboratif

<p>satu langkah lainnya adalah memastikan bahwa UMKM disabilitas dapat lebih mudah mengakses perizinan dan dukungan lain dari pemerintah, agar mereka dapat lebih mandiri dan berkembang."</p>		
--	--	--

## **B. Interaksi & Relasi Kelembagaan dalam Pengembangan UMKM Disabilitas**

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>"Saat ini, peta mitra potensial belum tersusun secara formal. Namun, kami memiliki daftar lembaga yang sering berkolaborasi dengan kami, seperti Dinas Sosial, LSM lokal, dan beberapa sektor swasta. Daftar ini biasanya kami gunakan sebagai acuan untuk mencari mitra ketika ada program baru yang perlu melibatkan banyak pihak. Kami berharap ke depannya bisa menyusun peta mitra yang lebih terperinci agar kerjasama semakin terarah."</p>	<p>Belum ada peta mitra formal, namun sudah ada daftar mitra informal yang digunakan untuk koordinasi kegiatan</p>	<p>Pemetaan mitra belum formal, tapi praktif kolaborasi telah berjalan melalui daftar lembaga mitra</p>

<p>"Ya, kami sering berkolaborasi dengan Dinas Sosial, LSM, dan sektor swasta. Misalnya, Dinas Sosial sering membantu dalam hal identifikasi kelompok disabilitas yang membutuhkan bantuan. Sementara LSM biasanya membantu memberikan pelatihan tambahan atau pendampingan usaha. Dari sektor swasta, kami sering bekerja sama dalam kegiatan pameran atau CSR untuk pemberdayaan."</p>	<p>Ada pola kolaborasi antarlembaga dengan pembagian peran: Disdagkopukm, Dinsos, Dinkes, LSM, dan akademisi saling melengkapi</p>	<p>Pola koordinasi fleksibel dan berbasis kegiatan, meski belum terintegrasi secara sistematis</p>
<p>"Kolaborasi kami biasanya dimulai dari koordinasi program. Misalnya, Dinas Sosial mengidentifikasi kelompok disabilitas, kami memfasilitasi pelatihan, dan LSM mendampingi mereka secara langsung. Namun ini belum intens</p>	<p>Komitmen tinggi terhadap pengarustumaan disabilitas. Dukungan diberikan lewat anggaran dan lobi fasilitas dalam kegiatan promosi</p>	<p>Komitmen kuat dari Disdagkopukm terhadap pengarustamaan inklusi disabilitas melalui dukungan anggaran dan advokasi akses fasilitas</p>
<p>dan akan kami terus lakukan Sektor swasta juga sering kami libatkan untuk memberikan akses pasar atau bantuan permodalan melalui CSR. Kolaborasi ini terus kami perkuat agar lebih terintegrasi."</p>		

### C. Faktor Pendorong dan Penghambat UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>"Hambatan utama adalah kurangnya akses pasar dan minimnya keterampilan pemasaran. Banyak pelaku UMKM disabilitas yang belum memahami cara memasarkan produk efektif, baik secara langsung maupun melalui platform digital. Selain itu, produk mereka sering kali kalah bersaing karena packaging atau branding yang belum maksimal."</p> <p>"Jadi, kalau ada expo di luar kami tidak bisa ikut karena ga ada anggaranya. Ini kita balik, kita gak ada anggaranya tapi bagaimana kita bisa menyelenggarakan event itu di Wonosobo tanpa Pemda mengeluarkan duit. Kita Lobby ke Kementerian, nanti Kementerian ada kegiatan itu kita tarik kesitu. Jadi, EO nya dari sana, kita menjadi EO Lokal. Kami yang mengkurasai UMKM. Karena apa? Dari sana itu kita lobby, ada stand-stand yang gratis"</p>	<p>Dukungan utama berasal dari semangat penyandang disabilitas, keluarga, dan komunitas sekitar.</p>	<p>Faktor internal seperti motivasi, serta dukungan sosial dari keluarga dan komunitas jadi kekuatan utama UMKM disabilitas</p>

<p>"Kami mengukur dampak ekonomi melalui evaluasi rutin, seperti melihat peningkatan pendapatan UMKM yang telah mendapatkan pembinaan. Selain itu, kami juga memantau jumlah produk yang berhasil masuk ke pasar, baik lokal maupun luar daerah. Data ini kami gunakan untuk menilai efektivitas program dan menentukan langkah perbaikan ke depannya.</p> <p>Karena kami juga ada pendamping UKM-nya"</p>	<p>Kendala utama meliputi keterbatasan modal, kepercayaan diri, dan kedala geografis</p>	<p>Hambatan utama: akses modal terbatas, kepercayaan diri rendah, serta hambatan geografis dalam distribusi produk</p>
<p>"Contoh yang bisa kami sampaikan adalah salah satu UMKM disabilitas yang bergerak di bidang olahan makanan. Mereka mendapat dukungan dari kami dalam hal pelatihan keterampilan, dan akses pasar. Salah satu faktor kunci keberhasilan nya adalah kemauan mereka untuk terus berinovasi dan memperbaiki produk mereka agar lebih</p>	<p>Solusi yang dijalankan: kredit UMKM, pelatihan motivasi, promosi daring. Diperlukan pendampingan berkelanjutan</p>	<p>Upaya solusi sudah dimulai melalui akses pembiayaan, peningkatan motivasi, dan digitalisasi pemasaran; namun butuh kontinuitas</p>

menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Selain itu, mereka juga aktif dalam mengikuti pelatihan dan bimbingan yang kami adakan, yang berfokus pada pengelolaan usaha dan pemasaran produk secara digital. Kami juga membantu mereka dengan memfasilitasi akses ke pameran dan pasar yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun regional. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah dukungan dari komunitas dan keluarga mereka, yang memberikan motivasi dan kepercayaan diri untuk terus berkembang. Selain itu mereka juga memang sudah lama usahanya.”

**Nama** : Hartono  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Profesi/ Jabatan** : Pendamping UMKM

### A. Dukungan dan Pendampingan UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
“Jadi begini, ada fasilitas dari provinsi, pertama terkait perizinan seperti sertifikat Halal. Salah satunya produk dari Bu Danti yang termasuk paling aktif.	Pendampingan diberikan dalam bentuk fasilitasi perizinan seperti sertifikat halal	Pendampingan UMKM disabilitas mencakup fasilitasi legalitas usaha
Beliau sangat ingin mengikuti pelatihan dan terus belajar. Tahun lalu ada pelatihan tentang pengemasan dan pemasaran. Selain itu, sertifikat halal yang habis masa berlakunya juga telah kami bantu perpanjang.”	Pelatihan berfokus pada pengemasan dan pemasaran	Pemerintah memberikan pelatihan teknis dan pemasaran
”Bantuan dari pemerintah sejauh ini paling banyak berupa pelatihan. Misalnya, selama COVID-19 ada beberapa pelatihan, tetapi bantuan berupa alat produksi masih belum tersedia.”	Pelatihan diberikan rutin, namun bantuan alat produksi minim	Fokus bantuan masih pada pelatihan, belum menyentuh peralatan produksi

<p>“Dalam pelatihan pemasaran, pelaku UMKM diajari pemasaran online. Ada pelatih yang mengajarkan cara mendaftar di platform seperti Facebook Ads, TikTok, dan Shopee. Bahkan, ada yang sampai mengikuti pelatihan di Jakarta.”</p>	<p>Pelatihan melibatkan platform digital untuk pemasaran</p>	<p>UMKM disabilitas dilatih pemasaran digital</p>
<p>“Biaya transportasi biasanya diberikan oleh provinsi, tapi tidak selalu. Kadang mereka harus menggunakan dana pribadi untuk menghadiri pelatihan.”</p>	<p>Biaya pelatihan kadang ditanggung pribadi</p>	<p>Pembiayaan pelatihan belum sepenuhnya ditanggung</p>

## B. Tantangan dan Hambatan Pengembangan UMKM Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>“Banyak UMKM disabilitas yang bisa memproduksi barang, tetapi belum bisa menjualnya dengan baik, atau sebaliknya. Dari segi kualitas produk, sebenarnya bagus. Tapi ketika masuk ke expo, yang dicari biasanya produk dengan branding dan pengemasan yang baik, seperti batik</p>	<p>Produk UMKM disabilitas kalah saing dalam aspek visual</p>	<p>Tantangan utama adalah pengemasan dan branding produk</p>

unggulan. Hal ini yang masih menjadi tantangan, meskipun untuk makanan biasanya lebih mudah dipasarkan.”		
“Pastinya ada, terutama ketika melihat produk UMKM non-disabilitas yang tampilannya lebih menarik di toko modern, meskipun kualitas produk UMKM disabilitas sebenarnya tidak kalah bagus.”	Perbedaan akses pasar meninbulkan kecemburuan	Kecemburuan muncul karena ketimpangan akses dan tampilan produk
“Kendala utama adalah kesabaran dalam memberikan pendampingan. Selain itu, anggaran sering kali menjadi tantangan karena kami harus menunggu dana dari provinsi. Misalnya, banyak pelaku UMKM yang tidak memahami bahwa anggaran terbatas, sehingga kami harus menjelaskan dengan baik	Pendampingan kesulitan dengan kesabaran dan anggaran terbatas	Pendampingan terhambat oleh keterbatasan SDM dan dana
Kadang ada pelatihan dari dinas tertentu, tapi tidak terhubung dengan program pemasaran atau bantuan dari instansi lain. Jadi, hasil pelatihan itu tidak berlanjut menjadi peluang usaha.”	Kurangnya integrasi antarprogram	Tidak sinkronnya pelatihan dan tindak lanjut jadi hambatan

### C. Antusiasme, Partisipasi, dan Strategi Pengembangan

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
“Disabilitas selalu diikutsertakan, biasanya sekitar lima orang atau lebih. Kami selalu berusaha agar mereka tetap mendapatkan kesempatan.”	Disabilitas mendapat prioritas dalam pelatihan	Partisipasi UMKM disabilitas tetap diupayakan meski kuota terbatas
“Sangat tinggi, terutama dari ibu-ibu. Mereka sangat bersemangat untuk mengikuti pelatihan. Dalam setahun terakhir, kami sudah melakukan lebih dari 20 kali pelatihan, termasuk dari provinsi seperti di Semarang.”	Pelaku UMKM disabilitas antusias ikut pelatihan	Semangat belajar dan berkembang sangat tinggi
“Produksi tetap berjalan, meskipun tidak banyak. Yang penting, ada kegiatan produksi yang melibatkan disabilitas, bahkan bisa memperkerjakan orang non-disabilitas.”	Aktivitas produksi konsisten meski skala kecil	Output pendampingan menciptakan keberlanjutan usaha
“Salah satu caranya adalah menitipkan produk di tempat pariwisata atau toko oleh-oleh. Tapi, kami memastikan produk yang dititipkan sudah layak, seperti kue kering yang tahan lama atau keripik kentang.”	Strategi distibusi lewat pariwisata dan oleh-oleh	Strategi pemasaran diarahkan ke sektor wisata lokal

<p>“Ada banyak yang aktif kok, tidak hanya mereka. Semua pelaku UMKM disabilitas memiliki semangat yang tinggi untuk terus berkembang.”</p>	<p>Banyak pelaku UMKM disabilitas aktif</p>	<p>Pelaku UMKM disabilitas menunjukkan kemandirian dan peran aktif</p>
---	---	--

## Olahan Data Wawancara UMKM Disabilitas

**Nama : Imah**  
**Jenis Kelamin : Perempuan**  
**Profesi/ Jabatan : Pelaku UMKM Pakaian Anak & Kuliner**

### A. Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dalam Pengembangan Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
"Iya, saya pernah dapat dukungan, tapi cuma pelatihan aja sih dari pemerintah. Misalnya pelatihan marketing, tapi itu juga cuma beberapa kali. Jadi nggak terlalu banyak."	Dukungan dari Pemerintah terbatas pada pelatihan marketing dan tidak rutin.	Dukungan dari pemerintah belum berkelanjutan dan tidak merata
"Kalau fasilitas di Difabel Mart ya cukup membantu, tapi kalau toilet dekat yang ramah disabilitas itu belum ada, jadi kasian untuk teman-teman difabel yang butuh. Kalau fasilitas lainnya ya masih kurang diperhatikan juga."	Fasilitas pendukung seperti toilet belum ramah difabel.	Infrastruktur belum inklusif bagi pelaku UMKM disabilitas
"Pinginnya ya ada pengembangan lewat Difabel Mart. UMKM disabilitas ini kan jelas harus didorong terus. Bantuan seperti pelatihan lagi atau pengemasan produk, khususnya kuliner seperti Bakso Crispy Imah yang saya jalani sekarang, itu penting banget."	Ingin pengembangan Difabel Mart dan pelatihan lanjutan.	Informan menginginkan dukungan strategis dalam bentuk fasilitas dan peningkatan kapasitas.

<p>"Pernah sih, pelatihan dari pemerintah itu ada, tapi ya cuma pelatihan marketing aja, nggak terlalu sering. Kalau dari Baznas sama IDW, pelatihan ada juga, dan lebih banyak saling belajar antar difabel."</p>	<p>Pelatihan dari Pemerintah tidak sering. Dari IDW lebih aktif</p>	<p>Pelatihan dari komunitas lebih konsisten dibanding pemerintah</p>
<p>"Belum pernah sama sekali. Saya juga nggak tahu kalau ada assessment kayak gitu dari pemerintah. Usaha saya kan baru mulai awal 2023, jadi mungkin itu juga pengaruhnya."</p>	<p>Tidak ada asesmen dari pemerintah</p>	<p>Pemerintah belum melakukan pemetaan potensi UMKM disabilitas</p>
<p>"Sarannya, pemerintah lebih perhatian ke produk disabilitas. Difabel Mart itu dikembangkan lagi, terutama fasilitas seperti toilet yang ramah disabilitas. Juga dukungan untuk pelatihan lebih banyak, termasuk pemasaran online atau media sosial, itu saya pingin banget belajar supaya usaha saya lebih berkembang."</p>	<p>Saran pelatihan digital dan peningkatan fasilitas</p>	<p>Pemerintah perlu memperhatikan pelatihan digital dan infrastruktur</p>

## **B. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan UMKM Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
<p>"Iya, dari pemerintah pernah dapat pelatihan marketing, walaupun nggak banyak. Kalau dari Baznas, saya kan UMKM binaan, jadi pernah ikut pameran dan pelatihan juga. Dari IDW juga pernah ada pelatihan antar difabel, jadi saling belajar gitu."</p>	<p>Lembaga non-pemerintah aktif memberikan pelatihan dan akses pameran.</p>	<p>Komunitas dan NGO memiliki peran signifikan dalam pemberdayaan</p>
<p>"Kerjasamanya sih lebih ke saling belajar aja sama teman-teman difabel di IDW. Misalnya belajar resep, ngolah produk, atau coba-coba bareng. Tapi kalau sama UMKM lain, belum ada kerja sama langsung."</p>	<p>Kerja sama dalam bentuk saling belajar antar difabel.</p>	<p>Komunitas disabilitas menjadi media utama pertukaran pengetahuan.</p>
<p>"Wah, kalau itu saya kurang tahu, soalnya saya belum pernah dengar kerja sama pemerintah sama organisasi lain buat UMKM disabilitas. Selama ini sih dukungan cuma sebatas pelatihan aja."</p>	<p>Tidak mengetahui adanya kolaborasi pemerintah - lembaga</p>	<p>Kolaborasi lintas lembaga belum tersosialisasi ke pelaku UMKM</p>

<p>"Dari Baznas sama IDW sih lebih ke bantu kita belajar dan ikut pameran. Tapi kalau ngedukung kebijakan pemerintah, saya kurang tahu ya apakah mereka kerja sama langsung atau enggak."</p>	<p>Komunitas menyediakan akses ke pelatihan dan promosi</p>	<p>Komunitas menjadi ujung tombak pengembangan UMKM disabilitas</p>
<p>"Saya pinginnya ada lebih banyak pelatihan, terutama untuk pemasaran di media sosial. Terus produk disabilitas itu lebih diperhatikan, kayak kemasan produk saya masih sederhana banget, mungkin butuh bantuan supaya bisa lebih bagus."</p>	<p>Harapkan pelatihan digital dan peningkatan kualitas produk</p>	<p>Kebutuhan literasi digital dan branding menjadi perhatian utama</p>
<p>"Sarannya, pemerintah harus lebih serius ngembangkan Difabel Mart, karena ini tempat yang bagus buat produk disabilitas. Fasilitas seperti toilet ramah difabel juga penting banget. Organisasi lain juga bisa bantu promosi atau bikin program kerja sama supaya UMKM disabilitas lebih maju."</p>	<p>Harapkan ada perbaikan infrastruktur pada difabel mart dari pemerintah dan komunitas non difabel dalam membantu promosi UMKM disabilitas</p>	<p>Pemerintah menjadi tumpuan dalam pengembangan fasilitas yang telah diberikan dan berbagai komunitas/NGO menjadi harapan majunya UMKM disabilitas</p>

### **C. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
"Nama usahanya Bakso Crispy Imah."	UMKM Kuliner milik disabilitas perempuan	Usaha berbasis kuliner oleh pelaku disabilitas
Usaha ini baru mulai awal tahun 2023."	Usaha tergolong baru	UMKM ini masih dalam tahap awal pengembangan
"Saya jualan bakso crispy dan juga es dawet di depan toko Difabel Mart. Sebelumnya juga sempat jualan pakaian anak sebagai reseller.	Produk kuliner lokal	Produk berbasis potensi lokal dijalankan secara sederhana
"Karyawan belum ada, cuma saya sendiri yang dibantu anak dan suami."	Tidak memiliki karyawan tetap	Usaha berbasis keluarga dan belum menyerap tenaga kerja lain
Motivasinya supaya ada penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari, buat anak sekolah, dan buat makan keluarga. Juga ingin mandiri meskipun dengan kondisi saya."	Ingin mandiri dan bantu keluarga	Kemandirian ekonomi jadi motivasi utama
"Awalnya itu kurang yakin, terus belajar sedikit-sedikit. Masih bingung soal kadaluarsa produk dan pemasaran di media sosial. Produksi juga belum banyak karena masih baru."	Tidak memahami regulasi produk dan literasi digital rendah	Tantangan utama: Kualitas produk dan pemasaran digital

<p>"Belajar terus, saling belajar sama teman-teman di IDW. Kadang juga belajar resep-resep sendiri di YouTube di rumah. Yang penting pelan-pelan coba dan terus belajar."</p>	<p>Belajar mandiri dan komunitas</p>	<p>Pembelajaran informal jadi solusi bertahan</p>
<p>"Untuk menjaga kreativitas, sering coba-coba resep baru dari YouTube. Kadang teman-teman juga kasih masukan, jadi saya coba terus."</p>	<p>Inovasi dilakukan mandiri dan dari masukan teman</p>	<p>Inisiatif menjaga kualitas dan variasi produk secara otodidak</p>
<p>Usaha ini jadi contoh kalau difabel juga bisa mandiri dan punya usaha sendiri. Kalau Difabel Mart berkembang, pasti banyak yang terbantu, terutama UMKM disabilitas."</p>	<p>Difabel Mart dipandang strategis untuk komunitas disabilitas</p>	<p>Difabel Mart punya potensi sebagai pusat pemberdayaan komunitas</p>
<p>Hasil usaha ini lumayan untuk bantu biaya anak sekolah dan kebutuhan sehari-hari keluarga. Jadi, suami juga bisa fokus bantu usaha."</p>	<p>Usaha memberi kontribusi nyata bagi ekonomi keluarga</p>	<p>UMKM disabilitas menopang ekonomi rumah tangga</p>
<p>Selama ini masih di Difabel Mart aja. Kalau ada yang datang dan lihat-lihat, saya cerita tentang produk saya, jadi mereka tahu."</p>	<p>Pemasaran masih konvensional, belum digital</p>	<p>Keterbatasan pemasaran menjadi hambatan pengembangan usaha</p>
<p>Belum pakai media sosial. Tapi saya ingin banget belajar gimana cara jualan yang benar di media sosial, biar lebih banyak yang tahu produk saya."</p>	<p>Ada minat tinggi untuk belajar pemasaran digital</p>	<p>Literasi digital jadi kebutuhan mendesak</p>

<p>Selama ini lebih ke saling belajar sama teman- teman di IDW. Kalau pameran dari Baznas juga jadi kesempatan buat kenalin produk saya."</p>	<p>Jaringan dibangun melalui komunitas</p>	<p>Komunitas jadi ruang utama membangun jejaring bisnis</p>
<p>"Harapannya, usaha ini bisa lebih berkembang, lancar, dan ada dukungan dari pemerintah. Kalau bisa, Difabel Mart juga dikembangkan lagi, fasilitasnya diperbaiki, biar teman-teman difabel lain juga terbantu."</p>	<p>Ingin usaha maju, dukungan pemerintah lebih nyata</p>	<p>Dukungan kelembagaan dan fasilitas inklusif sangat diharapkan</p>

**Nama** : Syaifur Rohman  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Profesi/ Jabatan** : Pelaku UMKM Kuliner

**A. Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dalam Pengembangan**  
**Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>”Sebenarnya, sampai saat ini saya belum pernah menerima dukungan langsung dari pemerintah untuk pengembangan usaha saya. Dukungan yang saya dapat lebih banyak dari komunitas seperti Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW). Kalau dari pemerintah, hanya terdata sebagai pelaku UMKM saja, tetapi bentuk bantuan atau dukungan seperti pelatihan atau pendampingan belum pernah saya rasakan”.</p>	<p>Tidak ada dukungan langsung dari pemerintah, hanya pendataan</p>	<p>Pemerintah belum menjalankan program pendampingan UMKM disabilitas secara merata</p>
<p>“Fasilitas umumnya, sih, sudah ada beberapa yang mendukung, tetapi kadang masih kurang ramah untuk disabilitas. Misalnya, akses ke tempat-tempat pameran atau lokasi pelatihan sering kali tidak menyediakan jalur yang mudah untuk kami. Saya juga merasa fasilitas</p>	<p>Aksesibilitas fasilitas umum masih rendah bagi disabilitas</p>	<p>Infrastruktur pendukung UMKM disabilitas belum inklusif</p>

seperti tempat promosi produk belum banyak memberikan ruang khusus untuk UMKM disabilitas.”		
Harapan saya, pemerintah bisa lebih perhatian dengan memberikan jalur yang jelas untuk pengembangan produk UMKM disabilitas. Misalnya, pelatihan pemasaran, bantuan modal, atau program promosi khusus. Selain itu, saya ingin produk kami diperlakukan sama dengan produk UMKM lain, tidak diremehkan atau dipandang sebelah mata.”	Harapan pada pelaihan, bantuan, dan perlakuan yang setara	Kebutuhan akan intervensi afirmatif dari pemerintah sangat tinggi
“Setahu saya, ada pelatihan-pelatihan dari pemerintah, tapi saya sendiri belum pernah ikut karena mungkin informasinya tidak sampai ke saya. Pelatihan yang saya ikuti selama ini semuanya dari IDW, misalnya belajar pemasaran online dan pengemasan produk.”	Informasi pelatihan tidak menyentuh pelaku UMKM disabilitas	Distribusi informasi dan inklusi dalam program pelatihan masih terbatas
“Wah, untuk penggalian potensi atau asesmen, saya belum pernah merasakannya juga. Mungkin ada program semacam itu, tapi lagi-lagi saya belum pernah dilibatkan. Kalau ada, saya rasa itu bisa sangat	Tidak ada asesmen atau identifikasi potensi oleh pemerintah	Pemerintah belum melakukan pemetaan potensi UMKM disabilitas

<p>membantui untuk tahu kekurangan dan kebutuhan usaha, tapi sejauh ini belum ada yang mendatangi atau melakukan asesmen ke usaha saya secara langsung.”</p>		
<p>“Saya sarankan agar pemerintah lebih proaktif menjangkau kami, para pelaku UMKM disabilitas. Kami butuh pendampingan, pelatihan, dan akses untuk promosi produk yang lebih luas. Kalau bisa, adakan pelatihan khusus untuk disabilitas, sehingga kami bisa belajar sesuai kebutuhan kami. Dan yang penting, pastikan fasilitas seperti lokasi pameran atau pelatihan ramah untuk disabilitas.”</p>	<p>Saran agar pemerintah aktif menjangkau dan menyesuaikan program</p>	<p>Perlu pendekatan yang lebih inklusif dan terstruktur</p>

## **B. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan UMKM Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
<p>“Selama ini, dukungan yang saya terima lebih banyak dari komunitas Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW). Dari IDW, saya pernah mendapat pelatihan pemasaran online dan bantuan tempat untuk memasarkan produk, seperti di Difabel Mart. Kalau dari pemerintah, saya belum pernah menerima pelatihan atau bantuan secara langsung. Saya hanya terdata sebagai pelaku UMKM di dinas.”</p>	Dukungan kuat dari komunitas disabilitas (IDW) sedangkan pemerintah pasif	Kolaborasi lebih kuat antar komunitas daripada dengan pemerintah
<p>“Iya, saya bekerja sama dengan teman-teman di IDW. Kami sering saling membantu, misalnya menitipkan produk untuk pameran atau berbagi informasi tentang pemasaran. Di Difabel Mart, produk saya juga dipasarkan bersama produk teman-teman disabilitas lain, jadi kami saling mendukung supaya semua usaha bisa berkembang.”</p>	Kolaborasi antar pelaku UMKM disabilitas terjadi secara organik	Komunitas menjadi penggerak utama dalam pengembangan UMKM disabilitas

<p>“IDW sangat membantu, terutama dalam memberikan pelatihan dan memfasilitasi pemasaran produk. Mereka juga sering memperjuangkan hak-hak kami di tingkat kabupaten. Kalau bicara kebijakan, saya rasa komunitas seperti IDW bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan pelaku UMKM disabilitas untuk memastikan kebijakan yang ada benar-benar diterapkan.”</p>	<p>IDW berperan sebagai penghubung dengan pemerintah</p>	<p>Organisasi disabilitas menjadi jembatan kebijakan dan pelaku UMKM</p>
<p>“Harapan saya, pemerintah dan pihak-pihak lain lebih memperhatikan kebutuhan kami, terutama dalam pelatihan dan promosi produk. Saya ingin ada program khusus untuk UMKM disabilitas, seperti pendampingan bisnis, bantuan peralatan, atau akses ke pasar yang lebih luas. Selain itu, fasilitas yang mendukung disabilitas, seperti tempat pameran yang ramah disabilitas, juga sangat penting.”</p>	<p>Harapan akan peran aktif berbagai pihak untuk UMKM disabilitas</p>	<p>Perlu sinergi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah</p>

<p>“Saran saya, pemerintah dan organisasi terkait lebih sering turun ke lapangan untuk melihat langsung kebutuhan UMKM disabilitas. Adakan pelatihan yang terfokus, jangan hanya untuk formalitas saja. Selain itu, perbanyak kerjasama dengan komunitas disabilitas karena mereka yang paling paham kebutuhan kami. Jangan lupa juga untuk membuat jalur pengembangan yang jelas, sehingga kami tahu langkah apa yang harus diambil untuk maju”.</p>	<p>Perlunya pendekatan lapangan dan kolaboratif</p>	<p>Kebutuhan peningkatan komunikasi dan kerja sama multipihak</p>
---	---	---

### **C. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
”Basreng Fa 888.”	Jenis usaha: Cemilan (Kuliner)	Produk khas UMKM disabilitas Wonosobo
”Usaha ini sudah saya jalankan sejak sebelum pandemi COVID-19, tapi saya mulai serius dan membenahi usaha saya pada tahun 2022.”	Usaha dirintis pasca-pandemi	Pandemi sebagai titik tolak profesionalisasi UMKM

“belum memiliki karyawan. Saya menjalankan usaha ini dibantu teman-teman disabilitas yang juga aktif di IDW.”	Operasional dilakukan mandiri dan berbasis komunitas	Usaha kecil, padat karya, dan saling bantu antar disabilitas
untuk mandiri secara ekonomi dan membuktikan bahwa disabilitas juga mampu berkontribusi seperti orang lain. Saya ingin menunjukkan bahwa kami bisa menciptakan sesuatu yang bernilai.”	Motivasi kuat secara psikologis dan sosial	Kemandirian ekonomi sebagai pendorong utama
Tantangannya banyak, mulai dari keterbatasan modal, pemasaran produk, hingga stigma dari masyarakat yang meremehkan kemampuan disabilitas. Selain itu, saya juga kesulitan memahami pemasaran online pada awalnya.	Hambatan internal dan eksternal	Keterbatasan modal dan stigma menghambat pertumbuhan
“Saya belajar sedikit demi sedikit, terutama pemasaran online menggunakan handphone. Dukungan dari komunitas IDW juga sangat membantu, baik secara moral maupun dalam memberikan pelatihan. Saya terus mencoba dan tidak menyerah.	Adaptasi teknologi dan peran komunitas	Dukungan komunitas vital dalam mengatasi hambatan
“Saya mendengar masukan teman-teman disabilitas. Selain itu, saya selalu terbuka untuk inovasi, seperti mencoba rasa baru atau mengemas produk dengan lebih	Kreativitas berbasis komunitas dan pasar	Upaya inovatif pendekatan partisipatif

menarik.”		
”Saya juga bekerja sama dengan mereka, sehingga usaha ini tidak hanya untuk saya, tetapi juga mendukung komunitas disabilitas agar lebih percaya diri.”	Dampak psikologis dan sosial pada komunitas	Usaha menciptakan efek berantai positif
Usaha ini membantu saya menopang ekonomi keluarga, terutama untuk kebutuhan sehari-hari”	Kontribusi ekonomi langsung pada keluarga	UMKM disabilitas menopang ekonomi rumah tangga
“menitipkan produk di Difabel Mart. Selain itu, saya memanfaatkan pameran yang diadakan komunitas untuk memperkenalkan produk saya.”	Promosi terbatas, berbasis komunitas	Jalur pemasaran masih konvensional dan terbatas
“Saya membangun jaringan melalui IDW dan Difabel Mart. Dari sana, saya banyak belajar dan mendapatkan informasi untuk memperluas pemasaran. Saya juga menjaga hubungan baik dengan teman-teman yang membantu memasarkan produk.”	Jaringan dibangun lewat komunitas	Relasi bisnis berbasis organisasi disabilitas
Harapan saya adalah usaha ini bisa lebih berkembang, memiliki karyawan, dan produk saya dikenal lebih luas. Saya juga ingin usaha ini memberikan dampak positif yang lebih besar bagi teman-teman disabilitas di Kabupaten Wonosobo.”	Visi ekspansi dan dampak sosial	Aspirasi berkembang sejalan dengan misi sosial

**Nama** : Jembar  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Profesi/ Jabatan** : Pelaku UMKM Kuliner

**A. Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dalam Pengembangan**  
**Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
<p>"Untuk dukungan dari pemerintah, sebenarnya saya terdaftar sebagai pelaku UMKM di dinas, tapi sejauh ini dukungan langsung yang saya terima baru satu kali. Saya pernah mengikuti pelatihan Boga yang diadakan oleh dinas, namun itu hanya sekali. Mungkin ada program lain, tapi saya belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai itu."</p>	<p>Dukungan pemerintah masih terbatas; hanya satu kali pelatihan yang diikuti</p>	<p>Minimnya intensitas dukungan langsung dari pemerintah kepada pelaku UMKM disabilitas</p>
<p>"Saya berharap pemerintah bisa memberikan perhatian lebih kepada UMKM disabilitas, terutama dalam hal pelatihan dan pengembangan produk. Banyak pelaku UMKM disabilitas yang membutuhkan jalur yang jelas untuk mengembangkan usaha</p>	<p>Harapan akan pelatihan dan pengembangan produk; pengalaman belajar justru banyak dari komunitas, bukan dari pemerintah</p>	<p>Kebutuhan pelatihan dan jalur pengembangan produk dari pemerintah sangat mendesak</p>

<p>mereka. Dulu, saya banyak belajar dari IDW dan Difabel Mart untuk pemasaran online. Saya ingin sekali pemerintah bisa memberikan dukungan yang lebih agar kami bisa lebih berkembang."</p>		
<p>"Sejauh ini, saya hanya mengikuti pelatihan Boga yang diadakan sekali oleh pemerintah. Pelatihan itu membantu, tapi sangat terbatas. Saya rasa pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan akan sangat membantu kami sebagai pelaku UMKM, terutama bagi teman-teman disabilitas yang ingin mengembangkan usaha mereka."</p>	<p>Pelatihan dari pemerintah dianggap kurang intensif</p>	<p>Pentingnya program pelatihan berkelanjutan bagi UMKM disabilitas</p>
<p>"Sejauh ini, saya belum pernah mengikuti assessment atau pengalian potensi yang dilakukan oleh pemerintah. Saya tahu bahwa di beberapa kesempatan, ada teman-teman yang mendapatkan informasi tentang hal ini, tapi saya sendiri belum pernah terlibat. Kalau ada, mungkin bentuknya lebih ke pameran atau kegiatan pelatihan."</p>	<p>Tidak ada kegiatan assessment</p>	<p>Belum optimalnya kegiatan penggalian potensi disabilitas secara sistematis oleh pemerintah</p>
<p>"Saya berharap pemerintah lebih memperhatikan UMKM disabilitas,</p>	<p>Harapan akan pelatihan dan perlakuan setara</p>	<p>Dukungan perlu inklusif dan menyasar aspek</p>

terutama dalam hal fasilitas dan akses pelatihan. seperti pelatihan branding dan pemasaran, akan sangat membantu kami dalam mengembangkan usaha. Saya juga ingin produk-produk disabilitas dipandang setara, tanpa ada diskriminasi.”		kualitas serta daya saing produk
---	--	----------------------------------

## **B. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan UMKM Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
“saya mendapatkan bantuan dari IDW dan Difabel Mart. Mereka membantu saya dalam memasarkan produk saya, terutama melalui platform online. Saya juga pernah mengikuti pelatihan Boga yang diselenggarakan oleh pemerintah, meskipun hanya sekali.”	Kolaborasi terjadi, tapi peran komunitas disabilitas lebih dominan	Lembaga non-pemerintah lebih aktif dalam pemberdayaan dibandingkan pemerintah
“bekerja sama dengan teman-teman disabilitas lain yang juga memiliki usaha. Kami sering berbagi pengalaman dan saling membantu dalam promosi produk. Misalnya, saya menitipkan produk saya di Difabel Mart, yang juga menampilkan produk	Ada kolaborasi internal komunitas disabilitas	Solidaritas komunitas menjadi kekuatan utama dalam pengembangan UMKM

teman-teman lainnya.”		
“Pemerintah Kabupaten Wonosobo sudah mulai bekerja sama IDW dan Difabel Mart, dalam mengembangkan UMKM disabilitas. Sebagai contoh, pemerintah memberikan fasilitas untuk pameran dan promosi produk melalui event-event tertentu.”	Ada bentuk kolaborasi, tapi masih terbatas pada fasilitasi acara	Kolaborasi pemerintah dan lembaga lain masih bersifat insidental
“IDW sangat berperan penting dalam mendukung UMKM. IDW jadi penghubung antara pemerintah dengan kami, memberikan pelatihan dan membantu kami dalam memahami cara mengelola usaha. Teman-teman juga sering memberikan pemahaman mengenai hak-hak disabilitas dan cara memanfaatkan program- program yang ada, meskipun kami masih sering merasa butuh lebih banyak bimbingan.”	IDW berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan komunitas disabilitas	Peran strategis organisasi sosial seperti IDW dalam advokasi dan edukasi
“Saya berharap pemerintah dapat lebih memperhatikan UMKM disabilitas, dengan menyediakan pelatihan yang lebih banyak. yang saya harapkan adalah adanya pendampingan berkelanjutan. Dukungan untuk pemasaran, baik secara offline maupun online, juga sangat penting	Kebutuhan pada bentuk dukungan yang berkelanjutan dan terarah	Keberlanjutan program dan digitalisasi menjadi kebutuhan utama

agar produk disabilitas bisa lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat.”		
“Pemerintah dan IDW bisa meningkatkan akses pelatihan untuk UMKM disabilitas, termasuk pelatihan branding dan pemasaran online. Selain itu, saya berharap ada program yang lebih berkelanjutan dalam membantu kami mengembangkan produk, seperti dukungan untuk pengemasan yang lebih profesional.”	Kebutuhan pada bentuk pelatihan-pelatihan yang mendukung perkembangan usaha disabilitas	Kolaborasi Pemerintah dan IDW menjadi harapan utama untuk pengembangan UMKM disabilitas

### C. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
“Keripik Carica Jembar” “2017” “keripik carica, buah carica yang dikeringkan dan diolah menjadi keripik” “Belum ada karyawan”	Usaha kecil skala mandiri, sudah berjalan cukup lama	UMKM disabilitas sudah eksis cukup lama, namun belum berkembang secara signifikan
“memiliki usaha sendiri yang bisa menghasilkan dan tidak bergantung pada orang lain”	Dorongan kuat dari dalam diri untuk mandiri	Kemandirian menjadi motivasi utama pelaku UMKM disabilitas

“pengetahuan pemasaran dan branding produk. Selain itu, fasilitas untuk usaha yang ramah disabilitas juga masih kurang”	Masalah utama adalah keterbatasan pengetahuan dan infrastruktur	Kurangnya pengetahuan teknis dan fasilitas menjadi penghambat utama
“belajar dari teman-teman di IDW dan Difabel Mart, serta memanfaatkan media sosial untuk memperkenalkan produk. Meskipun belum ahli, terus berusaha mempelajari cara yang lebih baik untuk memasarkan produk saya”	Inisiatif belajar mandiri dan pemanfaatan media sosial	Pelaku UMKM aktif mencari solusi dan belajar dari komunitas disabilitas
“mencoba bereksperimen dengan varian rasa baru untuk keripik carica, seperti menambahkan bumbu atau rasa”	Upaya menjaga inovasi produk	Ada semangat inovasi dan kreativitas dalam produk
”Usaha saya memberi contoh bahwa disabilitas tidak menghalangi seseorang untuk berusaha dan mandiri. Saya berharap usaha ini bisa menginspirasi teman-teman disabilitas lainnya untuk berani memulai usaha, meskipun ada banyak tantangan.”	Menjadi inspirasi bagi disabilitas lain	Usaha UMKM juga berperan dalam pemberdayaan
”sangat membantu perekonomian keluarga saya, karena dengan hasil penjualan, saya bisa menambah penghasilan untuk keluarga.”	Kontribusi ekonomi usaha terhadap rumah tangga	UMKM disabilitas mampu meningkatkan taraf ekonomi keluarga

<p>“Berharap usaha ini bisa berkembang lebih besar dan lebih dikenal, terutama di luar Wonosobo. Saya juga ingin produk saya bisa menjadi brand terkenal, dan semoga bisa membuka peluang lapangan pekerjaan bagi lebih banyak teman- teman disabilitas di masa depan”</p>	<p>Cita-cita jangka panjang</p>	<p>Ada visi jangka panjang untuk pengembangan usaha dan pemberdayaan</p>

**Nama** : Fuad  
**Jenis Kelamin** : Laki-Laki  
**Profesi/ Jabatan** : Pelaku UMKM Kuliner

**A. Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dalam Pengembangan**  
**Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
”Tidak, saya belum pernah menerima dukungan dari pemerintah untuk pengembangan usaha saya.”	Tidak ada dukungan pemerintah yang diterima	Dukungan langsung dari pemerintah terhadap UMKM disabilitas masih belum merata
”Saya belum banyak memanfaatkan fasilitas umum atau layanan untuk usaha saya, karena penjualan saya masih terbatas di Difabel Mart.”	Akses fasilitas umum belum dimanfaatkan	Aksesibilitas fasilitas umum belum maksimal dirasakan oleh pelaku UMKM disabilitas
”Saya berharap pemerintah memberikan pelatihan tentang cara membuat produk yang lebih baik, seperti rengginang yang lebih enak, serta dukungan pemasaran untuk meningkatkan penjualan.”	Harapan pelatihan teknis dan dukungan promosi	Pelaku UMKM menginginkan pelatihan peningkatan kualitas produk dan promosi
”Tidak, saya belum pernah mengikuti pelatihan dari pemerintah.”	Belum pernah ikut pelatihan dari pemerintah	Minimnya pelatihan dari pemerintah untuk pengembangan UMKM disabilitas
”Tidak, saya belum pernah mengalami penggalian potensi atau asesmen dari pemerintah.”	Tidak pernah ada asesmen potensi	Belum ada upaya sistematis dari pemerintah dalam penggalian potensi UMKM disabilitas

Pemerintah sebaiknya memberikan pelatihan tentang pembuatan produk yang lebih baik, pemasaran online, serta menyediakan fasilitas pemasaran seperti pameran khusus untuk UMKM disabilitas.	Saran pelatihan, pemasaran, dan pameran	Diperlukan pelatihan teknis, promosi digital, event pameran sebagai dukungan nyata dari pemerintah
--	---	--

## **B. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
Saya pernah mengikuti pelatihan public speaking yang diadakan oleh IDW, tetapi belum ada dukungan dari pemerintah.	Ada dukungan dari IDW, tidak dari pemerintah	Kolaborasi pemerintah dengan organisasi non-pemerintah belum dirasakan secara nyata
saya menitipkan produk di Difabel Mart	Ada kolaborasi antar UMKM disabilitas melalui Difabel Mart	Terjadi kolaborasi internal komunitas difabel melalui media pemasaran bersama
IDW membantu anggota dengan memberikan pelatihan, tetapi kebijakan pemerintah yang berkaitan langsung dengan kami belum saya rasakan.	Peran aktif IDW, kebijakan pemerintah belum terasa	Lembaga non-pemerintah seperti IDW lebih dominan dalam memberikan dukungan
Saya berharap pemerintah memberikan perhatian lebih kepada UMKM disabilitas melalui pelatihan, fasilitas promosi, dan	Harapan adanya pelatihan dan promosi dari pemerintah	Pemerintah diharapkan memperkuat peranannya dalam pengembangan UMKM difabel

pengembangan produk.		secara konkret dan terstruktur
----------------------	--	--------------------------------

### C. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
Saya belum memiliki nama khusus untuk usaha saya, tetapi saya memproduksi rengginang.	Produks: Rengginang tanpa brand	Produk lokal belum memiliki branding yang kuat
”Usaha saya berdiri sejak tahun 2022.”	Berdiri tahun 2022	Usaha relatif baru dan masih tahap pengembangan awal
”Sendiri.”	Belum memiliki karyawan	Belum mampu membuka lapangan kerja bagi sesama disabilitas
”untuk mendukung ekonomi keluarga.”	Motivasi ekonomi keluarga	Motivasi utama adalah kemandirian ekonomi pribadi dan keluarga
”kurangnya keterampilan membuat rengginang yang enak dan keterbatasan dalam memasarkan.”	Tantangan teknis dan pemasaran	Tantangan besar terletak pada kualitas produk dan pemasaran
”Saya mulai belajar masak lagi dan cara promosi online melalui sesi live di Difabel Mart”	Upaya mandiri belajar dan promosi digital	Pelaku UMKM mulai belajar mandiri dan memanfaatan platform

”mencari cara untuk meningkatkan rasa dan kualitas rengginang.”	Inovasi rasa produk	Kreativitas di upayakan melalui peningkatan mutu produk
”Alhamdulillah”	Memberi kontribusi ekonomi keluarga	Usaha membantu menambah penghasilan pribadi dan keluarga
”usaha saya berkembang dengan produk rengginang yang lebih baik dan dapat dikenal banyak orang.”	Harapan usaha tumbuh dan dikenal luas	Cita-cita pengembangan jangka panjang dan peningkatan produk lokal disabilitas

**Nama** : Nur Avina  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Profesi/ Jabatan** : Pelaku UMKM Kuliner

**A. Pemerintah Kabupaten Wonosobo Dalam Pengembangan**  
**Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
”Pelatihan dan promosi ”.	Mendapat pelatihan dan dukungan promosi dari pemerintah	Pemerintah telah memberikan dukungan melalui pelatihan dan promosi bagi UMKM disabilitas
”Harapan supaya banyak lagi pelatihan dan promosi”	Ingin pelatihan dan promosi lebih sering	Perlu peningkatan kuantitas dan kualitas dukungan pelatihan dan promosi dari pemerintah
”Marketing dan bisnis.”	Sudah ikut pelatihan tentang marketing dan bisnis	Pemerintah telah memfasilitasi pelatihan yang relevan dengan kebutuhan usaha
”Fasilitas Pameran.”	Saran untuk menyediakan fasilitas pameran	Pemerintah diharapkan aktif menyediakan media pameran bagi produk UMKM disabilitas

**B. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan UMKM Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

Data Mentah	Reduksi Data	Temuan
“Menerima dukungan dari Dinas yaitu pelatihan dan promosi.”	Pemerintah memberikan dukungan secara langsung	Dukungan dari instansi pemerintah (Dinas) sudah dirasakan oleh pelaku UMKM disabilitas
“Iya, produk sering dibawa untuk pameran.”	Ada kerja sama dengan komunitas dalam promosi produk	Kolaborasi antar pelaku UMKM disabilitas mendukung peningkatan eksistensi produk
“mendukung dari pelatihan itu yang diadakan.”	Kolaborasi melalui pelatihan	Pemerintah bekerja sama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan pelatihan
“Pemerintah terus memberikan pelatihan dan promosi produk saya.”	Harapan dukungan pelatihan dan promosi berkelanjutan	Pelaku UMKM menginginkan kesinambungan program dukungan dari pemerintah
“Lebih sering ada pameran dan pingin ikut sekali”.	Ingin sering diikutkan dalam kegiatan pameran	Perluasan akses UMKM disabilitas untuk ikut serta dalam pameran sangat diharapkan

### **C. Interaksi Dan Relasi Antara Pemerintah Dengan Institusi Lain Dalam Pengembangan Umkm Disabilitas Berbasis Potensi Disabilitas**

<b>Data Mentah</b>	<b>Reduksi Data</b>	<b>Temuan</b>
”Opak Ilat.” ”2018.”“produksi Opak Ilat, camilan khas Wonosobo berbahan dasar singkong.”	Usaha Opak ilat berdiri sejak tahun 2018 yang merupakan produk khas daerah berbahan lokal	UMKM sudah memiliki identitas produk dan usaha tergolong mapan serta memiliki pengalaman produksi cukup lama. UMKM juga mengangkat potensi lokal dari bahan baku yang tersedia
“bersama keluarga.”	Dibantu keluarga dalam produksi	Usaha masih dalam lingkup rumah tangga
“untuk membantu ekonomi keluarga dan memanfaatkan singkong.”	Motivasi ekonomi keluarga dan potensi lokal	Usaha berbasis kebutuhan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya lokal
”memasarkan produk sebelum mengikuti pelatihan.”	Tantangan di pemasaran	Kesulitan awal adalah pemasaran yang belum optimal
“Saya mengikuti pelatihan dari Dinas UKM, seperti Digital Marketing dan Strategi Bisnis.”	Mengatasi tantangan melalui pelatihan	Pemerintah sudah memfasilitasi solusi atas kendala pemasaran

<p>"Produk saya sering dibawa teman disabilitas ke pameran, sehingga ikut membantu promosi produk UMKM disabilitas."</p>	<p>Produk ikut dipromosikan oleh komunitas</p>	<p>Membangun solidaritas antar pelaku disabilitas melalui dukungan promosi kolektif</p>
<p>"cukup membantu ekonomi keluarga."</p>	<p>Memberi kontribusi ekonomi keluarga</p>	<p>Usaha berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga</p>
<p>"memanfaatkan strategi digital marketing yang saya pelajari dari pelatihan Dinas UKM."</p>	<p>Menggunakan strategi digital untuk promosi</p>	<p>Sudah mulai menerapkan digital marketing secara bertahap</p>
<p>"Iya, hasilnya belum, masih belajar"</p>	<p>Masih dalam tahap pembelajaran penggunaan media sosial</p>	<p>Penggunaan media digital belum optimal, masih perlu pendampingan lanjutan</p>
<p>"usaha semakin dikenal, bisa untuk keluarga, dan laris terus"</p>	<p>Harapan usaha sukses dan terus berkembang</p>	<p>Ingin memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kesejahteraan keluarga</p>

**Sejarah Berdirinya Difabel Mart di Wonosobo Berdasarkan Cerita Maryam (Pelaku UMKM, Saksi Sejarah Berdirinya Difabel Mart, Ketua HWDI, Sekretaris IDW)**

**Dokumentasi Wawancara - Sudah dilakukan Reduksi Data -  
Temuan Seperti Dalam Narasi dibawah ini**

Difabel Mart adalah sebuah konsep yang lahir dari keinginan untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Wonosobo. Inisiatif ini dimulai oleh Maryam Ramadani, seorang tokoh disabilitas yang juga aktif dalam Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) dan bagian dari Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW).

Maryam memulai proyek Difabel Mart sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai anggota Komisi Kabupaten Wonosobo Ramah HAM, sebuah komisi di bawah langsung Bupati yang berperan menyampaikan saran dan catatan terkait Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya hak-hak penyandang disabilitas. Komitmennya untuk mengedepankan HAM dan memberdayakan penyandang disabilitas di Wonosobo, serta pengakuan Wonosobo sebagai Kabupaten Ramah HAM, menjadi latar belakang berdirinya Difabel Mart. Maryam ingin menciptakan sebuah brand yang merepresentasikan kemandirian dan kemampuan penyandang disabilitas dalam berwirausaha, bukan hanya sebagai objek belas kasihan.

**Proses Perjuangan dan Dukungan**

Perjuangan untuk mendirikan Difabel Mart dimulai pada tahun 2018,

dan berlanjut selama tiga tahun penuh tantangan hingga akhirnya pada tahun 2022, Difabel Mart resmi berdiri. Maryam menghabiskan banyak waktu dan tenaga untuk merealisasikan proyek ini, termasuk mengawasi langsung pembangunan dan renovasi tempat yang diberikan oleh Dinas Pariwisata. Tempat yang awalnya dalam kondisi tidak layak tersebut kemudian diperbaiki dan disulap menjadi lokasi yang menarik, berfungsi tidak hanya sebagai toko, tetapi juga sebagai pusat rapat dan kegiatan UMKM bagi para penyandang disabilitas.

Dalam proses ini, Maryam mendapatkan bantuan melalui berbagai pihak, termasuk CSR dari AIRNAF (sebuah perusahaan penerbangan) yang memberikan dana sebesar 50 juta rupiah, serta dukungan alat-alat pengemasan dari Balai Kartini. Selain itu, Difabel Mart juga mendapatkan sokongan dari \*Dinas Sosial dan beberapa bantuan lainnya, termasuk sumbangan dari Baznas untuk biaya operasional seperti listrik.

### **Perkembangan Difabel Mart**

Pada masa kejayaannya, Difabel Mart berkembang pesat. Produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman disabilitas dijual di sana, baik secara offline maupun online. Selain itu, Difabel Mart juga berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti biro wisata dan mendapatkan kesempatan untuk menjual produk disabilitas kepada wisatawan. Pendapatan harian Difabel Mart bahkan pernah mencapai 8 juta rupiah saat ada kunjungan wisatawan, terutama ketika produk-produk batik difabel laku terjual.

Maryam selalu menjaga kualitas produk yang dijual di Difabel Mart. Ia tidak ingin orang membeli produk disabilitas hanya karena belas kasihan, tetapi karena produk tersebut berkualitas dan layak bersaing di pasar. Difabel Mart juga menjadi tempat bagi UMKM penyandang disabilitas untuk berkembang, dengan Maryam sendiri mendampingi mereka dalam proses produksi, mulai dari cara membuat produk hingga pengemasan dan pemasaran.

### **Tantangan dan Pergantian Pengelolaan**

Namun, tantangan tak terelakkan. Salah satunya datang ketika terjadi pembangunan di sekitar lokasi Difabel Mart yang menyebabkan debu masuk ke dalam toko, sehingga Maryam memutuskan untuk menutup sementara toko tersebut. Selain itu, perubahan dalam pengelolaan juga terjadi. Difabel Mart yang awalnya dikelola oleh Ikatan Disabilitas Wonosobo (IDW), akhirnya diambil alih oleh Dinas Sosial atas perintah Bupati, yang kemudian menunjuk pihak lain untuk mengelola toko ini. Maryam merasa kecewa dengan perubahan ini, terutama karena pengelolaan baru tidak menghasilkan perkembangan yang signifikan bagi teman-teman disabilitas yang sebelumnya terlibat aktif.

Meskipun demikian, Maryam tetap berkomitmen terhadap tujuan awal Difabel Mart, yaitu untuk membuktikan bahwa penyandang disabilitas bisa mandiri dan memiliki kemampuan yang setara dalam dunia usaha. Dia berharap Difabel Mart tetap menjadi tempat yang mendukung kemandirian ekonomi penyandang disabilitas dan terus berkembang sebagai wadah yang inklusif dan berdaya saing.